



NOTA KEUANGAN
dan
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2009



REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
BAB I PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR APBN DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN ANGGARAN 2009	
1.1 Pendahuluan	I-1
1.2 Ekonomi Global	I-2
1.3 Dampak pada Perekonomian Indonesia	I-5
1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi	I-6
1.3.2 Inflasi	I-11
1.3.3 Nilai Tukar Rupiah	I-13
1.3.4 SBI 3 Bulan	I-14
1.3.5 Harga Minyak Mentah Indonesia	I-16
1.3.6 <i>Lifting</i> Minyak	I-17
1.4 Asumsi Makro 2009	I-18
1.5 Neraca Pembayaran	I-19
BAB II PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	
2.1 Pendahuluan	II-1
2.2 Perubahan Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2009 ...	II-1
2.2.1 Penerimaan Dalam Negeri	II-2
2.2.2 Hibah Tahun 2009	II-19
BAB III PERKIRAAN REALISASI ANGGARAN BELANJA NEGARA	
3.1 Pendahuluan	III-1
3.2 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	III-4
3.2.1 Perubahan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis	III-5
3.2.2 Perubahan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi.....	III-13
3.3 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah 2009.....	III-27

	Halaman
3.3.1 Perubahan Dana Perimbangan.....	III-29
3.3.2 Perubahan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	III-36
BAB IV POKOK-POKOK PERUBAHAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN	
4.1 Defisit Anggaran	IV-1
4.2 Pembiayaan Defisit Anggaran	IV-2
4.2.1 Pembiayaan Non-Utang	IV-2
4.2.2 Pembiayaan Utang (neto)	IV-6
4.2.3 Pinjaman Siaga (<i>Public Expenditure Financing Facility/ Contingency Loan</i>)	IV-10
4.3 Dampak Perubahan Asumsi dan Defisit	IV-13

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Distribusi PDB Atas Harga Berlaku I-9
Tabel I.2	Laju Pertumbuhan PDB, 2008 – 2009 (persen, <i>y-o-y</i>)..... I-10
Tabel I.3	Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2008–2009.. I-19
Tabel I.4	Neraca Pembayaran Indonesia, 2008 – 2009 (juta US\$) I-20
Tabel II.1	Pendapatan Negara dan Hibah, 2009 II-2
Tabel II.2	Stimulus Fiskal Bidang Perpajakan 2009 II-3
Tabel II.3	Bea Masuk DTP 2009 II-4
Tabel II.4	Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP), 2009 II-5
Tabel II.5	Penerimaan Perpajakan, 2009 II-6
Tabel II.6	Penerimaan PPh Nonmigas Sektoral 2008 – 2009 II-8
Tabel II.7	Penerimaan PPN Dalam Negeri Sektoral, 2008 – 2009 II-9
Tabel II.8	Penerimaan PPN Impor Sektoral, 2008 – 2009 II-10
Tabel II.9	Perkembangan PNBPN Tahun 2009 II-15
Tabel II.10	PNBPN Kementerian Negara/Lembaga, 2009 II-17
Tabel III.1	Belanja Negara, Tahun 2009 III-4
Tabel III.2	Belanja Subsidi Tahun 2009 III-9
Tabel III.3	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, 2009 III-28
Tabel III.4	Transfer ke Daerah, 2009 III-38
Tabel IV.1	Potensi Pinjaman Siaga, Tahun 2009 – 2010 IV-12
Tabel IV.2	Pembiayaan Anggaran Berdasarkan Utang dan Non Utang, 2009 IV-12

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik I.1	Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju 2008.....	I-3
Grafik I.2	Pertumbuhan Ekonomi Global.....	I-3
Grafik I.3	Perkiraan Laju Perekonomian 2009.....	I-3
Grafik I.4	Perkiraan Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia 2009	I-4
Grafik I.5	Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia, 2000-2009.....	I-4
Grafik I. 6	Pertumbuhan Ekonomi Negara Kawasan Asia.....	I-5
Grafik I. 7	Pertumbuhan PDB.....	I-7
Grafik I.8	Sumber Pertumbuhan PDB Berdasarkan Penggunaan.....	I-8
Grafik I.9	Perkembangan Laju Inflasi IHK 2007-2009	I-11
Grafik I.10	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Juni 2009	I-11
Grafik I.11	Inflasi Berdasarkan Komponen Tahun 2009	I-12
Grafik I.12	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS dan Cadangan Devisa.....	I-14
Grafik I.13	Perkembangan BI <i>rate</i> , FASBI, SBI repo dan PUAB O/N.....	I-15
Grafik I.14	Perkembangan BI rate, SBI 3 Bulan, dan FED Fund Rate ...	I-16
Grafik I.15	Perkembangan Permintaan, Penawaran dan Harga Minyak Dunia, 2008-2009.....	I-17
Grafik I.16	<i>Lifting</i> Minyak 2007-2009.....	I-17
Grafik II.1	Penerimaan PPh Migas, 2008 - 2009	II-7
Grafik II.2	Penerimaan PPh Nonmigas, 2008 - 2009	II-7
Grafik II.3	Penerimaan PPN dan PPNBM, 2008 - 2009.....	II-9
Grafik II.4	Penerimaan PPN Dalam Negeri Sektor Industri Pengolahan, 2008 - 2009	II-9
Grafik II.5	Penerimaan PPN Impor Sektor Industri Pengolahan, 2008 - 2009	II-10
Grafik II.6	Penerimaan PBB, 2008 - 2009.....	II-11
Grafik II.7	Penerimaan BPHTB, 2008 - 2009.....	II-11
Grafik II.8	Penerimaan Cukai, 2008 - 2009	II-11
Grafik II.9	Penerimaan Pajak Lainnya, 2008 - 2009.....	II-12
Grafik II.10	Penerimaan Bea Masuk, 2008 - 2009.....	II-12

Grafik II.11 Penerimaan Bea Masuk Sektoral, s.d. Mei 2009	II-12
Grafik II.12 Penerimaan Bea Keluar, 2008 - 2009	II-13
Grafik II.13 Penerimaan SDA Migas, 2008 - 2009	II-15
Grafik II.14 Penerimaan SDA NonMigas, 2008 - 2009	II-16
Grafik II.15 Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, 2008 - 2009	II-17
Grafik II.16 Penerimaan PNBP Lainnya, 2008 - 2009	II-18
Grafik II.17 Pendapatan BLU, 2008 - 2009.....	II-19
Grafik II.18 Penerimaan Hibah, 2008 - 2009	II-19

BAB I

PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR APBN DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN ANGGARAN 2009

1.1 Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global selama tahun 2009 diperkirakan merupakan puncak krisis keuangan global yang ditandai oleh suramnya aktivitas ekonomi, perlemahan pasar modal, ketatnya likuiditas, penurunan volume perdagangan, dan perlambatan ekonomi di berbagai negara. Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan perekonomian domestik karena keterkaitannya pada perekonomian global melalui hubungan perdagangan dan lalu lintas modal. Gejolak yang terjadi pada pasar modal negara maju telah menyebabkan perubahan preferensi investor untuk memindahkan dananya ke instrumen-instrumen investasi pemerintah di negara maju yang dinilai relatif lebih aman. Tekanan tersebut tidak saja menyebabkan gejolak di berbagai pasar modal negara berkembang, tetapi juga mengakibatkan semakin ketatnya likuiditas dana di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Perlambatan laju ekonomi dunia telah menyebabkan volume perdagangan dunia mengalami penurunan pada tingkat yang cukup tajam. Setelah mencapai ekspansi rata-rata 8,1 persen selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2008 pertumbuhan volume perdagangan dunia menurun tajam menjadi hanya 4,1 persen. Indikasi merosotnya volume perdagangan dunia ini antara lain tercermin dari penurunan tajam *Baltic Dry Index* yang merupakan barometer volume perdagangan dunia. Pada bulan April tahun 2009, IMF memprediksikan laju pertumbuhan volume perdagangan anjlok sebesar minus 11,0 persen, suatu penurunan yang sangat besar dibandingkan dengan prediksi-prediksi yang dilakukan sebelumnya. Namun, pada tahun 2010 perdagangan dunia diperkirakan mulai pulih dengan pertumbuhan mencapai 0,6 persen.

Indonesia juga tak bisa terlepas dari imbas krisis ekonomi global. Transmisi dampak krisis ekonomi global ke perekonomian Indonesia melalui dua jalur, yakni jalur finansial (*financial channel*) dan jalur perdagangan (*trade channel*). Melalui jalur finansial, dampak krisis dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung terjadi apabila suatu bank atau institusi keuangan di Indonesia membeli aset-aset yang bermasalah (*toxic assets*) dari perusahaan penerbit yang mengalami kesulitan likuiditas di luar negeri. Selain itu, transmisi dampak krisis melalui jalur finansial langsung juga bisa terjadi melalui penarikan dana oleh investor asing yang mengalami kesulitan likuiditas (*deleveraging*).

Selain melalui kedua hal di atas, dampak langsung jalur finansial juga bisa terjadi melalui aksi pemindahan portofolio investasi risiko tinggi ke risiko rendah (*flight to quality*). Sedangkan, dampak tidak langsung jalur finansial bisa terjadi melalui munculnya hambatan-hambatan terhadap ketersediaan pembiayaan ekonomi. Sementara itu, dampak melalui jalur perdagangan bisa muncul melalui melemahnya kinerja ekspor dan impor yang pada gilirannya berpengaruh pada sektor riil dan berpotensi memunculkan risiko kredit bagi perbankan. Hal ini juga berpotensi memberikan tekanan pada neraca pembayaran Indonesia (NPI).

Memasuki triwulan II tahun 2009, indikator keuangan global menunjukkan tren perbaikan. Pasar keuangan dunia mulai atraktif dan mengalami pembalikan yang signifikan. Naiknya indeks harga saham di berbagai bursa dunia, penguatan nilai tukar mata uang beberapa negara terhadap dolar Amerika Serikat, serta kenaikan harga beberapa komoditi utama dunia memberikan sinyal yang jelas mulai terjadinya perbaikan kondisi ekonomi global. Selain itu, negara-negara di Asia, terutama China dan India, diperkirakan pulih lebih cepat dibanding negara-negara di kawasan lainnya. Indikasi pemulihan di Indonesia ditunjukkan oleh membaiknya IHSG yang telah menembus level 2.000, stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada kisaran Rp10.200 per USD, terkendalinya laju inflasi pada tingkat 3,65 persen (*y-o-y*) atau menurut tahun kalender (Januari-Juni) sebesar 0,21 persen.

Dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, asumsi ekonomi makro ditetapkan sebagai berikut: (i) pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen, (ii) tingkat inflasi 6,0 persen, (iii) rata-rata suku bunga SBI 3 bulan 7,5 persen, (iv) nilai tukar Rp11.000 per USD, (v) harga minyak mentah Indonesia rata-rata US\$45 per barel, dan (vi) *lifting* minyak sebesar 0,960 juta barel per hari. Memperhatikan perkembangan ekonomi dunia dan domestik di atas, dimana perubahan situasi perekonomian global yang drastis dan cepat berubah, besaran asumsi ekonomi makro 2009 yang telah ditetapkan menjadi tidak sesuai lagi. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan APBN khususnya pencapaian target penerimaan pajak dan belanja subsidi. Untuk menyesuaikan asumsi ekonomi makro agar sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia terkini tidak dapat dilakukan seketika karena terkait dengan mekanisme dan siklus APBN yang bersifat *rigid* dan tetap. Terkait dengan hal tersebut, penyesuaian asumsi dilakukan melalui mekanisme perubahan APBN 2009.

1.2 Ekonomi Global

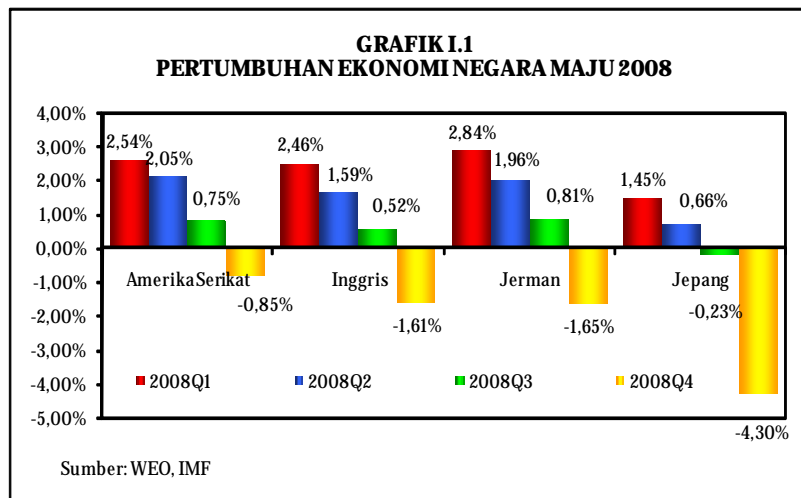
Perlemahan ekonomi global dipicu oleh terjadinya krisis *subprime mortgage* di pasar keuangan Amerika Serikat dan pasar keuangan beberapa negara maju lainnya. Gejolak yang pada awalnya terjadi di pasar keuangan telah meluas hingga turut mengganggu kinerja sektor riil dan pertumbuhan ekonomi global terutama di negara-negara maju. Mengingat besarnya peran perekonomian negara-negara maju di pasar global, gejolak perekonomian negara-negara tersebut akan turut menciptakan tekanan bagi perekonomian negara lain.

Sepanjang tahun 2008, masyarakat dunia telah dihadapkan pada kenyataan bahwa tekanan pada kinerja perekonomian terus meningkat dan lebih berat dari yang diperkirakan sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi di berbagai negara menunjukkan perlambatan yang signifikan.

Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2008 terutama terlihat di negara-negara maju (lihat **Grafik I.1**). Lebih jauh lagi, beberapa di antaranya telah memasuki laju pertumbuhan negatif (*y-o-y*) di kuartal terakhir tahun 2008. Pada kuartal tersebut, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman masing-masing mengalami pertumbuhan minus 0,85 persen, minus 1,61 persen, dan minus 1,65 persen. Bahkan Jepang yang tergolong sebagai negara maju di Asia telah mengalami laju pertumbuhan negatif sejak kuartal ketiga 2008, yaitu sebesar minus 0,23 persen dan kemudian mencapai minus 4,30 persen di kuartal berikutnya.

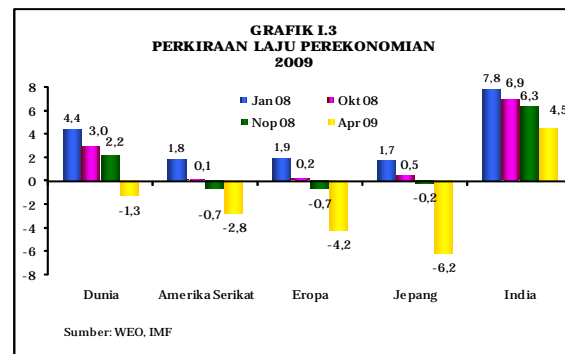
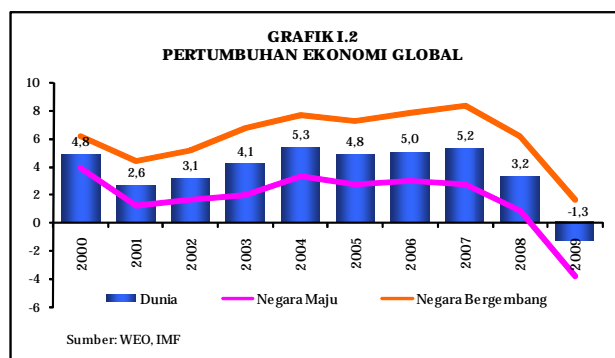
Laju pertumbuhan ekonomi global di tahun 2008 hanya mencapai 3,2 persen (*y-o-y*) lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007, yang masing-masing mencapai 5,0

persen dan 5,2 persen. Bahkan angka tersebut merupakan laju pertumbuhan terendah sejak tahun 2004. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi global tersebut dialami baik negara-negara maju maupun berkembang. Laju pertumbuhan negara-negara maju menurun dari 2,6 persen di tahun 2007 menjadi hanya 0,9 persen di tahun 2008, sementara negara-negara berkembang turun dari 8,3 persen menjadi 6,1 persen.



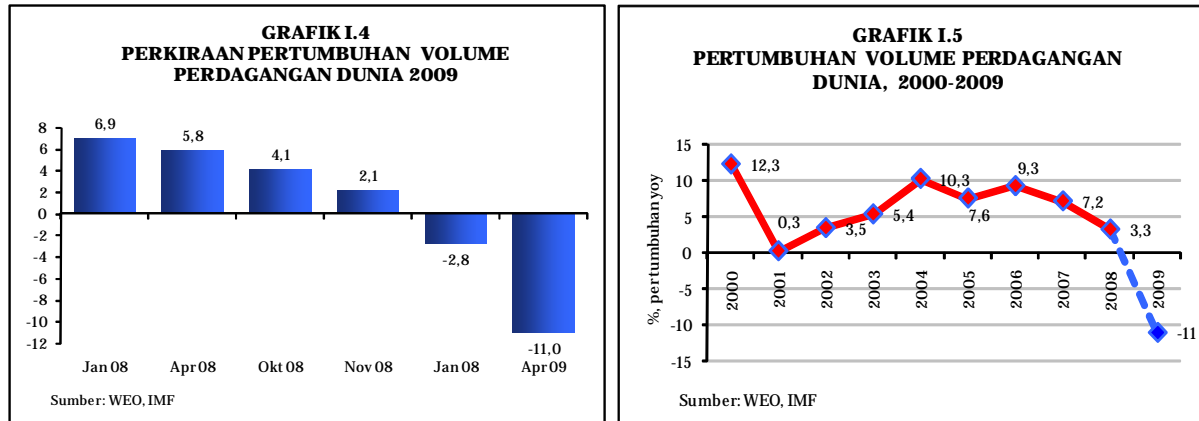
Konsensus umum dalam berbagai diskusi dan analisis mengenai prospek perekonomian juga memperkirakan potensi terjadinya laju pertumbuhan negatif di berbagai negara pada tahun 2009. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan krisis ekonomi global akan mencapai puncaknya pada tahun 2009. IMF telah berkali-kali merevisi publikasi *World Economic Outlook* (WEO)-nya menuju titik yang paling pesimistis. Dalam WEO edisi Januari 2008, IMF memperkirakan laju PDB dunia tahun 2009 masih mencapai 4,4 persen. Namun, terus dikoreksi ke bawah hingga terakhir dalam WEO edisi bulan April 2009 IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2009 mengalami kontraksi atau minus 1,3 persen (lihat **Grafik I.2**).

Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia ke arah yang lebih suram ini disebabkan oleh laju pertumbuhan ekonomi negara-negara maju yang diperkirakan juga mengalami kontraksi di tahun 2009. Amerika Serikat misalnya, pada tahun 2009 diperkirakan berkontraksi minus 2,8 persen. Perekonomian Uni Eropa dan Jepang diperkirakan juga menyusut sebesar minus 4,2 persen dan minus 6,2 persen. Sedangkan PDB China dan India pada tahun 2009 diperkirakan tetap tumbuh sebesar 6,5 persen dan 4,5 persen (lihat **Grafik I.3**).



Seiring dengan perlambatan ekonomi dunia ini, volume perdagangan dunia pada tahun 2009 juga diperkirakan mengalami kemerosotan. Jika pada WEO bulan Januari 2008, IMF memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan dunia tahun 2009 mencapai 6,9 persen,

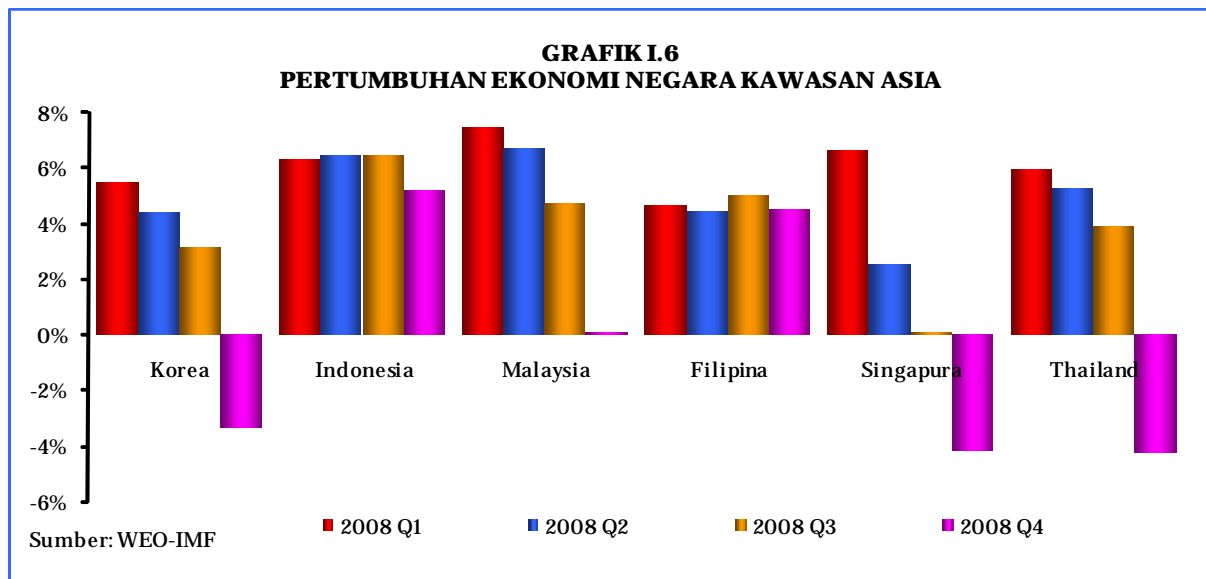
maka dalam WEO edisi April 2009 volume perdagangan dunia diperkirakan akan berkontraksi sebesar minus 11,0 persen. Hal ini merupakan penurunan yang sangat besar jika dibandingkan dengan prediksi-prediksi yang dilakukan sebelumnya (lihat **Grafik I.4** dan **Grafik I.5**).



Di Benua Amerika, selain Amerika Serikat, pertumbuhan negatif pada tahun 2009 juga terlihat antara lain di Kanada minus 2,5 persen, Meksiko minus 3,7 persen, Brasil minus 1,3 persen, dan Argentina minus 1,5 persen. Kawasan Eropa diperkirakan mengalami kontraksi sebesar minus 4,2 persen yang disebabkan oleh pertumbuhan negatif Inggris sebesar minus 4,1 persen, Perancis sebesar minus 3,0 persen, Italia minus 4,4 persen, Jerman minus 5,6 persen, serta Rusia dan Turki masing-masing minus 6,0 persen dan minus 5,1 persen. Di kawasan Timur Tengah dan Afrika, pertumbuhan negatif juga terlihat di beberapa negara penting antara lain di Arab Saudi sebesar minus 0,9 persen dan Afrika Selatan sebesar minus 0,3 persen.

Perkembangan perekonomian di kawasan Asia, khususnya Asia Timur, juga tidak lepas dari tekanan global yang tengah terjadi. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur telah terlihat selama tahun 2008, dan beberapa negara di antaranya telah mengalami pertumbuhan negatif di penghujung tahun tersebut (lihat **Grafik I.6**). Selain Jepang, Korea Selatan juga mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir 2008 sebesar minus 3,4 persen. Sementara China dan India, dua negara berkembang yang telah menjadi mesin pertumbuhan Asia telah mengalami perlambatan laju pertumbuhan di periode yang sama. Perekonomian China tumbuh sebesar 6,8 persen, menurun dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya yang berkisar antara 9–10 persen. Demikian pula India yang sejak tahun 2004 mencapai laju pertumbuhan kuartalan di atas 7,5 persen, namun pada kuartal terakhir 2008 melambat hingga 4,5 persen.

Negara-negara dengan karakteristik peran ekspor dan impor yang relatif besar dalam struktur perekonomian telah mengalami pertumbuhan negatif di kuartal terakhir tahun 2008. Di kawasan ASEAN, laju pertumbuhan negatif di periode tersebut dialami oleh Singapura sebesar minus 4,23 persen dan Thailand sebesar minus 4,25 persen. Malaysia walaupun tidak mengalami pertumbuhan negatif, laju pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 0,08 persen. Dua negara besar ASEAN lainnya, yaitu Indonesia dan Philipina masih mampu tumbuh cukup baik walaupun dengan tren yang menurun. Philipina tumbuh sebesar 4,5 persen dan Indonesia sebesar 5,2 persen. IMF memproyeksikan perekonomian negara-negara



berkembang secara rata-rata masih mampu tumbuh positif sebesar 1,6 persen dalam tahun 2009. Hal tersebut antara lain disebabkan beberapa negara di Asia Timur dan Selatan yang masih tumbuh cukup baik dibandingkan negara-negara lainnya, yaitu China, India, dan Indonesia.

Memasuki triwulan I tahun 2009, melemahnya kegiatan ekonomi semakin nyata yang ditunjukkan oleh menurunnya pertumbuhan ekonomi, seperti Singapura minus 10,0 persen, Jepang minus 8,6 persen, Malaysia minus 3,9 persen, dan Thailand minus 7,1 persen. Negara-negara di kawasan Asia yang mengalami pertumbuhan positif adalah Indonesia 4,4 persen, Vietnam 3,1 persen, China 6,1 persen, dan India 5,0 persen. Perlambatan kegiatan ekonomi ini diperkirakan masih berlangsung hingga awal semester II tahun 2009. Sampai dengan akhir tahun 2009, Jepang dan Korea Selatan, dua negara maju di kawasan Asia Timur diperkirakan mengalami laju pertumbuhan negatif, yaitu masing-masing sebesar minus 6,2 persen dan minus 4,0 persen. Sementara China dan India, walaupun mengalami perlambatan yang cukup signifikan, diperkirakan masih mampu mencapai pertumbuhan positif, yaitu masing-masing sebesar 6,5 persen dan sebesar 4,5 persen.

Di kawasan ASEAN, laju pertumbuhan tahun 2009 diperkirakan hanya 0,0 persen atau dengan kata lain tidak terjadi pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh pertumbuhan negatif yang dialami tiga negara utama di kawasan tersebut, yaitu Malaysia dengan laju pertumbuhan minus 3,5 persen, Thailand minus 3,0 persen, dan Singapura dengan kontraksi pertumbuhan terbesar yaitu minus 10,1 persen. Philipina diperkirakan akan tumbuh 0,0 persen. Sementara Indonesia menunjukkan kinerja relatif baik yang menurut WEO edisi April diperkirakan tumbuh 2,5 persen, kemudian direvisi menjadi 3,0—4,0 persen pada bulan Juni.

1.3 Dampak pada Perekonomian Indonesia

Krisis finansial global berdampak pada melemahnya aktivitas perekonomian dunia dan transaksi perdagangan internasional. Permintaan dunia melambat dan harga-harga komoditas serta volume perdagangan dunia mengalami penurunan. Harga-harga saham di

seluruh dunia berjatuh sehingga bursa saham global mengalami goncangan yang cukup berat. Harga-harga komoditas internasional juga mengalami penurunan yang cukup dalam. Dampak krisis global bagi perekonomian Indonesia mulai terlihat pada triwulan IV 2008 yang ditunjukkan oleh menurunnya pertumbuhan ekonomi terkait dengan menurunnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa sebagai akibat melemahnya harga minyak, turunnya harga-harga serta menurunnya permintaan komoditas ekspor nasional. Di pasar keuangan terjadi koreksi cukup tajam pada harga-harga saham, terdepresiasi rupiah, dan meningkatnya imbal hasil (*yield*) SUN di pasar obligasi.

Di sisi fiskal, dampak krisis global menyebabkan terjadinya perubahan asumsi dasar yang berdampak pada penyesuaian postur APBN 2009. Penerimaan perpajakan dan PNBPN diperkirakan turun dari yang ditetapkan semula dalam APBN 2009 selain karena menurunnya pertumbuhan ekonomi, juga karena adanya kebijakan fiskal dalam bentuk pemotongan tarif pajak penghasilan pasal 21. Selain itu, meningkatnya realisasi harga minyak dibandingkan dengan asumsi dalam tahun 2009 di satu sisi akan meningkatkan pajak migas, di sisi lainnya akan meningkatkan belanja untuk subsidi minyak. Dampak krisis lainnya adalah berkurangnya kemampuan pendanaan pemerintah untuk peningkatan pembangunan infrastruktur karena sebagian dananya dialokasikan untuk mengatasi dampak krisis dalam bentuk stimulus fiskal. Untuk mengatasi dampak krisis, defisit APBN-P 2009 diperkirakan juga meningkat jika dibandingkan dengan APBN 2009 yang sebagian dibiayai dari penambahan pinjaman luar negeri pemerintah.

Meskipun masih sulit diprediksi, namun krisis perekonomian global diharapkan mereda pada akhir tahun 2009 dengan semakin stabilnya kondisi pasar finansial global, baik pasar modal maupun pasar keuangan pada umumnya sebagai hasil dari berbagai upaya yang terkoordinasi dari negara-negara di seluruh dunia untuk menanggulangi krisis global secara lebih efektif. Kestabilan pasar keuangan tersebut pada gilirannya akan merambah ke sektor riil sehingga dapat menggairahkan kegiatan ekonomi riil dalam bentuk meningkatnya permintaan dunia dan pulihnya transaksi perdagangan internasional.

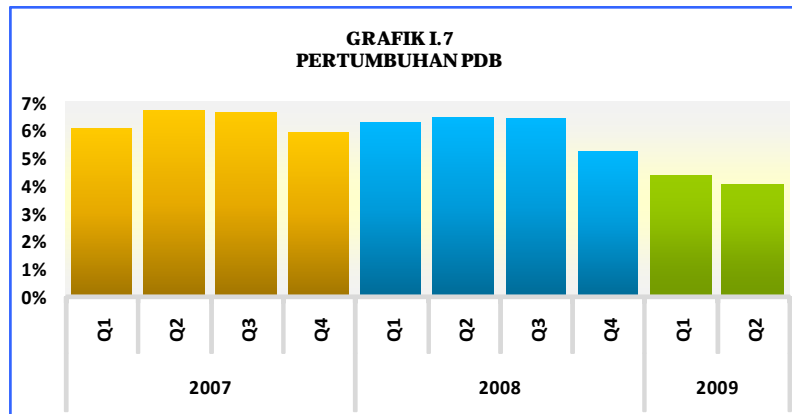
1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008 mengalami perlambatan menjadi 6,1 persen. Dari sisi penggunaan, konsumsi rumah tangga merupakan sumber pertumbuhan tertinggi. Selama tahun 2008, konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 5,3 persen. Pertumbuhan ini disumbang oleh konsumsi makanan sebesar 4,3 persen dan konsumsi bukan makanan sebesar 6,2 persen. Meskipun daya beli masyarakat melemah akibat kenaikan harga BBM pada Mei 2008 dan dampak dari krisis global, namun kebijakan Pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) mampu menahan penurunan daya beli masyarakat tersebut. Laju pertumbuhan konsumsi masyarakat masih cukup tinggi sebagaimana ditunjukkan oleh indikator-indikator konsumsi. Pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri tumbuh sebesar 14,2 persen. Sementara itu, pertumbuhan penjualan motor dan mobil masing-masing mencapai 32,6 persen dan 39,2 persen. Indikator konsumsi dari sisi moneter, seperti kredit konsumsi tumbuh sebesar 30,0 persen.

Pengeluaran konsumsi Pemerintah selama tahun 2008 tumbuh sebesar 10,4 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan belanja barang yang meningkat sebesar 22,6 persen sedangkan belanja pegawai justru melambat menjadi 4,5 persen. Meskipun pertumbuhannya

relatif tinggi, konsumsi Pemerintah menjadi penyumbang terkecil pada pertumbuhan PDB tahun 2008.

Investasi merupakan sumber ketiga pertumbuhan PDB dari sisi penggunaan. Selama tahun 2008 investasi mencatat pertumbuhan sebesar 11,7 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh tingginya investasi jenis alat angkut dari luar negeri sebesar 41,4 persen. Sementara itu, kontraksi justru terjadi pada investasi jenis mesin dan perlengkapan domestik sebesar



minus 0,2 persen. Kinerja investasi masih menunjukkan kecenderungan meningkat yang cukup kuat sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa indikator, seperti naiknya nilai impor barang modal, penjualan semen dalam negeri, realisasi PMA, serta kredit investasi dan kredit modal kerja.

Selama tahun 2008, pertumbuhan ekspor mencapai 9,5 persen yang didukung oleh tumbuhnya ekspor barang sebesar 8,7 persen dan ekspor jasa sebesar 17,5 persen. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang ini terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan komoditas, seperti *crude palm oil* (CPO), minyak mentah, dan barang pertambangan dalam semester pertama tahun 2008.

Impor yang merupakan faktor pengurang pada PDB, tumbuh sebesar 10,0 persen pada tahun 2008. Pertumbuhan impor didorong oleh pertumbuhan impor barang sebesar 10,7 persen dan impor jasa 7,6 persen. Pertumbuhan impor barang ini sejalan dengan naiknya nilai impor migas sebesar 37,5 persen dan impor nonmigas sebesar 48,8 persen.

Pada triwulan I 2009, pertumbuhan PDB mencapai 4,4 persen. Laju pertumbuhan tertinggi bersumber dari konsumsi Pemerintah sebesar 19,2 persen. Hal ini terutama disebabkan adanya kenaikan pada belanja pegawai (kenaikan gaji PNS/TNI/Polri dan pensiunan) dan belanja barang untuk persiapan pelaksanaan Pemilu 2009. Sementara itu, konsumsi masyarakat tumbuh sebesar 6,0 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008 yang mencapai 5,7 persen. Kenaikan pengeluaran konsumsi masyarakat tersebut didorong oleh pengeluaran masyarakat untuk keperluan Pemilu (makanan/minuman dan atribut partai untuk kampanye antara lain spanduk, kaos, dan lain-lain) dan pencairan bantuan langsung tunai (BLT), serta bantuan sosial lainnya (BOS, Jamkesmas, PNPM, dan raskin).

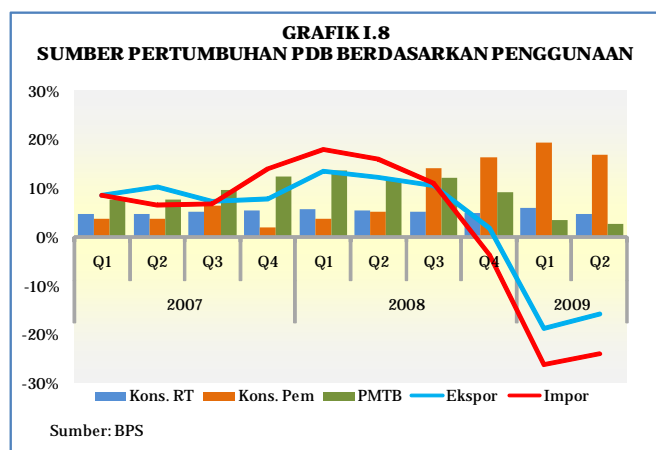
Laju pertumbuhan investasi triwulan I tahun 2009 mencapai 3,4 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,7 persen. Dari sisi perdagangan internasional, tekanan krisis global terhadap produk domestik mengakibatkan kontraksi yang tajam pada kinerja ekspor-impor Indonesia. Turunnya harga minyak dunia dan volume permintaan dunia menjadi faktor penyebab terjadinya pertumbuhan ekspor dan impor yang negatif. Ekspor barang dan jasa tumbuh sebesar minus 18,7 persen, sedangkan impor minus 26,0 persen.

Selanjutnya, semester I 2009, pertumbuhan PDB mencapai 4,2 persen. Pertumbuhan tersebut bersumber dari konsumsi Pemerintah, konsumsi masyarakat, dan investasi, masing-masing diperkirakan sebesar 18,0 persen, 5,4 persen, dan 3,0 persen. Konsumsi Pemerintah didukung oleh masih berlangsungnya belanja barang untuk persiapan pemilihan Presiden, sedangkan kenaikan konsumsi masyarakat didorong oleh program pemerintah seperti BOS dan PNPB serta pengeluaran konsumsi masyarakat dalam kaitannya dengan Pemilu Presiden. Selanjutnya investasi masih lebih rendah bila dibandingkan dengan periode yang sama dalam tahun 2008 yang mencapai sebesar 12,9 persen. Meskipun tekanan global semakin berkurang, namun dampaknya masih terasa meskipun semakin menurun, akibatnya ekspor dan impor barang dan jasa dalam semester I tahun 2009 tumbuh masing-masing sebesar minus 17,2 persen dan minus 24,9 persen.

Perekonomian Indonesia diperkirakan mulai pulih pada akhir tahun 2009. Dengan memperhatikan perkembangan dalam semester pertama dan perkiraan ke depan laju pertumbuhan PDB tahun 2009 diperkirakan mencapai 4,3 persen, lebih rendah dari asumsi yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar 4,5 persen. Perkiraan realisasi tersebut didukung oleh sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, yaitu konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh 5,2 persen, konsumsi Pemerintah 15,2 persen, investasi 3,6 persen, serta ekspor dan impor tumbuh masing-masing sebesar minus 14,5 persen dan minus 20,6 persen.

Konsumsi masyarakat diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan perkiraan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, yaitu dari 4,0 persen menjadi 5,2 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya daya beli masyarakat terkait dengan rendahnya laju inflasi. Selain itu, pencairan berbagai bantuan sosial Pemerintah dan penyelenggaraan Pemilu juga mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sementara itu, konsumsi Pemerintah juga diperkirakan meningkat cukup tinggi menjadi 15,2 persen, lebih tinggi bila dibandingkan Dokumen Stimulus Fiskal 2009 yang sebesar 10,0 persen. Lebih tingginya pengeluaran Pemerintah tersebut antara lain didorong oleh bertambahnya belanja stimulus fiskal untuk infrastruktur.

Investasi dalam tahun 2009 diperkirakan tumbuh sebesar 3,6 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 11,7 persen. Relatif rendahnya perkiraan ini ditunjukkan oleh penurunan beberapa indikator, yaitu realisasi PMDN, impor barang modal, dan konsumsi semen. Kredit perbankan juga diperkirakan menunjukkan perlambatan dalam mendukung aktivitas di dunia usaha. Namun bila dibandingkan dengan target dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, perkiraan realisasi dalam tahun 2009 masih lebih tinggi. Hal ini disebabkan pemulihan kegiatan ekonomi diperkirakan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.



Dari sisi perdagangan, laju pertumbuhan ekspor barang dan jasa dalam APBN-P 2009 diperkirakan mengalami penurunan tajam, yaitu dari 0,0 persen dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 menjadi minus 13,2 persen. Penurunan permintaan dari negara China, Jepang, dan Amerika Serikat sebagai negara utama tujuan ekspor, relatif cukup besar dalam memicu penurunan pertumbuhan ekspor. Sejalan dengan menurunnya kinerja ekspor dan kegiatan ekonomi, pertumbuhan impor dalam APBN-P 2009 diperkirakan juga mengalami penurunan menjadi minus 14,5 persen atau lebih tinggi dari perkiraan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 yang sebesar minus 20,6 persen.

Pertumbuhan Sektoral

Dari sisi penawaran, kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2008 ditandai dengan positifnya pertumbuhan seluruh sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor-sektor *nontradable*, seperti sektor pengangkutan dan komunikasi 16,7 persen, sektor listrik, gas dan air bersih 10,9 persen, sektor keuangan 8,2 persen, dan sektor bangunan 7,3 persen. Sementara itu, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian yang merupakan penopang perekonomian tumbuh masing-masing sebesar 3,7 persen dan 4,8 persen.

Dalam tahun 2008, distribusi PDB menurut sektor ekonomi atau lapangan usaha atas dasar harga berlaku masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai peranan sebesar 56,3 persen. Sektor industri pengolahan memberi kontribusi sebesar 27,9 persen, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai peranan masing-masing sebesar 14,4 persen dan 14,0 persen. Sedangkan distribusi PDB tahun 2009 diperkirakan masih didominasi oleh 3 sektor utama seperti dalam tahun 2008, yaitu sektor industri pengolahan sebesar 27,4 persen, sektor pertanian sebesar 14,7 persen, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,1 persen (lihat **Tabel I.1**).

TABEL I.1
DISTRIBUSI PDB ATAS HARGA BERLAKU

Sektor	2007	2008	2009*
Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan	13,7%	14,4%	14,7%
Pertambangan dan penggalian	11,2%	11,0%	10,9%
Industri Pengolahan	27,1%	27,9%	27,4%
Listrik, Gas, & Air Bersih	0,9%	0,8%	0,8%
Konstruksi	7,7%	8,5%	8,4%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,9%	14,0%	14,1%
Pengangkutan & Komunikasi	6,7%	6,3%	6,5%
Keuangan, real estate dan jasa perusahaan	7,7%	7,4%	7,4%
Jasa-jasa	10,1%	9,8%	9,7%

Sumber : BPS

* Perkiraan

Menurut kontribusinya terhadap pertumbuhan, sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati urutan pertama, yaitu sebesar 1,3 persen, diikuti sektor pengangkutan dan komunikasi yang sebesar 1,2 persen. Sedangkan sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 1,0 persen, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan sebesar 0,8 persen, dan sektor pertanian sebesar 0,7 persen.

Pada semester I tahun 2009, pertumbuhan sektoral tertinggi dicapai oleh sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 17,3 persen. Namun pertumbuhan sektor tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 17,8 persen.

Melambatnya pertumbuhan sektor ini dikarenakan menurunnya pertumbuhan subsektor pengangkutan terutama angkutan laut sebagai akibat menurunnya angkutan barang. Pertumbuhan terendah terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh 0,2 persen. Dalam periode tersebut, sektor pertanian tumbuh sebesar 3,7 persen, melambat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Melambatnya pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan subsektor perkebunan dan subsektor bahan makanan. Peningkatan signifikan terjadi pada subsektor tanaman bahan makanan yang disebabkan oleh pola panen raya tanaman padi yang mencapai puncaknya pada bulan Maret.

Sektor yang dominan dalam perekonomian nasional, yaitu sektor industri manufaktur tumbuh melambat sebesar 1,5 persen, seiring dengan menurunnya kegiatan industri ekspor sebagai akibat dari melemahnya permintaan negara-negara maju. Sektor listrik, gas, dan air bersih mengalami peningkatan, yaitu dari 12,1 persen pada semester I tahun 2008 menjadi sebesar 13,4 persen pada periode yang sama tahun 2009.

Hingga akhir tahun 2009, beberapa sektor diperkirakan masih mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan perkiraan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Sektor-sektor yang diperkirakan mengalami penurunan pertumbuhan, antara lain sektor industri turun dari 2,5 persen menjadi 1,9 persen, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran turun dari 5,8 persen menjadi 0,5 persen. Sedangkan beberapa sektor lainnya diperkirakan mengalami peningkatan, seperti sektor pertanian naik dari 2,8 persen menjadi 3,3 persen, sektor listrik, gas dan air bersih naik dari 7,0 persen menjadi 14,7 persen, sektor bangunan naik dari 6,0 persen menjadi 6,4 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi naik dari 12,0 persen menjadi 17,1 persen, dan sektor keuangan naik dari 5,0 persen menjadi 5,6 persen. Laju pertumbuhan PDB tahun 2008—2009 dapat dilihat dalam **Tabel I.2**.

TABEL I.2
LAJU PERTUMBUHAN PDB, 2008-2009
(PERSEN, Y-O-Y)

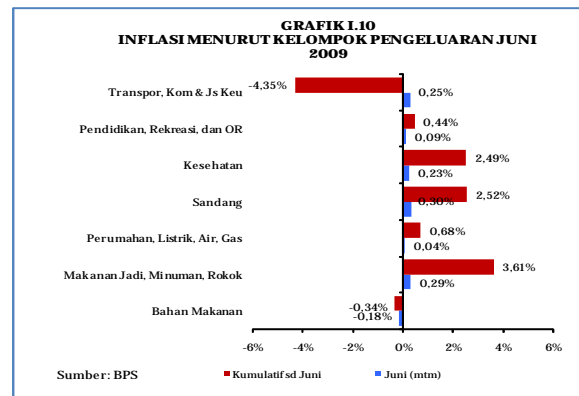
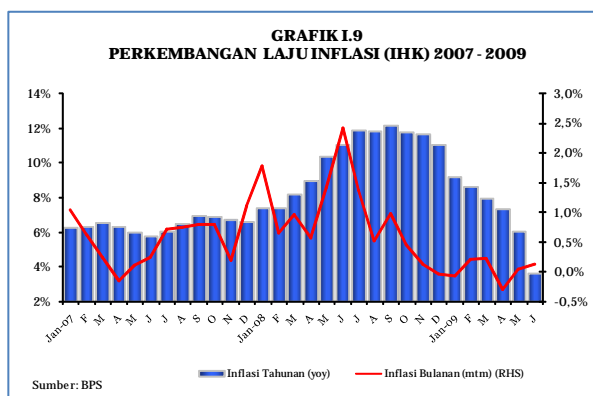
Uraian	2008 (Real.)	2009		
		APBN	Dok. Stimulus	APBN-P
Produk Domestik Bruto	6,1	6,0	4,5	4,3
Menurut Penggunaan				
Pengeluaran Konsumsi	5,9	5,6	5,4	6,4
Konsumsi Masyarakat	5,3	5,2	4,0	5,2
Konsumsi Pemerintah	10,4	8,5	10,0	15,2
Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,7	7,5	4,0	3,6
Ekspor Barang dan Jasa	9,5	7,8	0,0	-14,5
Impor Barang dan Jasa	10,0	8,1	-2,2	-20,6
Menurut Lapangan Usaha				
Pertanian	4,8	4,9	2,8	3,3
Pertambangan dan Penggalian	0,5	0,6	1,1	2,4
Industri Pengolahan	3,7	3,8	2,5	1,9
Listrik, gas, air bersih	10,9	9,6	7,0	14,7
Bangunan	7,3	6,8	6,0	6,4
Perdagangan, hotel, dan restoran	7,2	7,8	5,8	0,5
Pengangkutan dan komunikasi	16,7	15,3	12,0	17,1
Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	8,2	5,7	5,0	5,6
Jasa-jasa	6,5	6,7	5,2	7,4

Sumber: BPS dan Depkeu

1.3.2 Inflasi

Tahun 2009 laju inflasi menunjukkan kecenderungan yang menurun. Tren penurunan tersebut telah berlangsung sejak triwulan terakhir tahun 2008. Dalam enam bulan pertama tahun 2009 telah terjadi dua kali deflasi, yaitu pada bulan Januari sebesar 0,07 persen dan bulan April sebesar 0,31 persen, sedangkan pada empat bulan lainnya mengalami inflasi meskipun pada level yang cukup rendah. Pada bulan Februari, Maret, Mei, dan Juni 2009 laju inflasi tercatat masing-masing sebesar 0,21 persen, 0,22 persen, 0,04 persen, dan 0,11 persen. Laju inflasi pada bulan-bulan tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dan berada jauh di bawah pola historisnya. Perkembangan tersebut menyebabkan laju inflasi kumulatif ($y-t-d$) dan inflasi tahunan ($y-o-y$) pada bulan Juni 2009 masing-masing sebesar 0,21 persen ($y-t-d$) dan 3,65 persen ($y-o-y$). Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008 yang masing-masing mencapai 7,37 persen ($y-t-d$) dan 11,03 persen ($y-o-y$), laju inflasi tersebut jauh lebih rendah.

Relatif terkendalinya laju inflasi selama Januari-Juni 2009 terutama didorong oleh penurunan harga BBM bersubsidi yang dilakukan pada akhir tahun 2008 serta awal 2009. Di samping itu, penurunan harga-harga komoditas di pasar internasional yang mulai berlangsung sejak triwulan IV tahun 2008, menurunnya ekspektasi inflasi, relatif stabilnya pasokan kebutuhan pokok, dan penyelenggaraan Pemilu Legislatif yang lancar, turut mempengaruhi rendahnya laju inflasi pada periode tersebut.



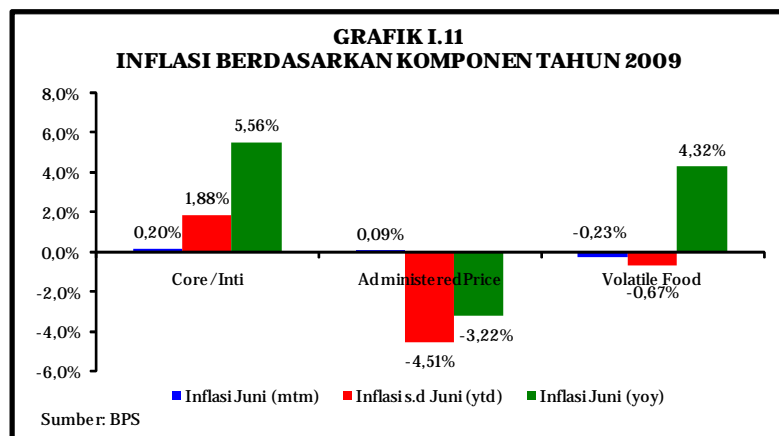
Berdasarkan kelompok pengeluaran, secara kumulatif sampai dengan Juni 2009 inflasi ($y-t-d$) yang terjadi pada kelompok makanan bahan jadi, minuman, rokok, dan tembakau mencapai 3,61 persen, kelompok kesehatan 2,49 persen, kelompok sandang 2,52 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan gas 0,68 persen, serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,44 persen. Sebaliknya, kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi dan komunikasi dan jasa keuangan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,34 persen ($y-t-d$) dan 4,35 persen ($y-t-d$). Khusus pada bulan Juni 2009, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah bahan makanan sebesar 0,18 persen ($m-t-m$). Deflasi pada kelompok bahan makanan antara lain disebabkan oleh penurunan harga ikan segar, cabe merah, minyak goreng, bayam, tahu, tempe, dan bawang merah.

Berdasarkan komponen, inflasi *volatile food* (harga makanan bergejolak) sampai Juni 2009 menunjukkan tren menurun. Deflasi komponen *volatile food* pada bulan Juni 2009 mencapai sebesar 0,23 persen ($m-t-m$), tidak sedalam dengan deflasi pada dua bulan sebelumnya, yaitu 1,53 persen dan 0,27 persen masing-masing pada April dan Mei 2009. Terjadinya deflasi

pada tiga bulan terakhir menyebabkan inflasi ($y-t-d$) komponen ini sampai Juni 2009 menjadi minus 0,67 persen ($y-t-d$), jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,67 persen ($y-t-d$). Penurunan ini terkait menurunnya tekanan harga dari komoditas pangan internasional yang diiringi dengan pelaksanaan panen raya di beberapa daerah pada bulan Maret dan April 2009. Selain itu, kebijakan Pemerintah yang berupaya untuk menjaga pasokan dan distribusi bahan pangan juga mampu mengurangi tekanan inflasi *volatile foods*. Terkendalnya inflasi komponen ini tercermin dari relatif stabilnya harga beberapa komoditas di pasar domestik seperti beras, daging ayam broiler dan ras, telur ayam ras, susu kental manis, tepung terigu, cabe merah keriting, kedele, bawang merah, dan daging sapi. Namun, harga minyak goreng dan gula pasir cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan harga minyak goreng dalam negeri sejalan dengan mulai terkoreksinya harga CPO di pasar internasional.

Kebijakan Pemerintah yang menurunkan harga BBM bersubsidi (premium dan solar) menyebabkan harga komponen barang-barang strategis yang dikendalikan Pemerintah (*administered prices*) mengalami deflasi pada dua bulan pertama tahun 2009. Namun, pada tiga bulan terakhir dampak dari kebijakan tersebut semakin berkurang. Pada bulan Juni 2009 inflasi komponen *administered prices* tercatat sebesar 0,09 persen ($m-t-m$). Berdasarkan perkembangan tersebut, inflasi tahun kalender ($y-t-d$) komponen ini sampai akhir Juni 2009 tercatat sebesar minus 4,51 persen ($y-t-d$), menurun cukup tajam jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 6,51 persen ($y-t-d$). Seiring dengan itu, inflasi tahunan pada Juni 2009 tercatat sebesar minus 3,22 persen ($y-o-y$), jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi pada Juni 2008 sebesar 8,33 persen ($y-o-y$).

Sejalan dengan penurunan inflasi pada komponen *volatile foods* dan *administered prices*, inflasi inti (*core inflation*) juga menunjukkan penurunan yang tajam. Penurunan inflasi inti ini antara lain didukung oleh melebarnya *output gap* ditengah permintaan domestik yang lemah dan cukup kondusifnya kondisi eksternal sejalan dengan penguatan nilai tukar rupiah. Di samping itu, menurunnya ekspektasi inflasi juga memberikan dampak yang positif terhadap inflasi inti. Pada bulan Juni 2009, laju inflasi inti tercatat sebesar 0,20 persen ($m-t-m$) dan laju inflasi tahun kalender sebesar 1,88 persen ($y-t-d$). Sementara itu, inflasi tahunannya (Juni 2009 terhadap Juni 2008) sebesar 5,56 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008 sebesar 8,69 persen (lihat **Grafik I.11**).



Laju inflasi dalam sisa tahun 2009 diperkirakan relatif terkendali. Perkiraan ini antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor positif berupa stabilnya nilai tukar rupiah, terjaganya pasokan dan kelancaran arus distribusi barang, serta minimalnya kebijakan *administered*

prices. Namun, tekanan terhadap laju inflasi tetap harus diwaspadai terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor musiman, seperti kenaikan uang sekolah terkait dengan dimulainya tahun ajaran baru, gaji ke-13 bagi PNS/TNI/Polri dan pensiunan, serta meningkatnya kebutuhan pokok masyarakat sehubungan dengan adanya hari raya keagamaan (Idul Fitri, dan Natal), dan Tahun Baru. Selain itu, kecenderungan naiknya harga komoditas internasional patut terus dicermati karena dapat memberikan tekanan baru terhadap inflasi. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas dan realisasi laju inflasi sampai dengan Juni 2009, asumsi laju inflasi untuk tahun 2009 ditetapkan sebesar 4,5 persen, lebih rendah dari asumsi dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar 6,0 persen.

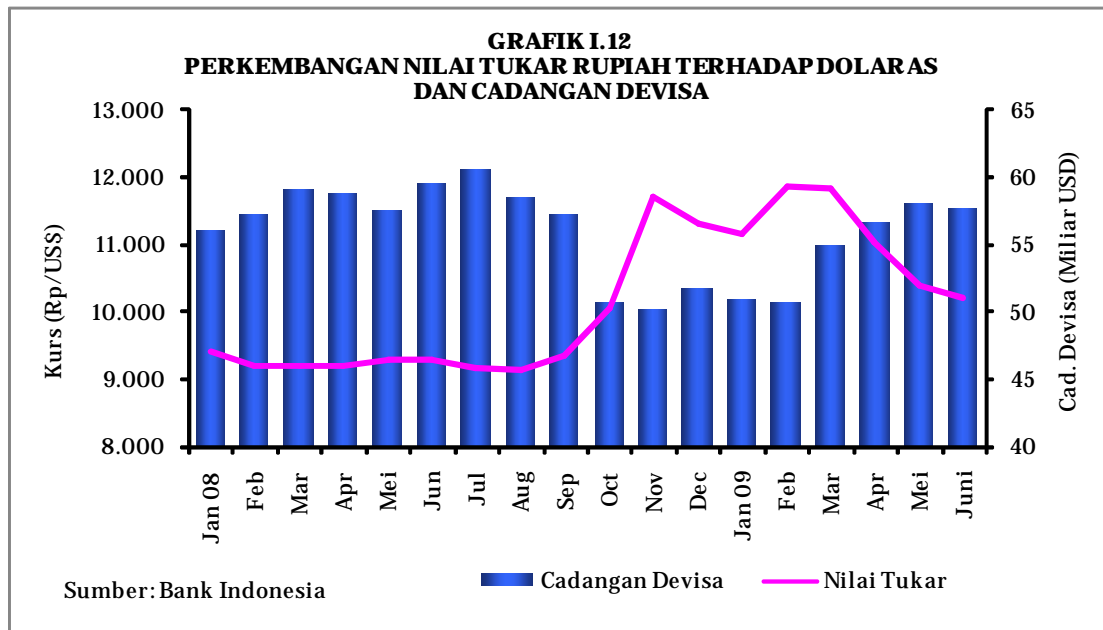
1.3.3 Nilai Tukar Rupiah

Setelah mengalami koreksi yang cukup dalam pada triwulan IV tahun 2008, nilai tukar rupiah sampai dengan bulan Juni 2009 berfluktuasi dengan kecenderungan menguat. Pada bulan Januari 2009, rata-rata nilai tukar rupiah berada pada level Rp11.167 per USD, menguat 1,39 persen jika dibandingkan dengan rata-rata akhir tahun 2008. Namun, memasuki bulan Februari 2009 rata-rata nilai tukar rupiah terdepresiasi hingga 6,14 persen menjadi Rp11.853 per USD. Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut lebih disebabkan oleh meningkatnya arus modal keluar portofolio asing terkait dengan meningkatnya kewajiban pembayaran utang luar negeri swasta. Perkembangan nilai tukar rupiah relatif stabil pada bulan Maret 2009 dengan rata-rata sebesar Rp11.850. Memasuki bulan April 2009, rata-rata nilai tukar rupiah mulai mengalami penguatan hingga Rp11.025, atau terapresiasi 6,96 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penguatan ini terus berlangsung sampai bulan Juni 2009 yang berada pada level Rp10.207 per USD. Bila dibandingkan dengan Desember 2008, rata-rata nilai tukar pada Juni 2009 tersebut menguat sebesar 9,9 persen.

Kecenderungan penguatan nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor eksternal tersebut berupa masuknya kembali investasi asing di pasar domestik sejalan dengan menguatnya optimisme terhadap segera pulihnya perekonomian global sebagai hasil dari beberapa kebijakan penanganan krisis, diantaranya kemajuan penanganan krisis oleh negara G-20 memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan nilai tukar. Selain itu, meningkatnya cadangan devisa Indonesia dan adanya dukungan kerjasama antar bank sentral melalui *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) juga memperkuat nilai tukar rupiah. Cadangan devisa sampai dengan bulan Juni tahun 2009 berjumlah US\$57,6 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisinya pada akhir tahun 2008 sebesar US\$51,6 miliar. Sementara itu, dari dalam negeri, terjaganya kondisi sosial politik di tengah pelaksanaan Pemilu legislatif telah memberikan sentimen yang positif terhadap perkembangan nilai tukar rupiah.

Pemerintah bersama Bank Indonesia sebagai otoritas moneter terus berkoordinasi melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Upaya ini ditempuh melalui kebijakan moneter yang berhati-hati dan konsisten untuk mencegah besarnya volatilitas dan depresiasi rupiah yang berlebihan. Kebijakan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan fundamental perekonomian. Selain itu, penguatan strategi komunikasi dan monitoring lalu lintas devisa terus dilakukan untuk menopang pengelolaan kebijakan tersebut.

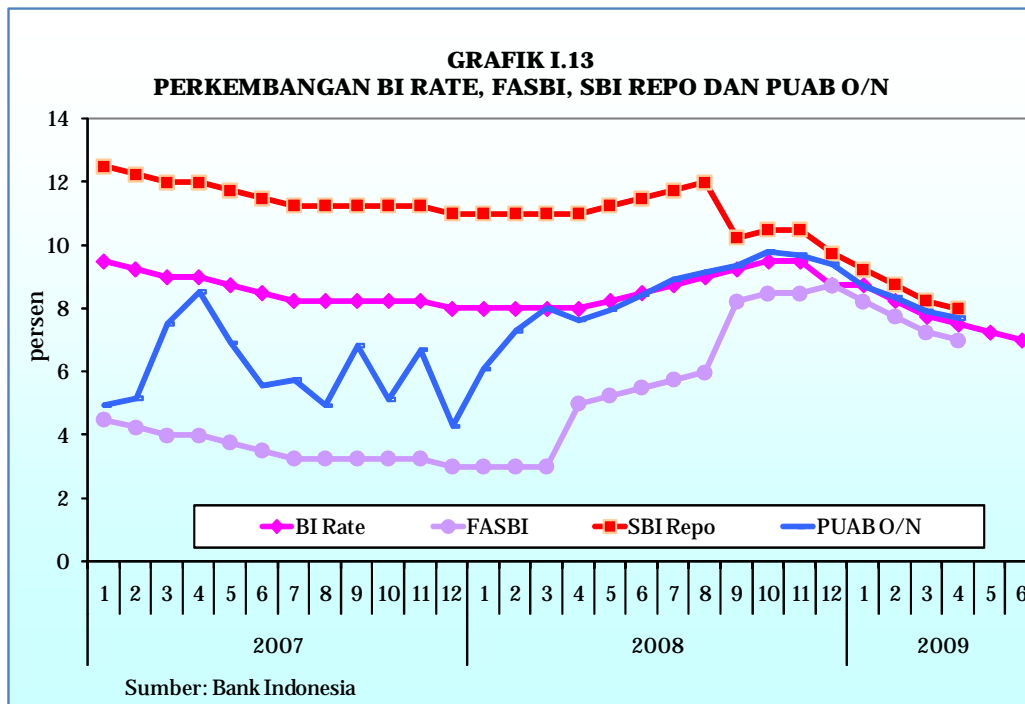
Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah dan memperhatikan perkembangan realisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sampai Juni 2009, serta kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dan otoritas moneter dalam menjaga nilai tukar rupiah, asumsi rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp10.500 per USD. Perkiraan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang digunakan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp11.000.



1.3.4 SBI 3 bulan

Dalam menghadapi kondisi kelangkaan likuiditas di pasar uang dan melemahnya perekonomian domestik, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan moneter yang cenderung ekspansif. Kebijakan moneter bersifat ekspansif tercermin pada penurunan BI Rate. Langkah penurunan BI Rate ini diambil sejalan dengan menurunnya arah perkiraan inflasi ke depan sebagai dampak dari menurunnya ekspektasi inflasi masyarakat. Penentuan kebijakan moneter tersebut juga diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan kestabilan sistem keuangan. Dari bulan Januari 2009 sampai bulan Maret 2009, BI Rate masing-masing turun sebesar 50 *bps*. Penurunan BI Rate berlanjut dengan penurunan yang lebih rendah pada bulan berikutnya. Pada bulan April 2009 sampai Juni 2009, BI Rate masing-masing turun sebesar 25 *bps*. Secara keseluruhan bila dihitung sejak terjadinya penurunan BI Rate pada bulan Desember 2008, BI Rate telah mengalami penurunan sebesar 225 *bps*. Dengan penurunan tersebut, BI Rate pada bulan Juni 2009 sebesar 7,0 persen.

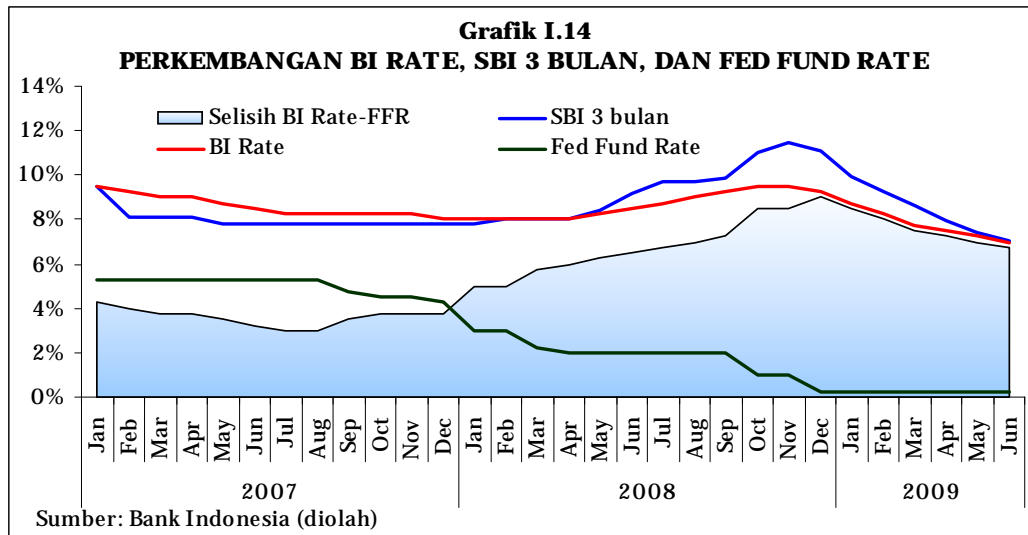
Penurunan BI Rate diikuti oleh penurunan suku bunga instrumen moneter lainnya yang pergerakannya dikaitkan dengan perubahan BI Rate, seperti suku bunga fasilitas Bank Indonesia *overnight* (FASBI O/N). Pada bulan Desember 2008 FASBI O/N tercatat sebesar 8,8 persen, sementara pada bulan Juni tahun 2009 mengalami penurunan menjadi sebesar 6,5 persen. Penurunan tersebut terjadi pula pada SBI Repo dan pasar uang antar bank (PUAB) O/N (lihat **Grafik I.13**)



Penurunan *BI Rate* tersebut diikuti oleh penurunan suku bunga deposito dan kredit, walaupun penurunannya tidak sebesar penurunan suku bunga *BI Rate*. Suku bunga deposito 1 bulan mengalami penurunan dari 10,75 persen pada bulan Desember 2008 menjadi 8,52 persen pada bulan Juni 2009. Posisi dana pihak ketiga (DPK) bulan Juni 2009 meningkat meski dengan pertumbuhan yang masih melambat. Posisi DPK bulan Juni 2009 meningkat sebesar Rp40,7 triliun dibandingkan dengan bulan sebelumnya menjadi Rp1.824,3 triliun. Adapun suku bunga kredit modal kerja dan kredit investasi masing-masing mengalami penurunan, pada bulan Juni 2009 tercatat pada level 14,52 persen dan 13,78 persen jika dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2008 yang masing-masing sebesar 15,22 persen dan 14,40 persen. Sementara itu, suku bunga kredit konsumsi mengalami kenaikan dari 16,40 persen di bulan Desember 2008 menjadi 16,63 persen di bulan Juni 2009.

Kecenderungan penurunan *BI Rate* diikuti pula oleh penurunan suku bunga SBI 3 bulan. Tercatat di bulan Desember 2008 SBI 3 bulan sebesar 11,1 persen atau mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar 11,5 persen. Penurunan suku bunga SBI 3 bulan tersebut terus berlanjut sampai pertengahan tahun 2009. Pada bulan Februari 2009, SBI 3 bulan sebesar 9,3 persen turun dibandingkan bulan Januari 2009 yang mencapai 10,4 persen. Pada bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Juni 2009 SBI 3 bulan kembali turun menjadi masing-masing sebesar 8,7 persen, 8,3 persen, 7,5 persen, dan 7,1 persen. Dengan penurunan tersebut, rata-rata SBI 3 bulan periode Januari–Juni 2009 sebesar 8,5 persen. Dengan turunnya suku bunga SBI 3 bulan, maka selisih dengan suku bunga *BI Rate* semakin kecil. Bila di bulan Desember 2008 selisih SBI 3 bulan dengan suku bunga *BI Rate* sebesar 1,94 persen, maka selisih antara *BI Rate* dengan SBI 3 bulan pada bulan Juni 2009 menjadi 0,08 persen. Penurunan *BI Rate* tersebut juga menyebabkan selisih dengan suku bunga di beberapa negara seperti dengan Eropa, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat semakin mengecil. Hal ini antara lain dapat dilihat dari selisih *BI Rate* dengan *Fed Fund Rate* (FFR). Bila dibandingkan

dengan posisi bulan Desember 2008, maka selisih BI *Rate* dengan FFR pada bulan Juni 2009 turun dari 9,0 persen menjadi 6,8 persen (lihat **Grafik I.14**).

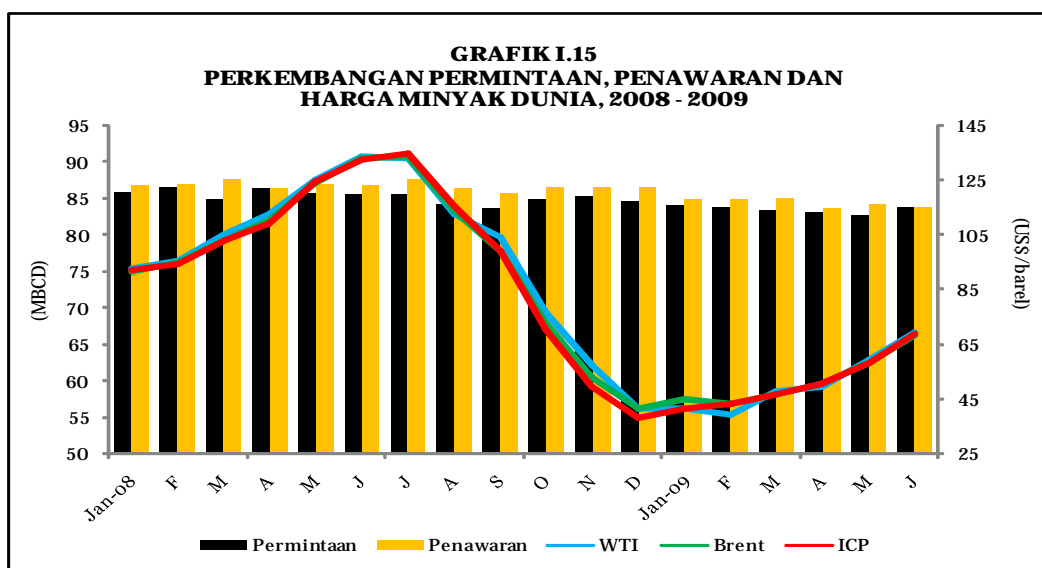


Rata-rata SBI 3 bulan di tahun 2009 diperkirakan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata SBI 3 bulan tahun sebelumnya. Hal ini seiring dengan kecenderungan penurunan inflasi yang diperkirakan masih terus berlanjut. Dari sisi eksternal, terjadinya kecenderungan penurunan inflasi didukung oleh masih rendahnya inflasi di negara-negara mitra dagang, sementara dari sisi domestik didukung oleh relatif masih lemahnya permintaan domestik. Selain itu, perkiraan penurunan SBI 3 bulan tahun 2009 juga dipengaruhi oleh terjadinya kecenderungan penurunan suku bunga internasional dan melemahnya permintaan global akibat krisis di pasar keuangan Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya. Kecenderungan mulai meningkatnya harga-harga komoditas internasional perlu dicermati karena dapat mengurangi laju penurunan inflasi dan dapat menghambat penurunan lebih lanjut tingkat suku bunga. Dengan memperhatikan kondisi tren penurunan inflasi, penurunan suku bunga internasional ditambah dengan relatif stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, maka rata-rata suku bunga SBI 3 bulan dalam APBN-P 2009 ditetapkan sebesar 7,5 persen, sama dengan asumsi rata-rata suku bunga SBI 3 bulan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009.

1.3.5 Harga Minyak Mentah Indonesia

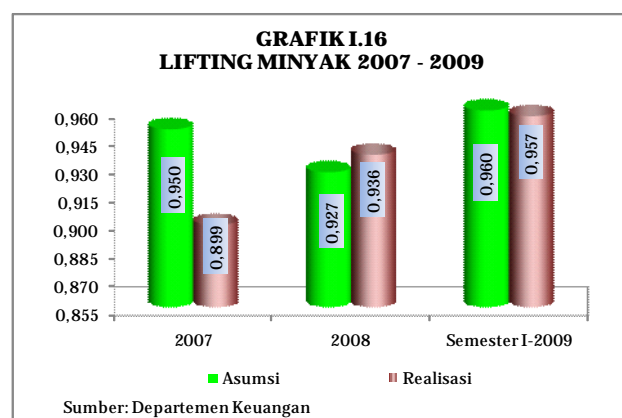
Seiring dengan tren pergerakan harga minyak global, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude-oil Price/ICP*) juga mengalami volatilitas yang sama. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia pada bulan Januari 2008 mencapai sebesar US\$92,1 per barel, dan pada Juli 2008 melonjak hingga mencapai US\$135,0 per barel. Pada masa tersebut, lonjakan harga minyak telah mengganggu pelaksanaan APBN terkait dengan meningkatnya beban subsidi BBM di dalam negeri. Pada paruh kedua tahun 2008, seiring dengan menurunnya harga minyak global, rata-rata ICP mengalami penurunan hingga mencapai US\$38,5 per barel di Desember 2008. Secara rata-rata, ICP di tahun 2008 mencapai sebesar US\$97 per barel.

Memasuki tahun 2009, terjadi pembalikan tren penurunan harga minyak dunia, termasuk ICP. Pada bulan Juni 2009, rata-rata ICP mencapai US\$68,9 per barel, sehingga realisasi rata-rata ICP dalam semester I tahun 2009 berada pada level US\$51,6 per barel. Pada enam bulan ke depan, ICP diperkirakan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya harga minyak mentah di pasar global. Peningkatan tersebut seiring dengan mulai pulihnya perekonomian di beberapa negara terutama China dan India yang mendorong meningkatnya permintaan minyak mentah. Dengan kondisi tersebut, rata-rata ICP dalam APBN-P 2009 ditetapkan sebesar US\$61,0 per barel, lebih tinggi jika dibandingkan dengan asumsi dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 yaitu US\$45,0 per barel. Sementara itu, Badan Energi Amerika (*Energy Information Administration/EIA*) memperkirakan pada tahun 2009 rata-rata harga minyak WTI berada pada level US\$58,7 per barel.



1.3.6 Lifting Minyak

Realisasi *lifting* minyak dalam semester I tahun 2009 sebesar 0,957 juta barel per hari, lebih tinggi daripada realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 0,926 juta barel per hari. Meskipun telah terjadi peningkatan, namun untuk mencapai target rata-rata *lifting* tahun 2009 sebesar 0,960 juta barel per hari terdapat beberapa tantangan, antara lain permasalahan perijinan yang mengakibatkan mundurnya jadwal pemasangan pipa dan tertundanya pembangunan fasilitas produksi. Tantangan lainnya adalah pengadaan fasilitas produksi



apung, tidak berhasilnya program *work over*, dan terjadinya pencurian fasilitas produksi. Dalam mengupayakan pencapaian target *lifting* minyak tersebut, Pemerintah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk dapat memenuhi target dan mengupayakan

percepatan produksi Blok Kangean dan Lapangan Tangguh yang diharapkan dapat berproduksi pada Juli 2009. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan target rata-rata *lifting* minyak mentah dalam APBN-P 2009 sebesar 0,960 juta barel per hari dapat tercapai.

1.4 Asumsi Makro 2009

Secara umum kinerja perekonomian Indonesia dalam tahun 2009 diperkirakan dapat bertahan dari hantaman krisis global, namun perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dielakkan. Perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami pemulihan dalam kuartal terakhir tahun 2009, mendahului pemulihan perekonomian dunia yang diperkirakan terjadi pada awal tahun 2010. Terjaganya stabilitas ekonomi yang ditandai dengan rendahnya volatilitas nilai tukar rupiah dan inflasi akan memberikan ruang gerak bagi penurunan suku bunga. Kondisi ini akan mendorong peningkatan kegiatan sektor riil. Selain itu, aman dan lancarnya pelaksanaan Pemilu Presiden akan memberikan dampak positif bagi masuknya investasi baru.

Faktor-faktor pendukung tersebut akan memberikan insentif peningkatan pertumbuhan ekonomi di kuartal akhir 2009 yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tiga kuartal sebelumnya, sehingga pertumbuhan ekonomi dalam APBN-P 2009 ditetapkan sebesar 4,3 persen. Perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar 4,5 persen.

Pergerakan tingkat harga tahun 2009 secara umum diperkirakan relatif stabil, namun perlu diwaspadai adanya beberapa faktor yang dapat menimbulkan tekanan inflasi seperti inflasi musiman terkait dengan tahun ajaran baru dan meningkatnya kebutuhan pokok masyarakat terkait dengan adanya hari raya keagamaan (Idul Fitri dan Natal), dan Tahun Baru. Di lain pihak, relatif stabilnya nilai tukar rupiah, terjaganya pasokan dan kelancaran arus distribusi barang, serta minimalnya dampak kebijakan komoditas strategis dalam kendali Pemerintah diperkirakan mampu menghambat laju inflasi dalam beberapa bulan terakhir tahun 2009. Dengan memperhatikan realisasi inflasi semester I tahun 2009 sebesar 3,65 persen (*y-o-y*), maka inflasi dalam APBN-P 2009 ditetapkan sebesar 4,5 persen, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi inflasi dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar 6,0 persen.

Sejalan dengan menurunnya laju inflasi, BI *Rate* diperkirakan cenderung menurun dalam tahun 2009. Penurunan BI *Rate* ini akan diikuti oleh penurunan suku bunga perbankan lainnya termasuk suku bunga SBI 3 bulan. Dalam semester I tahun 2009 rata-rata suku bunga SBI 3 bulan mencapai 8,5 persen. Dengan memperhatikan realisasi suku bunga selama periode tersebut dan ekspektasi inflasi ke depan, rata-rata suku bunga SBI 3 bulan dalam APBN-P 2009 ditetapkan sebesar 7,5 persen. Perkiraan realisasi tersebut sama dengan asumsi rata-rata suku bunga SBI 3 bulan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar 7,5 persen.

Mulai pulihnya sektor keuangan akan mengembalikan kepercayaan pasar dan meningkatkan likuiditas di sektor keuangan. Longgarnya likuiditas tersebut akan menjadi faktor pendorong mengalirnya modal ke negara berkembang. Di sisi lain, perbaikan perekonomian global akan meningkatkan permintaan ekspor dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Meningkatkan investasi dan ekspor negara mitra dagang Indonesia diharapkan akan menambah cadangan devisa. Dengan semakin meningkatnya jumlah cadangan devisa dan membaiknya fundamental ekonomi, nilai tukar rupiah diperkirakan akan semakin menguat. Sepanjang semester I tahun 2009 rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp11.082 per USD

dan diperkirakan terus menguat hingga secara keseluruhan dalam APBN-P 2009 rata-rata nilai tukar rupiah akan mencapai Rp10.500 per USD. Perkiraan realisasi nilai tukar tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi nilai tukar rupiah dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp11.000 per USD.

Berkaitan dengan mulai bergeraknya kegiatan perekonomian global, harga minyak mentah diperkirakan akan semakin meningkat dalam sisa tahun 2009. Dalam semester I tahun 2009 ICP mencapai US\$51,6 per barel. Sedangkan dalam APBN-P 2009 asumsi ICP ditetapkan sebesar US\$61,0 per barel, lebih tinggi jika dibandingkan dengan asumsi ICP dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar US\$45,0 per barel.

Realisasi *lifting* minyak dalam semester I tahun 2009 mencapai 0,957 juta barel per hari. Sedangkan dalam APBN-P 2009 *lifting* minyak ditetapkan sebesar 0,960 juta barel per hari atau sama dengan asumsinya dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009.

TABEL I.3
PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2008–2009

Indikator	2008	2009		
	Realisasi	APBN	Dok. Stimulus	APBN-P
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,1	6,0	4,5	4,3
Tingkat Inflasi (%)	11,1	6,2	6,0	4,5
Rata-rata Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	9.692	9.400	11.000	10.500
Suku Bunga SBI 3 Bulan (%)	9,3	7,5	7,5	7,5
Harga Minyak ICP (US\$/Barel)	96,8	80,0	45,0	61,0
Lifting Minyak (Juta Barel/Hari)	0,936	0,960	0,960	0,960

Sumber : Departemen Keuangan

1.5 Neraca Pembayaran

Seiring dengan membaiknya prospek ekonomi global dan domestik, kinerja neraca pembayaran tahun 2009, baik dari sisi transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial diperkirakan mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Membaiknya kinerja neraca pembayaran tersebut, antara lain disebabkan oleh mulai meningkatnya permintaan ekspor, masuknya arus modal, baik berupa pinjaman proyek, pinjaman program maupun investasi langsung dan portofolio.

Neraca Transaksi Berjalan

Transaksi berjalan pada tahun 2009 diperkirakan mencatat surplus US\$902 juta, yang didorong oleh surplus pada neraca perdagangan, serta menurunnya defisit neraca jasa dan neraca pendapatan. Neraca perdagangan dalam tahun 2009 masih mengalami surplus US\$21.723 juta, lebih rendah jika dibandingkan dengan surplus pada tahun sebelumnya sebesar US\$22.909 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya impor barang modal. Sementara itu, menyusutnya defisit neraca jasa terutama dipengaruhi oleh menurunnya pengeluaran jasa transportasi terkait dengan berkurangnya impor. Sedangkan menyusutnya defisit neraca pendapatan dikarenakan oleh menurunnya bagi hasil perusahaan migas sebagai dampak dari menurunnya harga minyak.

Neraca Modal dan Finansial

Transaksi modal dan finansial pada tahun 2009 diperkirakan mencatat surplus sebesar US\$5.791 juta. Surplus tersebut terutama bersumber dari tingginya surplus pada investasi langsung dan investasi portofolio, sejalan dengan perkiraan meningkatnya investasi langsung di sektor migas dan membaiknya persepsi risiko terhadap pasar domestik. Surplus pada investasi portofolio ditopang oleh adanya penerbitan obligasi global, sukuk valas, dan obligasi *shibosai* oleh Pemerintah. Selain itu, pada semester II 2009 diperkirakan Pemerintah akan melakukan penarikan pinjaman siaga (*contingency loan*) yang akan berkontribusi positif terhadap transaksi modal.

Berdasarkan perkembangan besaran-besaran neraca pembayaran tersebut, dalam tahun 2009 keseimbangan umum mengalami surplus sebesar US\$6.489 juta sehingga cadangan devisa diperkirakan mencapai US\$58.507 juta atau setara dengan kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah selama 6,1 bulan. Ringkasan neraca pembayaran Indonesia tahun 2008–2009 dapat dicermati pada **Tabel I.4**.

TABEL I.4
NERACA PEMBAYARAN INDONESIA, 2008 – 2009
(Juta US\$)

ITEM	2008*	2009**
A. TRANSAKSI BERJALAN	300	902
1. Neraca Perdagangan	22.909	21.723
a. Ekspor, fob	139.606	101.405
- Migas	31.721	17.489
- Non Migas	107.885	83.916
b. Impor, fob	-116.697	-79.682
- Migas	-23.935	-11.278
- Non Migas	-92.762	-68.404
2. Jasa-jasa	-12.741	-11.334
3. Pendapatan	-15.253	-13.941
4. Transfer	5.385	4.453
B. NERACA MODAL DAN FINANSIAL	-2.132	5.791
1. Sektor Publik	1.903	9.694
- Neraca modal	21	11
- Neraca finansial	1.882	9.683
a. Investasi portofolio	3.317	6.184
b. Investasi lainnya	-1.436	3.500
- Pinjaman program	2.743	3.111
- Pinjaman proyek	2.201	3.511
- Pinjaman siaga	0	3.532
- Pelunasan pinjaman	-6.380	-6.655
2. Sektor Swasta	-4.035	-3.903
- Neraca modal	273	85
- Neraca finansial	-4.308	-3.988
a. Penanaman modal langsung, neto	2.019	3.226
b. Investasi portofolio	-1.597	-758
c. Investasi lainnya	-4.731	-6.456
C. TOTAL (A+B)	-1.832	6.692
D. SELISIH YANG BELUM DIPERHITUNGKAN	-112	-204
E. KESEIMBANGAN UMUM (C+D)	-1.944	6.489
F. PEMBIAYAAN		
Perubahan cadangan devisa ^{1/}	1.944	-6.489
Cadangan devisa	51.639	58.507
Transaksi berjalan/PDB (%)	0,1	0,2

* Perkiraan Realisasi; ** Perkiraan

^{1/} Karena transaksi NPI; Negatif (-) berarti surplus, Positif (+) berarti defisit

Sumber: Bank Indonesia

BAB II

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

2.1 Pendahuluan

Pada bulan Februari 2009, Pemerintah telah menyampaikan Dokumen Stimulus Fiskal 2009 kepada DPR, mengingat krisis ekonomi global diperkirakan berdampak terhadap penerimaan, belanja dan pembiayaan. Berdasarkan kinerja pelaksanaan dokumen stimulus fiskal 2009, pendapatan negara dan hibah dalam APBN 2009 diperkirakan akan mengalami perubahan. Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan pendapatan negara dan hibah dalam APBN 2009 adalah terjadinya perubahan pada beberapa asumsi makro sebagai akibat dari belum pulihnya kondisi perekonomian global dari krisis keuangan 2008.

Sementara itu, dalam upaya meredam dampak negatif dari krisis ekonomi global, Pemerintah mengambil kebijakan *countercyclical* yang bertujuan untuk (a) memelihara daya beli masyarakat; (b) menjaga daya tahan sektor usaha dalam menghadapi krisis global; dan (c) meningkatkan daya serap tenaga kerja dan meredam PHK. Salah satu instrumen kebijakan *countercyclical* tersebut adalah berupa *tax cut/tax saving* yang berpotensi pada menurunnya pendapatan negara dan hibah, khususnya dari penerimaan perpajakan.

Penyusunan perubahan perkiraan pendapatan negara dalam tahun 2009 sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Pertama, pencapaian realisasi pendapatan negara sampai dengan semester I 2009. Kedua, perkembangan perekonomian dunia serta dampaknya pada perekonomian Indonesia, termasuk ketahanan danantisipasi yang diambil oleh dunia usaha di dalam negeri. Ketiga, perkiraan realisasi beberapa indikator ekonomi makro tahun 2009, terutama pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, dan *lifting* minyak mentah Indonesia. Keempat, pelaksanaan kebijakan fiskal yang telah direncanakan dalam tahun 2009, termasuk program stimulus fiskal 2009 dari sisi perpajakan.

Berdasarkan pertimbangan kondisi tersebut, pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2009 ditargetkan sebesar Rp870.999,0 miliar (16,1 persen terhadap PDB), terdiri atas penerimaan dalam negeri Rp869.992,5 miliar dan hibah Rp1.006,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan rencananya dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp848.571,9 miliar, pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2009 naik 2,6 persen. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 yang mencapai Rp981.609,4 miliar, pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2009 turun 11,3 persen.

2.2 Perubahan Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2009

Belum pulihnya kondisi perekonomian Indonesia akibat tekanan krisis ekonomi global menyebabkan berubahnya perkiraan pendapatan negara dan hibah dalam tahun 2009. Berdasarkan realisasi hingga semester I 2009 sebesar Rp367.249,9 miliar, pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2009 ditargetkan sebesar Rp870.999,0 miliar, terdiri atas penerimaan dalam negeri sebesar Rp869.992,5 miliar dan hibah Rp1.006,5 miliar. Apabila

dibandingkan dengan target dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 yang mencapai Rp848.571,9 miliar, target pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2009 lebih tinggi Rp22.427,0 miliar atau 2,6 persen. Kenaikan tersebut terjadi baik pada pos penerimaan dalam negeri maupun hibah yang masing-masing naik sebesar 2,6 persen dan 7,2 persen. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2008, target pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2009 tersebut mengalami penurunan Rp110.610,5 miliar atau 11,3 persen, dengan perincian penerimaan dalam negeri turun 11,2 persen dan hibah turun 56,3 persen. Perkembangan pendapatan negara dan hibah tahun 2009 dapat dilihat pada **Tabel II.1**.

TABEL II.1 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH, 2009 (miliar rupiah)					
Uraian	APBN	Dok. Stimulus	Real. Semester I	APBN-P	% thd Dok. Stimulus
Pendapatan Negara dan Hibah	985.725,3	848.571,9	367.249,9	870.999,0	102,6
A. Penerimaan Dalam Negeri	984.786,5	847.633,0	367.046,2	869.992,5	102,6
1. Penerimaan Perpajakan	725.843,0	661.758,6	288.539,1	651.954,8	98,4
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	258.943,6	185.874,4	78.507,1	218.037,6	117,3
B. Hibah	938,8	938,9	203,7	1.006,5	107,2

Sumber : Departemen Keuangan

2.2.1 Penerimaan Dalam Negeri

Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam APBN-P 2009, penerimaan dalam negeri direncanakan mencapai Rp869.992,5 miliar, lebih tinggi 2,6 persen atau naik Rp22.359,4 miliar jika dibandingkan dengan target dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan penerimaan yang bersumber dari migas akibat naiknya asumsi ICP dalam APBN-P 2009 menjadi US\$61 per barel, dari US\$45 per barel dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2008, rencana penerimaan dalam negeri dalam APBN-P 2009 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp109.312,9 miliar atau lebih rendah 11,2 persen. Penurunan tersebut terjadi pada penerimaan perpajakan sebesar 1,0 persen dan PNBP sebesar 32,0 persen. Turunnya perkiraan penerimaan perpajakan dalam tahun 2009 menjadikan penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997. Hal tersebut disebabkan oleh krisis ekonomi global dan pemberian paket stimulus di bidang perpajakan tahun 2009.

Sampai dengan semester I 2009, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp288.539,1 miliar atau 43,6 persen dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2009 penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp651.954,8 miliar atau 98,4 persen dari Dokumen Stimulus Fiskal 2009.

Di sisi lain, sampai dengan semester I 2009, realisasi PNBP mencapai Rp78.507,1 miliar, atau 42,2 persen dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Dengan demikian, target PNBP dalam APBN-P 2009 diperkirakan mencapai Rp218.037,6 miliar,

atau naik 17,3 persen jika dibandingkan dengan rencana dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Kenaikan tersebut terjadi akibat naiknya asumsi ICP menjadi US\$61 per barel dalam APBN-P 2009 dari US\$45 per barel dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2008, PNPB turun 32,0 persen. Hal tersebut disebabkan oleh perkiraan ICP tahun 2009 lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi ICP tahun 2008 sebesar US\$96,8 per barel.

2.2.1.1 Pokok-pokok Perubahan Penerimaan Perpajakan

Dalam tahun 2009, dampak krisis ekonomi global diperkirakan akan semakin dalam sehingga memerlukan waktu pemulihan yang lebih lama dari yang telah diperkirakan sebelumnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang bersifat *countercyclical*. Kebijakan *countercyclical* yang berupa stimulus fiskal tersebut ditujukan terutama untuk (a) memelihara daya beli masyarakat; (b) menjaga daya tahan perusahaan/sector usaha menghadapi krisis global; serta (c) meningkatkan daya serap tenaga kerja dan meredam PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya. Total dana yang dialokasikan untuk program stimulus fiskal 2009 adalah sebesar Rp73.260,1 miliar. Khusus untuk bidang perpajakan, total dana yang dialokasikan mencapai Rp56.300,0 miliar atau sebesar 76,8 persen. Stimulus fiskal bidang perpajakan tahun 2009, yang kemudian ditetapkan dalam APBN-P 2009 dapat dilihat pada **Tabel II.2**.

TABEL II.2 STIMULUS FISKAL BIDANG PERPAJAKAN 2009			
Uraian	Alokasi (Rp miliar)	Peraturan	Pelaksanaan
A. Penghematan Pembayaran Perpajakan	43.000,0		
1. Penurunan tarif PPh OP (35% --> 30%) dan penyederhanaan lapisan penghasilan	13.500,0	Amandemen UU PPh	1 Jan 2009
2. Peningkatan PTKP menjadi Rp15,8 juta	11.000,0	Amandemen UU PPh	1 Jan 2009
3. Penurunan tarif PPh Badan (30% --> 28%) dan Perusahaan masuk bursa --> tarif 5% lebih rendah	18.500,0	Amandemen UU PPh	1 Jan 2009
B. Subsidi Pajak/BM (DTP) kepada Dunia Usaha/RTS	13.300,0		
1. PPh Panas Bumi	800,0	PMK 242/2008	1 Jan 2009
2. PPh Pasal 21	6.500,0	PMK 43/2009	18 Mar 2009
3. PPN Minyak Goreng	800,0	PMK 231/2008	23 Des 2008
4. PPN Bahan Bakar Nabati (BBN)	200,0	-	-
5. PPN Eksplorasi Migas	2.500,0	PMK 242/2008	1 Jan 2009
6. Bea Masuk Industri	2.500,0	PMK 241/2009	26 Feb 2009
Jumlah Stimulus	56.300,0		

Sumber : Departemen Keuangan

Sebagai kebijakan untuk memelihara daya beli masyarakat, stimulus fiskal diberikan dalam bentuk *tax saving* berupa penyederhanaan lapisan penghasilan, penurunan tarif, dan kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2009. Penyederhanaan lapisan penghasilan, dan penurunan tarif untuk wajib pajak (WP) orang pribadi (tarif tertinggi dari 35 persen menjadi 30 persen) diharapkan dapat memberikan stimulus kepada masyarakat sebesar Rp13.500,0 miliar, sedangkan kenaikan PTKP dari Rp13,2 juta menjadi Rp15,8 juta per individu diharapkan dapat memberikan stimulus sebesar Rp11.000,0 miliar.

Selain dalam bentuk penghematan beban pajak, stimulus perpajakan yang ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat juga diberikan dalam bentuk subsidi pajak/pajak ditanggung Pemerintah (DTP). DTP tersebut dialokasikan pada PPN minyak goreng dan PPN bahan bakar nabati (BBN) yang masing-masing berjumlah Rp800,0 miliar dan Rp200,0 miliar. Pemberian fasilitas PPN DTP minyak goreng telah berjalan melalui PMK Nomor 231/2008 dan efektif berlaku sejak 23 Desember 2008, sedangkan PMK untuk PPN BBN masih dalam proses penyelesaian.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan subsidi PPh pasal 21 orang pribadi (OP) yang ditujukan untuk mengurangi beban karyawan dengan penghasilan sampai dengan Rp5 juta. Pajak yang dipungut oleh perusahaan dari karyawan ditanggung oleh Pemerintah dan dikembalikan kepada karyawan sebagai stimulus fiskal. Pelaksanaan pemberian subsidi PPh Pasal 21 mulai efektif berlaku sejak tanggal 18 Maret 2009 dengan telah ditetapkannya PMK Nomor 43/2008.

Sementara itu, sebagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan usaha, stimulus perpajakan diberikan dalam bentuk penurunan tarif tunggal WP badan. Kebijakan tersebut juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu perubahan mendasar dalam amendemen UU PPh tersebut adalah diterapkannya tarif tunggal WP badan sebesar 28 persen pada tahun 2009 dan diberikannya fasilitas untuk perusahaan masuk bursa dalam bentuk penurunan tarif sebesar 5 persen lebih rendah daripada tarif tunggal WP badan yang berlaku. Di samping itu, WP badan juga mendapat keringanan beban pajak berupa pemberian insentif pajak untuk perusahaan yang bergerak pada sektor tertentu dan/atau berlokasi di daerah tertentu. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan stimulus kepada dunia usaha sebesar Rp18.500,0 miliar.

Selain berupa penghematan pajak, stimulus fiskal juga diberikan dalam bentuk fasilitas bea masuk DTP yang jumlahnya mencapai Rp2.500,0 miliar. Pemberian fasilitas bea masuk DTP tersebut bertujuan untuk memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, mendorong sektor riil, dan meningkatkan daya saing industri tertentu di dalam negeri. Insentif subsidi bea masuk tersebut diberikan untuk sebelas sektor, yaitu pesawat terbang, komponen kendaraan bermotor, komponen elektronika, kapal, kemasan infus, pembangkit listrik tenaga uap, sorbitol, industri telematika, industri pembuatan *methyltin mercaptide*, alat tulis berupa *ballpoint*. Rincian stimulus fiskal dalam bentuk bea masuk DTP tahun 2009 dapat dilihat dalam **Tabel II.3**.

No.	Sektor	Alokasi (Rp miliar)	Peraturan
1.	Pesawat Terbang	416,0	PMK 26/2009
2.	Komponen Kendaraan Bermotor	795,2	PMK 27/2009
3.	Komponen Elektronika	215,4	PMK 28/2009
4.	Kapal	151,0	PMK 29/2009
5.	Industri Alat Besar	106,0	PMK 30/2009
6.	Kemasan Infus	11,4	PMK 31/2009
7.	Pembangkit Listrik Tenaga Uap	14,0	PMK 33/2009
8.	Sorbitol	0,7	PMK 34/2009
9.	Industri Telematika	50,0	PMK 35/2009
10.	Industri Pembuatan <i>Methyltin Mercaptide</i>	0,9	PMK 36/2009
11.	Alat Tulis Berupa <i>Ballpoint</i>	3,2	PMK 37/2009
12.	Lainnya	736,2	-
Total Bea Masuk DTP		2.500,0	

Sumber : Departemen Keuangan

Pelaksanaan pemberian fasilitas bea masuk DTP tahun 2009 telah dimulai pada 1 Januari 2009, yaitu sejak ditetapkannya PMK Nomor 241/2008 yang merupakan peraturan induk dari pelaksanaan fasilitas dimaksud. Penentuan sektor yang menerima fasilitas bea masuk DTP dilakukan melalui penerbitan PMK Nomor 26 s.d. 31 dan PMK Nomor 33 s.d. 37 Tahun 2009 yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 26 Februari 2009. Dari jumlah Rp2.500,0 miliar yang diberikan untuk fasilitas bea masuk DTP, sejumlah Rp1.763,8 miliar telah dialokasikan kepada sektor industri. Dengan demikian, masih terdapat ruang bagi industri tertentu lainnya untuk mendapatkan fasilitas bea masuk DTP.

Di samping pemberian fasilitas bea masuk, Pemerintah juga memberikan subsidi PPN berupa pajak dalam rangka impor (PDRI) kepada perusahaan yang melaksanakan eksplorasi minyak dan gas bumi. Dengan adanya subsidi PPN tersebut diharapkan semakin banyak perusahaan yang berinvestasi pada industri minyak dan gas bumi. Pemerintah juga memberikan insentif PPh pada bidang panas bumi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kegiatan pengusahaan sumber daya panas bumi guna pembangkitan energi/listrik. Pelaksanaan pemberian subsidi PPN untuk kedua kegiatan di atas telah dimulai dengan ditetapkannya PMK Nomor 242/2008 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Semua fasilitas di bidang perpajakan yang diberikan dalam rangka kebijakan *countercyclical* tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemberian DTP atau subsidi pajak secara umum. Dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, total DTP yang diberikan adalah sebesar Rp18.250,0 miliar, sedangkan dalam APBN-P 2009 direncanakan mencapai Rp18.630,0 miliar. Perubahan tersebut terjadi akibat adanya alokasi subsidi pajak untuk program *Tropical Forest Conservation Act* (TFCA)

sebesar Rp80,0 miliar, serta adanya tambahan alokasi subsidi pajak untuk PPh bunga imbal hasil atas surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional sebesar Rp300,0 miliar. Alokasi DTP untuk program TFCA tersebut diberikan dalam rangka kebijakan keringanan pajak atas aliran dana yang bersumber dari bantuan luar negeri kepada entitas nirlaba di Indonesia yang melakukan program konservasi lingkungan dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Rincian DTP dalam APBN-P 2009 dapat dilihat pada **Tabel II.4**.

Uraian	APBN	Dok. Stimulus	APBN-P
a. Subsidi Pajak Program Stabilisasi Harga (PSH)	1.500	-	-
1. PPN dalam negeri minyak goreng	1.500	-	-
b. Subsidi Pajak Non PSH	23.750	18.250	18.630
1. Pajak Penghasilan (PPh)	2.250	8.750	9.130
a. PPh panas bumi	800	800	800
b. PPh bunga imbal hasil atas surat berharga yg diterbitkan di pasar internasional	1.200	1.200	1.500
c. PPh eksklusivitas PT.Telkom	250	250	250
d. PPh Pasal 21	-	6.500	6.500
e. Program Tropical Forest Conservation Act (TFCA)	-	-	80
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18.500	6.500	6.500
a. PPN BBM bersubsidi (PT Pertamina)	10.000	3.000	3.000
b. Counter cyclical	8.500	3.500	3.500
(i) PDRI (PPN dan BBM) eksplorasi migas	8.500	2.500	2.500
(ii) PPN minyak goreng	-	800	800
(iii) PPN Bahan Bakar Nabati (BBN)	-	200	200
3. BPHTB	500	500	500
- Kekurangan DTP BPHTB PT Pertamina tahun 2007	500	500	500
4. Bea Masuk	2.500	2.500	2.500
- Fasilitas bea masuk	2.500	2.500	2.500
Total Pajak Ditanggung Pemerintah	25.250	18.250	18.630

Sumber: Departemen Keuangan

Di samping melakukan amendemen UU PPh, Pemerintah juga melakukan amendemen UU PPN dan PPnBM dalam tahun 2009. Namun, hingga saat ini amendemen tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan DPR RI. Tujuan amendemen ini antara lain (a) memberikan kepastian hukum, (b) menyederhanakan cakupan PPN barang strategis dan PPnBM, (c) menetapkan status perpajakan pada komoditas pertambangan, dan

(d) mengamankan penerimaan pajak. Dampak dari amendemen UU PPN dan PPnBM diharapkan akan mulai dirasakan pada tahun 2010.

Di bidang cukai, strategi dan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan 2009 adalah (a) menetapkan tarif spesifik dan menaikkan tarif sesuai kemampuan industri, (b) melakukan manajemen risiko dalam seleksi persetujuan permohonan penyediaan pita cukai, (c) intensifikasi pemberantasan pita cukai palsu dan rokok tanpa cukai, (d) mengawasi administrasi pembukuan barang kena cukai secara intensif, (e) memanfaatkan *profiling* dalam pelayanan dan pengawasan di bidang cukai, (f) menambah persyaratan jaminan dalam pembayaran cukai, serta (g) mengenakan sanksi yang menimbulkan efek jera dalam setiap penindakan di bidang cukai.

Di sisi lain, kebijakan di bidang kepabeanan pada tahun 2009 dilakukan dengan meningkatkan program harmonisasi tarif bea masuk yang mendukung *roadmap* kebijakan pengembangan industri nasional. Penyempurnaan tingkatan tarif bea masuk yang harmonis untuk impor bahan baku industri hulu, antara, dan hilir akan menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong daya saing produk Indonesia. Demikian pula, dalam bidang kerjasama perdagangan internasional di bidang barang, Pemerintah terus menerus aktif mengikuti dan memaksimalkan manfaat atas perdagangan internasional dalam skema kerjasama regional, bilateral maupun multilateral.

Berdasarkan pokok-pokok perubahan kebijakan perpajakan tersebut di atas, dan mempertimbangkan dampak krisis ekonomi global serta realisasi penerimaan perpajakan hingga semester I tahun 2009 maka target penerimaan perpajakan dalam APBN-P 2009 diperkirakan mencapai Rp651.954,8 miliar, sedikit menurun sebesar Rp9.803,8 miliar atau 1,5 persen lebih rendah dari target dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 yaitu sebesar Rp661.758,6 miliar. Penurunan penerimaan perpajakan dalam APBN-P 2009 terutama bersumber dari penerimaan PPN dan PPnBM yang diperkirakan turun sebesar Rp30.565,0 miliar terhadap Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Perkiraan penerimaan perpajakan tersebut juga mengalami penurunan Rp6.746,0 miliar atau lebih rendah 1,0 persen jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2008. Penerimaan perpajakan dalam tahun 2009 dapat dilihat pada **Tabel II.5**.

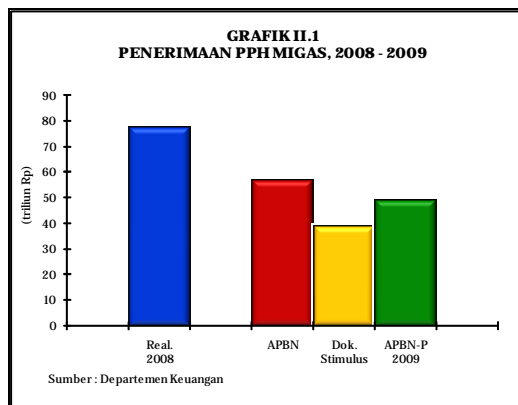
Uraian	APBN	Dok. Stimulus	Real. Semester I	APBN-P	% thd Dok. Stimulus
Penerimaan Perpajakan	725.843,0	661.758,6	288.539,1	651.654,8	98,4
a. Pajak Dalam Negeri	697.347,0	642.227,0	279.489,3	631.931,7	98,4
i. Pajak penghasilan	357.400,5	319.609,6	163.786,3	340.209,3	106,4
1. Migas	56.723,5	38.768,0	27.388,1	49.033,4	126,5
2. Non-Migas	300.677,0	280.841,6	136.398,3	291.175,8	103,7
ii. Pajak pertambahan nilai	249.508,7	233.649,0	81.048,8	203.084,0	86,9
iii. Pajak bumi dan bangunan	28.916,3	23.863,7	4.678,7	23.863,6	100,0
iv. BPHTB	7.753,6	7.165,5	2.202,1	6.980,0	97,4
v. Cukai	49.494,7	54.399,8	26.307,7	54.545,0	100,3
vi. Pajak lainnya	4.273,2	3.539,5	1.465,7	3.250,0	91,8
b. Pajak Perdagangan Internasional	28.496,0	19.531,6	9.049,8	20.023,1	102,5
i. Bea masuk	19.160,4	17.151,2	8.462,0	18.623,5	108,6
ii. Bea keluar	9.335,6	2.380,4	587,8	1.399,6	58,8

Sumber : Departemen Keuangan

2.2.1.2 Penerimaan Perpajakan APBN-P 2009

Penerimaan perpajakan terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Dalam APBN-P 2009, pajak dalam negeri diperkirakan memberikan kontribusi sebesar Rp631.931,7 miliar (96,9 persen), sedangkan pajak perdagangan internasional memberikan kontribusi sebesar Rp20.023,1 miliar (3,1 persen). Pencapaian penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional tersebut masing-masing mencapai 98,4 persen dan 102,5 persen jika dibandingkan dengan Dokumen Stimulus Fiskal 2009.

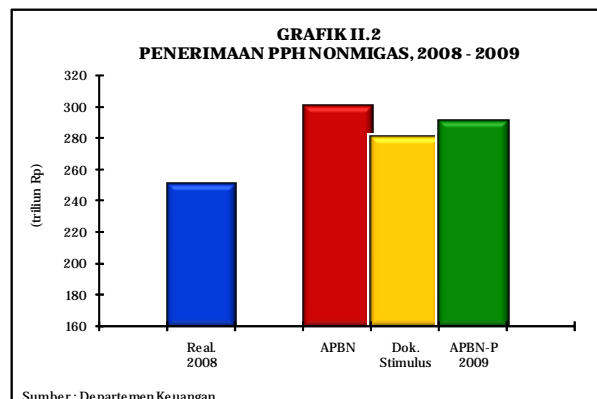
Sebagai penyumbang utama penerimaan perpajakan, realisasi penerimaan PPh dalam APBN-P 2009 diperkirakan mencapai Rp340.209,3 miliar, naik Rp20.599,6 miliar dari target dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp319.609,7 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan adanya peningkatan target penerimaan PPh migas sebagai akibat berubahnya asumsi harga minyak dalam APBN-P 2009.



Sampai dengan semester I 2009, realisasi penerimaan PPh migas telah mencapai Rp27.388,1 miliar atau 70,6 persen dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Melihat kecenderungan ICP dalam bulan Juni-Desember 2009 yang diperkirakan akan terus meningkat, target penerimaan PPh migas dalam APBN-P 2009 diperkirakan mencapai Rp49.033,4 miliar atau meningkat 26,5 persen jika dibandingkan dengan rencana dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 yang mencapai Rp77.018,9 miliar, penerimaan PPh migas dalam tahun 2009

diperkirakan turun sebesar 36,3 persen. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan asumsi ICP pada APBN-P 2009 sebesar US\$61,0 per barel, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi ICP pada tahun 2008 yang mencapai US\$96,8 per barel. Penerimaan PPh migas tahun 2008 - 2009 dapat dilihat pada **Grafik II.1**.

Sementara itu, sampai dengan semester I 2009 penerimaan PPh nonmigas telah terealisasi sebesar Rp136.398,3 miliar atau 48,6 persen dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Dengan demikian, dalam APBN-P 2009 penerimaan PPh nonmigas diperkirakan akan mencapai Rp291.175,8 miliar atau naik 3,7 persen dari Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Perkiraan tersebut juga lebih tinggi 16,2 persen atau meningkat sebesar Rp40.697,0 miliar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2008. Naiknya perkiraan realisasi penerimaan PPh nonmigas dalam APBN-P 2009 terutama disebabkan oleh keberhasilan reformasi administrasi perpajakan dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Penerimaan PPh nonmigas tahun 2008 - 2009 dapat dilihat pada **Grafik II.2**.



Secara sektoral, sebagian besar dari penerimaan PPh nonmigas berasal dari sektor keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan. Hingga semester I 2009, realisasi penerimaan PPh nonmigas dari sektor tersebut mampu memberikan kontribusi sebesar Rp28.991,1 miliar atau 28,1 persen terhadap total penerimaan PPh nonmigas. Penerimaan di sektor tersebut terutama berasal dari PPh Pasal 25/29 badan yang realisasinya mencapai Rp18.671,0 miliar. Selain dari sektor keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan, penerimaan PPh nonmigas juga dinominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar Rp25.882,9 miliar atau 25,1 persen. Penerimaan PPh nonmigas sektoral dalam tahun 2008-2009 dapat dilihat pada **Tabel II.6**.

Sektor	2008	2009		
	Real.	Realisasi Semester I	APBN-P	y-o-y (%)
1. Pertambangan Migas	17.232,0	5.972,8	14.949,1	(13,2)
2. Pertambangan Bukan Migas	11.364,9	6.537,9	22.863,9	101,2
3. Penggalian	489,7	9.434,0	381,2	(22,1)
4. Industri Pengolahan	54.970,3	163,6	63.995,4	16,4
5. Listrik, Gas dan Air Bersih	5.165,3	28.934,0	6.185,8	19,8
6. Konstruksi	5.004,0	3.125,5	6.685,7	33,6
7. Perdagangan, Hotel dan Restoran	23.439,0	2.909,5	32.616,8	39,2
8. Pengangkutan dan Komunikasi	19.830,3	13.803,0	18.315,7	(7,6)
9. Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	59.036,8	8.690,2	94.759,9	60,5
10. Jasa Lainnya	11.055,1	41.171,2	14.027,8	26,9
11. Kegiatan yang belum jelas batasannya	3.968,3	6.765,4	1.986,2	(49,9)
12. Total	221.039,5	891,1	287.043,7	29,9
Total	432.595,2	128.398,2	563.811,2	30,3

* Tidak termasuk penerimaan PPh dalam bentuk valas dan belum memperhitungkan restitusi.

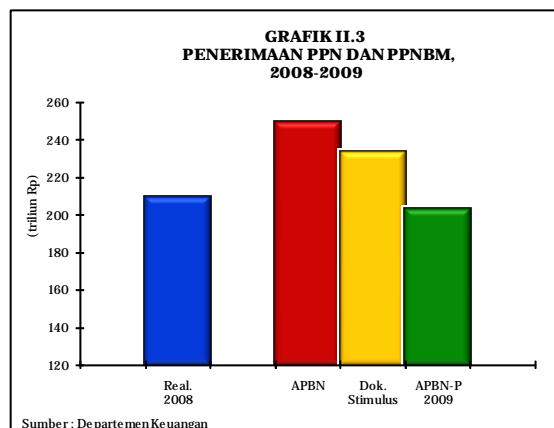
Sumber : Departemen Keuangan

Berdasarkan realisasi hingga semester I tersebut, penerimaan PPh nonmigas dari sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan diperkirakan mencapai Rp94.759,9 miliar sampai dengan akhir tahun 2009. Dengan demikian, dalam APBN-P 2009 penerimaan PPh nonmigas dari sektor tersebut diperkirakan meningkat 60,5 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2008. Peningkatan penerimaan PPh nonmigas dari sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan terutama berasal dari naiknya penerimaan subsektor perantara keuangan kecuali asuransi dan dana pensiun yang diperkirakan tumbuh sebesar 59,1 persen menjadi sebesar Rp70.664,3 miliar dalam APBN-P 2009. Kenaikan tersebut terjadi karena meningkatnya penerimaan PPh Pasal 25/29 badan yang bersumber dari pertumbuhan penyaluran kredit perbankan.

Selanjutnya, target penerimaan PPN dan PPnBM dalam APBN-P 2009 diperkirakan mencapai Rp203.084,0 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp30.565,0 miliar atau 13,1 persen dari target dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 yang mencapai Rp233.649,0 miliar. Penurunan tersebut diperkirakan terjadi karena realisasi penerimaan PPN dan PPnBM per semester I 2009 hanya mencapai Rp81.048,8 miliar atau 34,7 persen dari target dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Kondisi tersebut terjadi karena menurunnya volume impor.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2008, penerimaan PPN dan PPnBM dalam tahun 2009 juga diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp6.563,5 miliar atau 3,1 persen. Penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2008 - 2009 dapat dilihat pada **Grafik II.3**.

Dilihat dari komposisinya secara sektoral, proporsi PPN dalam negeri terhadap penerimaan PPN pada tahun 2009 adalah sebesar 69,2 persen, sedangkan PPN impor sebesar 31,8 persen. Sampai dengan semester I 2009, sektor yang paling besar memberikan kontribusi terhadap penerimaan PPN dalam negeri adalah sektor industri pengolahan, yaitu mencapai Rp13.510,7 miliar atau 28,3 persen dari total PPN dalam negeri secara sektoral. Penerimaan PPN dalam negeri sektoral tahun 2008 - 2009 dapat dilihat dalam **Tabel II.7**.



TABEL II.7
PENERIMAAN PPN DALAM NEGERI SEKTORAL 2008-2009
(miliar rupiah)

Sektor	2008	2009		
	Real.	Realisasi Semester I	APBN-P	y-o-y (%)
1. Pertambangan Migas	17.604,6	1.250,8	22.483,5	27,7
2. Pertambangan Bukan Migas	1.374,9	8.041,9	985,6	(28,3)
3. Penggalian	122,7	537,3	123,0	0,3
4. Industri Pengolahan	37.652,6	56,8	37.443,5	(0,6)
5. Listrik, Gas dan Air Bersih	622,4	20.405,1	928,8	49,2
6. Konstruksi	10.470,4	392,4	11.319,0	8,1
7. Perdagangan, Hotel dan Restoran	19.502,1	5.010,7	21.868,1	12,1
8. Pengangkutan dan Komunikasi	8.675,4	10.588,3	8.235,5	(5,1)
9. Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	9.225,7	4.178,9	9.716,4	5,3
10. Jasa Lainnya	2.368,3	4.956,9	2.356,1	(0,5)
11. Kegiatan yang belum jelas batasannya	5.887,0	1.169,3	6.576,8	11,7
12. Total	116.548,1	3.265,9	123.940,8	6,3
Total	230.054,1	59.854,4	245.977,1	6,9

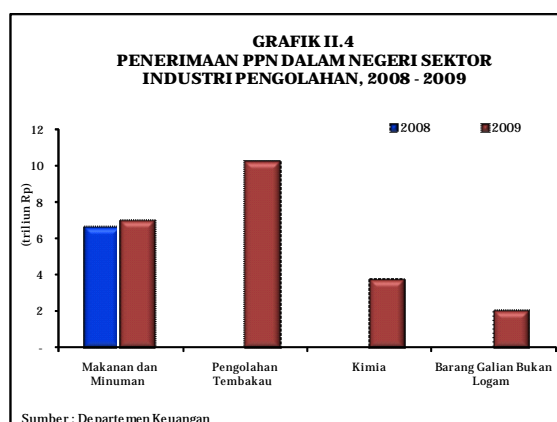
* Belum memperhitungkan PPnBM, PPN dari transaksi belanja yang dilakukan Kementerian / Lembaga dan transaksi yang offline, serta restitusi.

Sumber: Departemen Keuangan

pendorong naiknya penerimaan subsektor makanan dan minuman adalah masih tumbuhnya konsumsi rumah tangga dalam tahun 2009. Penerimaan PPN dalam negeri sektor industri pengolahan dalam tahun 2008 - 2009 dapat dilihat pada **Grafik II.4**.

Di sisi lain, hingga semester I 2009, realisasi penerimaan PPN impor secara sektoral mencapai Rp21.845,2 miliar. Sektor industri pengolahan yang menyumbang 47,3 persen terhadap total penerimaan PPN impor hanya terealisasi sebesar Rp10.335,0 miliar. Penerimaan PPN impor sektoral dalam tahun 2008 - 2009 dapat dilihat dalam **Tabel II.8**.

Hingga akhir tahun 2009 penerimaan PPN dalam negeri dari sektor industri pengolahan diperkirakan sedikit menurun sebesar 0,6 persen hingga menjadi Rp37.443,5 miliar jika dibandingkan dengan realisasi dalam tahun 2008. Di sisi lain, penerimaan dari subsektor makanan dan minuman mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,2 persen jika dibandingkan dengan realisasi dalam tahun 2008. Faktor



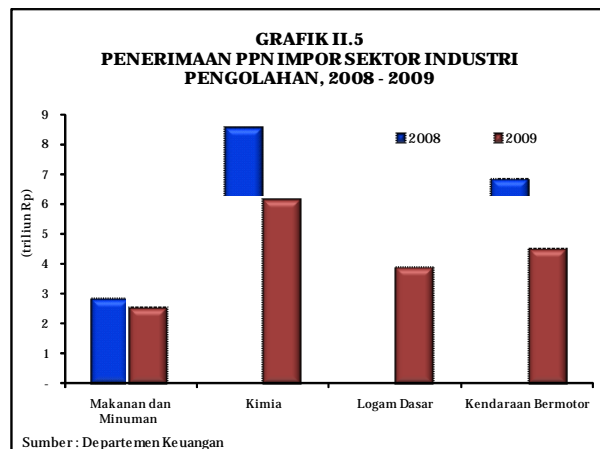
TABEL II.8
PENERIMAAN PPN IMPOR SEKTORAL 2008-2009 *
(miliar rupiah)

Sektor	2008	2009		
	Real.	Realisasi Semester I	APBN-P	y-o-y (%)
1. Pertambangan Migas	18.390,8	41,0	76,6	(99,6)
2. Pertambangan Bukan Migas	499,7	3.395,5	6.288,5	1.158,4
3. Penggalian	83,7	204,0	573,9	585,2
4. Industri Pengolahan	36.590,9	25,6	44,1	(99,9)
5. Listrik, Gas dan Air Bersih	169,4	13.321,6	27.296,1	16.011,9
6. Konstruksi	1.296,1	123,2	235,5	(81,8)
7. Perdagangan, Hotel dan Restoran	21.078,5	534,2	1.346,6	(93,6)
8. Pengangkutan dan Komunikasi	2.417,6	8.210,8	17.559,8	626,3
9. Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	659,1	632,8	1.424,9	116,2
10. Jasa Lainnya	191,3	341,5	714,0	273,2
11. Kegiatan yang belum jelas batasannya	32,4	56,2	119,5	269,1
12. Total	81.506,5	11,1	19,3	(100,0)
Total	162.916,2	26.897,5	55.698,7	(65,8)

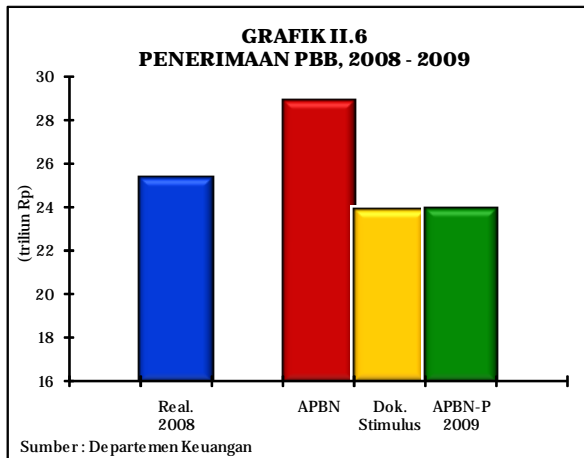
* Belum memperhitungkan PPNBM, PPN dari transaksi belanja yang dilakukan Kementerian / Lembaga dan transaksi yang offline, serta restitusi.

Sumber : Departemen Keuangan

Berdasarkan realisasi hingga semester I 2009 tersebut, penerimaan PPN impor dari sektor industri pengolahan diperkirakan menjadi Rp25.142,7 miliar pada akhir tahun 2009. Dengan demikian, realisasi penerimaan PPN impor dalam tahun 2009 diperkirakan turun 31,3 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2008. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya penerimaan di semua subsektor industri pengolahan terutama dari subsektor kendaraan bermotor dan subsektor kimia. Penerimaan PPN dalam negeri sektor industri pengolahan dalam tahun 2008 - 2009 dapat dilihat pada **Grafik II.5**.



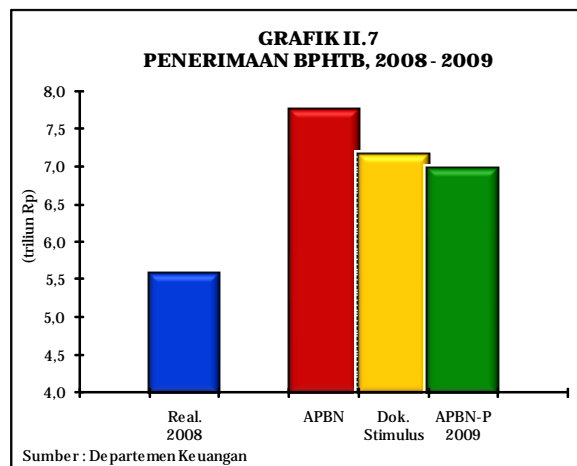
Sementara itu, realisasi penerimaan PBB hingga semester I 2009 sebesar Rp4.678,7 miliar atau 19,6 persen dari target dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 merupakan realisasi penerimaan yang terkecil dibandingkan dengan penerimaan perpajakan lainnya. Target penerimaan PBB dalam APBN-P 2009 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan target dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp23.863,6 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2008, penerimaan PBB dalam tahun 2009 diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp1.490,7 miliar atau 5,9 persen. Hal tersebut terjadi karena lebih rendahnya penerimaan PBB pertambangan migas yang mendominasi penerimaan PBB



seiring dengan merosotnya ICP dalam tahun 2009. Penerimaan PBB dalam tahun 2008 - 2009 dapat dilihat pada **Grafik II.6**.

Selanjutnya, penerimaan BPHTB dalam APBN-P 2009 juga diperkirakan mengalami penurunan sebesar 2,6 persen atau turun Rp185,6 miliar dari target dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 yang mencapai Rp7.165,5 miliar. Penurunan tersebut terjadi terutama disebabkan oleh menurunnya transaksi properti yang menjadi objek pajak BPHTB akibat terimbas krisis ekonomi global.

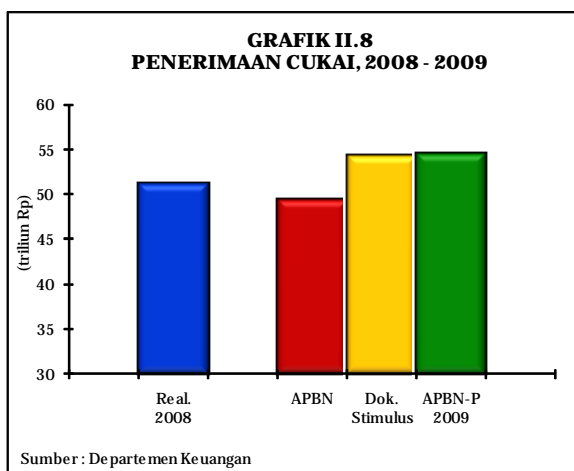
Namun, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2008, penerimaan BPHTB dalam tahun 2009 tersebut meningkat sebesar 25,2 persen. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya NJOP tanah dan bangunan sesuai inflasi dalam tahun 2009. Penerimaan BPHTB dalam tahun 2008 - 2009 dapat dilihat pada **Grafik II.7**.



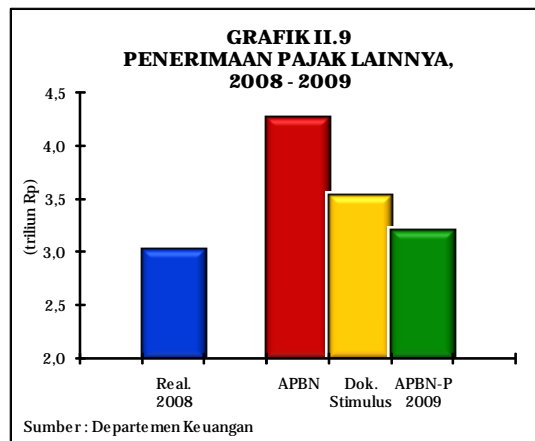
Penerimaan cukai merupakan salah satu sumber penerimaan perpajakan yang relatif tidak terimbas krisis ekonomi global. Dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan cukai yang hingga semester I 2009 telah mencapai 48,4 persen dari Dokumen Stimulus Fiskal

2009, target penerimaan cukai dalam APBN-P 2009 diperkirakan meningkat dari Rp54.399,8 miliar menjadi Rp54.545,0 miliar atau 0,3 persen lebih tinggi dari target Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Kenaikan penerimaan cukai tahun 2009 terutama diakibatkan oleh naiknya produksi rokok, naiknya tarif spesifik rata-rata sebesar 7 persen pada awal tahun 2009,

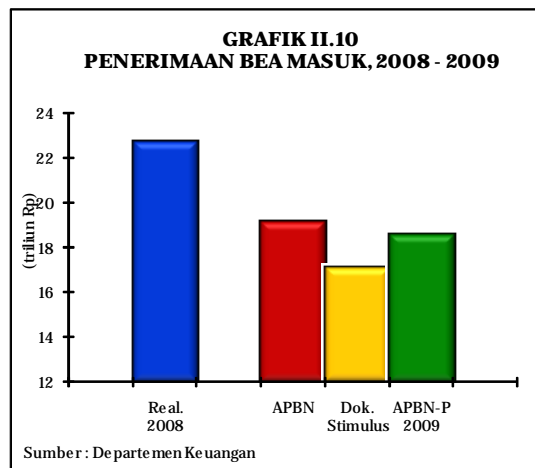
serta kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang diarahkan menuju simplifikasi dan tarif spesifik. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 yang mencapai Rp51.251,8 miliar, penerimaan cukai dalam APBN-P 2009 tersebut juga diperkirakan meningkat sebesar 6,4 persen. Penerimaan cukai dalam tahun 2008 - 2009 dapat dilihat pada **Grafik II.8**.



Di sisi lain, penerimaan pajak lainnya dalam APBN-P 2009 diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 8,2 persen dari Rp3.539,5 miliar yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 menjadi Rp3.250,0 miliar. Realisasi penerimaan pajak lainnya sampai



dengan semester I 2009 mencapai Rp1.465,7 miliar atau 41,4 persen dari target dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Perkiraan penurunan tersebut disebabkan oleh jumlah transaksi ekonomi yang menggunakan materai mengalami penurunan. Hal tersebut merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2008. Penerimaan pajak lainnya dalam tahun 2008 - 2009 dapat dilihat pada **Grafik II.9**.

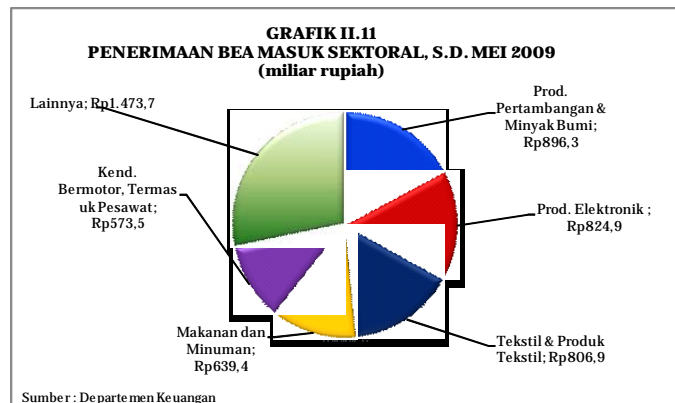


Sementara itu, seiring dengan perkiraan mulai pulihnya perdagangan dunia dalam semester II 2009, penerimaan bea masuk dalam APBN-P 2009 diperkirakan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp18.623,5 miliar atau lebih tinggi 8,6 persen jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Sampai dengan semester I 2009, realisasi penerimaan bea masuk mencapai Rp8.462,0 miliar atau 49,3 persen dari target dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2008, penerimaan bea masuk dalam tahun 2009 diperkirakan mengalami penurunan sebesar 18,2 persen. Hal tersebut selain disebabkan karena menurunnya nilai impor, juga terjadi karena adanya kebijakan penurunan tarif dalam rangka mendukung kebijakan harmonisasi tarif dan *Free Trade Area*

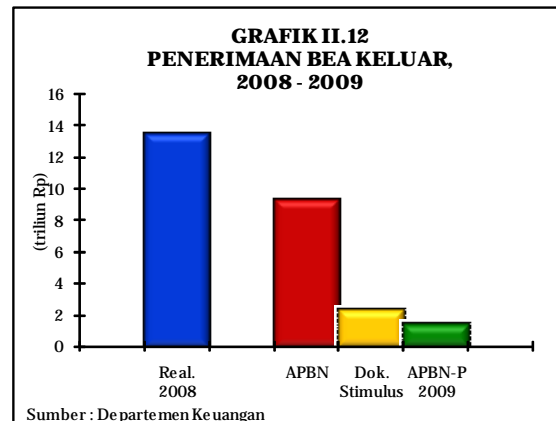
bilateral yang dilakukan oleh Pemerintah. Penerimaan bea masuk dalam tahun 2008 - 2009 dapat dilihat pada **Grafik II.10**.

Secara sektoral, sampai dengan bulan Mei 2009 realisasi penerimaan bea masuk didominasi oleh tiga sektor yaitu produk pertambangan dan minyak bumi (17,2 persen), produk elektronik (15,8 persen), serta tekstil dan produk tekstil (15,5 persen). Penerimaan bea masuk sektoral hingga bulan Mei 2009 dapat dilihat pada **Grafik II.11**.

Sebaliknya, penerimaan bea keluar dalam APBN-P 2009 diperkirakan mengalami penurunan sebesar 41,2 persen menjadi Rp1.399,6 miliar dibandingkan dengan target dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 yang mencapai Rp2.380,4 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2008, penerimaan bea keluar dalam APBN-P 2009 mengalami penurunan sebesar Rp12.178,7 miliar atau 89,7 persen.



Sampai dengan semester I 2009 penerimaan bea keluar mencapai 24,7 persen dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Rendahnya realisasi penerimaan bea keluar terutama disebabkan oleh diterapkannya kebijakan tarif nol persen atas ekspor *crude palm oil* (CPO) dan turunannya selama semester I 2009. Meskipun Pemerintah telah menaikkan tarif bea keluar ekspor CPO dan turunannya sebesar 3 persen mulai 1 Juni 2009, kenaikan tersebut belum mampu mendorong peningkatan penerimaan bea keluar hingga akhir tahun 2009. Penerimaan bea keluar dalam tahun 2008 - 2009 dapat dilihat pada **Grafik II.12**.



2.2.1.3 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan PNBP

Dalam APBN-P 2009, perubahan atas indikator ekonomi makro terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP), produksi/*lifting* minyak mentah, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat secara langsung berpengaruh terhadap total perkiraan PNBP yang disetorkan sebagai pendapatan negara. Perubahan atas indikator tersebut akan mengakibatkan perubahan perhitungan penerimaan sumber daya alam (SDA) minyak dan gas bumi (migas). Penerimaan SDA migas merupakan komponen utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total PNBP. Dalam APBN-P 2009, penerimaan SDA migas diperkirakan akan memberikan kontribusi terhadap PNBP sebesar 58,6 persen.

Berdasarkan perubahan asumsi ekonomi makro dalam perhitungan APBN-P 2009 dan memperhatikan langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam tahun 2009, target PNBP direncanakan akan mengalami perubahan menjadi Rp218.037,6 miliar. Apabila dibandingkan dengan Dokumen Stimulus Fiskal 2009, target PNBP tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp32.163,2 miliar atau 17,3 persen. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasi PNBP tahun 2008 yang mencapai Rp320.604,6 miliar, realisasi PNBP pada tahun 2009 diperkirakan turun sebesar Rp102.567,0 miliar atau 32,0 persen.

Dalam APBN-P 2009, Pemerintah tetap optimis untuk mempertahankan asumsi produksi/*lifting* minyak mentah pada level 960 ribu bph, meskipun hingga semester I 2009 realisasi *lifting* tersebut masih di bawah target, yaitu sebesar 957 ribu bph atau 99,7 persen dari target. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja produksi/*lifting* minyak bumi adalah adanya kendala operasional, antara lain terkait dengan masalah perizinan, cuaca, tata kelola, dan *Planning of Development*. Meskipun demikian, Pemerintah siap mendukung dan memfasilitasi penanganan kendala-kendala guna mendorong peningkatan produksi.

Perkembangan harga minyak dunia yang cenderung meningkat juga berpengaruh terhadap penerimaan migas. Perkembangan harga minyak dunia yang mencapai kisaran US\$61 per barel pada APBN-P 2009, jauh lebih tinggi daripada asumsi yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar US\$45 per barel. Kecenderungan kenaikan harga tersebut akan meningkatkan perkiraan penerimaan SDA migas secara signifikan.

Hal lain yang berpengaruh terhadap kebijakan PNBPN adalah tekanan krisis ekonomi global yang akan berdampak terhadap penerimaan dari dividen BUMN. Hal ini terutama tercermin dari adanya selisih kurs dan volatilitas harga minyak yang berpotensi mempengaruhi perolehan laba BUMN nonperbankan, khususnya PT Pertamina dan BUMN sektor pertambangan. Untuk BUMN sektor perbankan,antisipasi peningkatan *Non Performing Loans* (NPL) menjadi komponen pengurang laba BUMN perbankan sehubungan dengan cadangan umum penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif. Hal lain adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Peningkatan *Capital Adequacy Requirement* (CAR) atau rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) yang juga mengurangi laba BUMN perbankan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah akan melakukan penyesuaian *pay-out ratio* terhadap beberapa BUMN perbankan yang membutuhkan tambahan *capital expenditure* untuk kegiatan investasi. Kebijakan penyesuaian *pay-out ratio* BUMN perbankan tersebut akan dikompensasi melalui upaya penyaluran kredit dengan tingkat suku bunga rendah dan pengurangan dana simpanan dalam bentuk SBI. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mendorong pertumbuhan kredit di tengah perlemahan perekonomian.

Sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2008, Pemerintah juga terus berupaya melakukan program restrukturisasi dan *right-sizing* BUMN dari sebelumnya yang berjumlah 138 menjadi 89 perusahaan. Dengan dilakukannya langkah kebijakan tersebut jumlah BUMN akan menurun secara signifikan, sehingga diharapkan Pemerintah akan lebih mudah untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap BUMN. Rencana program restrukturisasi tersebut akan mencakup BUMN dari sektor perkebunan, pupuk, BUMN karya, pertambangan, farmasi, semen, dan perbankan.

Sementara itu, untuk PNBPN lainnya dan pendapatan badan layanan umum (BLU) terus diupayakan untuk dioptimalkan penerimaannya. Optimalisasi untuk PNBPN lainnya tersebut terutama diupayakan terhadap PNBPN dari kementerian negara/lembaga (K/L) melalui intensifikasi penagihan. Untuk pendapatan BLU, terus diupayakan perbaikan terhadap sistem pelaporan pendapatan.

2.2.1.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak APBN-P 2009

Berdasarkan pokok-pokok kebijakan PNBPN yang akan diterapkan dan perubahan asumsi ekonomi makro, PNBPN dalam APBN-P 2009 direncanakan sebesar Rp218.037,6 miliar. Sumber utama PNBPN tersebut masih didominasi oleh penerimaan dari PNBPN SDA, terutama dari penerimaan SDA migas. Rencana PNBPN dalam APBN-P 2009 tersebut meningkat sebesar Rp32.163,2 miliar atau 17,3 persen dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp185.874,4 miliar, dan menurun sebesar Rp102.567,0 miliar atau 32,0 persen dari realisasi 2008.

Penerimaan SDA dalam APBN-P 2009 direncanakan mencapai Rp138.653,4 miliar atau lebih tinggi 33,7 persen dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp103.692,6 miliar. Peningkatan PNBPN SDA tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan SDA migas yang diperkirakan mencapai Rp127.748,2 miliar. Penerimaan SDA migas diperkirakan tetap memberikan kontribusi terbesar dalam PNBPN SDA yaitu sebesar 92,1 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan SDA tahun 2008, rencana penerimaan SDA tersebut menurun sebesar Rp85.809,6 miliar atau 38,2 persen.

Perkiraan penerimaan SDA migas meningkat dari Dokumen Stimulus Fiskal 2009 disebabkan adanya perubahan asumsi ICP, yaitu dari sebesar US\$45 per barel menjadi US\$61 per barel dalam APBN-P 2009. Sementara itu, Pemerintah tetap optimis untuk menargetkan produksi/ *lifting* minyak bumi sebesar 960 ribu bph. Dalam tahun 2008, realisasi *lifting* mencapai 936 ribu bph yang lebih tinggi dari target sebesar 927 ribu bph. Faktor lainnya adalah rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam APBN-P 2009 diperkirakan sebesar Rp10.500 per dolar Amerika Serikat. **Tabel II.9** memperlihatkan perkembangan PNBP tahun 2009.

Tabel II.9
Perkembangan PNBP Tahun 2009
(Miliar Rupiah)

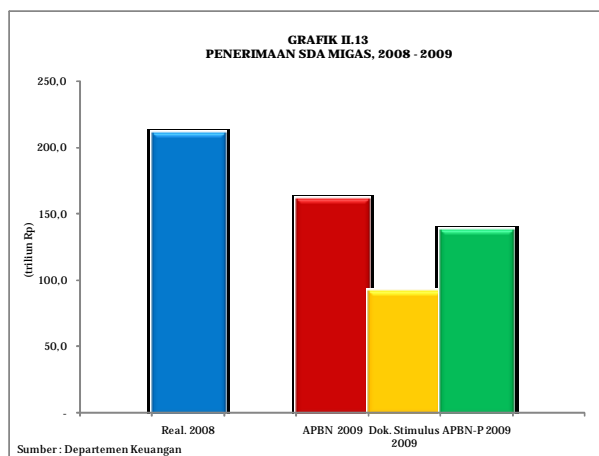
	APBN	Dok. Stimulus	Real. Semester I	APBN-P	% thd Dok. Stimulus
Penerimaan Negara Bukan Pajak	258.943,6	185.874,4	78.507,1	218.037,6	117,3
a. PNBP SDA	173.496,5	103.692,6	47.587,5	138.653,4	133,7
I. Penerimaan SDA Migas	162.123,1	91.999,2	40.386,0	127.748,2	138,9
-Penerimaan Minyak Bumi	123.029,7	62.352,4	31.199,4	91.491,0	146,7
-Penerimaan Gas Bumi	39.093,3	29.646,8	9.186,6	36.257,1	122,3
II. Penerimaan SDA Non Migas	11.373,5	11.693,5	7.201,5	10.905,2	93,3
-Penerimaan Pertambangan Umum	8.723,5	8.723,5	6.063,1	8.720,2	100,0
-Penerimaan Kehutanan	2.500,0	2.500,0	924,8	1.715,0	68,6
-Penerimaan Perikanan	150,0	150,0	44,8	150,0	100,0
-Penerimaan Pertambangan Panas Bumi	0,0	320,0	168,9	320,0	100,0
b. Bagian Laba BUMN	30.794,0	26.110,0	3.530,1	28.614,7	109,6
c. PNBP Lainnya	49.210,8	50.629,5	26.285,2	44.878,7	88,6
d. Pendapatan BLU	5.442,2	5.442,2	1.104,4	5.890,9	108,2

Sumber : Departemen Keuangan

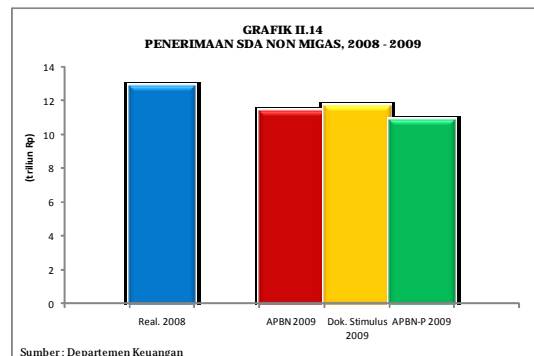
Secara rinci penerimaan SDA migas direncanakan bersumber dari penerimaan minyak bumi sebesar Rp91.491,0 miliar dan penerimaan gas bumi sebesar Rp36.257,1 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2008, penerimaan minyak bumi menurun sebesar Rp77.531,2 miliar atau 45,9 persen, sedangkan penerimaan gas bumi menurun sebesar Rp6.337,6 miliar atau 14,9 persen. Penerimaan SDA migas dalam tahun 2008 - 2009 dapat dilihat pada **Grafik II.13**.

Penerimaan SDA nonmigas dalam APBN-P 2009 direncanakan akan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan

Dokumen Stimulus Fiskal 2009, terutama didorong oleh adanya penurunan pada pendapatan kehutanan. Dalam tahun 2009, penerimaan kehutanan direncanakan sebesar Rp1.715,0 miliar atau lebih rendah 31,4 persen dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp2.500,0 miliar. Sementara itu, sumber penerimaan dari SDA nonmigas lainnya yaitu penerimaan pertambangan umum, penerimaan perikanan, dan penerimaan



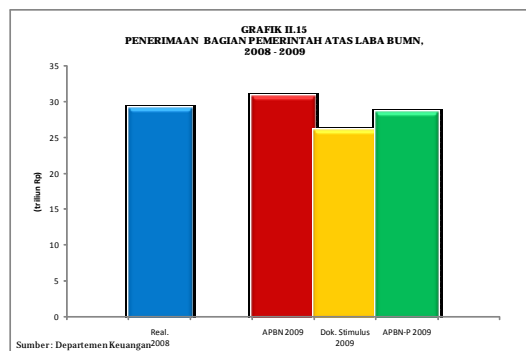
pertambangan panas bumi dalam tahun 2009 direncanakan relatif tetap sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, masing-masing sebesar Rp8.720,2 miliar, Rp150,0 miliar, dan Rp320,0 miliar. Secara umum pendapatan SDA nonmigas mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2008, yang disebabkan oleh penurunan dari penerimaan pertambangan umum, penerimaan kehutanan, dan penerimaan pertambangan panas bumi, masing-masing menurun sebesar Rp791,2 miliar, Rp600,5 miliar, dan Rp621,4 miliar. Penerimaan SDA nonmigas dalam tahun 2008 -2009 dapat dilihat pada **Grafik II.14**.



Sementara itu, PNB yang bersumber dari bagian Pemerintah atas laba BUMN dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain volatilitas nilai tukar rupiah pada tahun 2008. Hal ini berdampak pada berkurangnya perolehan laba BUMN di tahun 2008 sebagai akibat adanya selisih kurs yang mencapai Rp12,0 triliun. Beberapa BUMN yang mengalami kerugian terbesar akibat selisih kurs di tahun buku 2008 antara lain PT PLN, PT Pupuk Sriwijaya, PT Indosat, PT PGN, dan PT Pupuk Kujang.

Penurunan BI *rate* dari 9,25 persen menjadi 7,25 persen pada semester I 2009 akan berdampak terhadap penurunan suku bunga kredit yang disalurkan BUMN perbankan. Penurunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan volume kredit dalam rangka menggerakkan sektor riil. Peningkatan volume kredit akan dapat memberikan ruang bagi BUMN perbankan untuk mengembangkan usahanya, sehingga diharapkan BUMN perbankan tidak perlu mengajukan usulan pengurangan *dividen payout ratio* atau rasio pembayaran penerimaan atas laba untuk menambah cadangan umum penyesihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif.

Berdasarkan indikator tersebut, kinerja BUMN di tahun 2009 diharapkan akan dapat terjaga di tengah tekanan krisis ekonomi global, sehingga dalam APBN-P tahun 2009 penerimaan yang berasal dari bagian Pemerintah atas laba BUMN (*dividen*) diperkirakan sebesar Rp28.614,7 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp2.504,7 miliar (9,6 persen) dari Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Peningkatan jumlah *dividen* tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian *pay-out ratio* PT Pertamina dari 50 persen menjadi 60 persen, sehingga rencana *dividen* yang disetor PT Pertamina bertambah sebesar Rp1.067,1 miliar atau total menjadi Rp14.517,1 miliar. Selain itu, faktor lain yang mendukung peningkatan *dividen* tahun 2009 adalah kenaikan total laba bersih setelah pajak BUMN (133 BUMN *audited*) di tahun buku 2008. BUMN yang membukukan laba bersih terbesar di tahun 2008 antara lain adalah PT Pertamina sebesar Rp30.195,1 miliar, PT Telkom sebesar Rp10.619,5 miliar, PT Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp5.958,4 miliar, PT Bank Mandiri sebesar Rp5.312,8 miliar, dan PT Semen Gresik sebesar Rp2.523,5 miliar. Penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dalam 2008 - 2009 dapat dilihat pada **Grafik II.15**.



Sementara itu, sumber penerimaan PNBП lainnya antara lain berasal dari (a) kegiatan-kegiatan pelayanan dan pengaturan yang dilaksanakan oleh masing-masing K/L kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; (b) *Domestic Market Obligation* (DMO) minyak mentah; dan (c) penjualan hasil tambang. Dalam APBN-P 2009, target penerimaan PNBП lainnya direncanakan mencapai Rp44.878,7 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp5.750,8 miliar atau 11,4 persen jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp50.629,5 miliar. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 yang sebesar Rp63.319,0 miliar, target dalam APBN-P tersebut mengalami penurunan sebesar Rp18.440,3 miliar atau 29,1 persen. Penurunan target PNBП lainnya antara lain dipengaruhi oleh dampak krisis ekonomi global yang diperkirakan masih akan berlangsung sampai akhir tahun 2009.

Target PNBП lainnya dalam APBN-P 2009 tersebut sudah termasuk setoran yang berasal dari surplus Bank Indonesia sebesar Rp2.646,4 miliar yang realisasinya dicatat pada bulan Mei 2009. Setoran surplus BI dalam APBN-P 2009 merupakan surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia setelah dikurangi 30 persen untuk cadangan tujuan dan cadangan umum sebagai penambah modal sehingga rasio jumlah modal mencapai 10 persen terhadap total kewajiban moneter Bank Indonesia. Sesuai Pasal 62 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, setoran surplus Bank Indonesia tersebut digunakan untuk melunasi sebagian pokok kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia (SRBI-01) sebagai penyelesaian bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Target dalam APBN-P 2009 tersebut lebih kecil bila dibandingkan dengan setoran surplus Bank Indonesia tahun 2007 yang mencapai Rp13.669,3 miliar. Sementara itu, pada tahun 2008 tidak terdapat setoran yang berasal dari surplus Bank Indonesia karena tidak memenuhi ketentuan dalam UU tersebut. Penerimaan yang berasal dari surplus Bank Indonesia ini jumlahnya tidak dapat diproyeksikan, karena sangat tergantung dengan kondisi keuangan global, terutama di tengah kondisi keuangan global yang masih dipenuhi ketidakpastian untuk saat-saat ini.

Dalam rangka optimalisasi PNBП lainnya yang bersumber dari K/L dan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2009 secara keseluruhan, Pemerintah melakukan beberapa langkah kebijakan. Langkah-langkah kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan dari 6 K/L terbesar yaitu sebesar Rp833,2 miliar atau 4,2 persen terhadap Dokumen Stimulus Fiskal 2009, dari semula Rp20.040,3 miliar menjadi Rp20.873,5 miliar. Target PNBП lainnya dari 6 K/L dalam APBN-P 2009 dapat dilihat pada **Tabel II.10**.

No	Uraian	Dok. Stimulus	APBN-P 2009	% thd Dok Stimulus
1	Departemen Komunikasi dan Informatika	7.004,0	7.269,5	103,8
2	Departemen Pendidikan Nasional	5.128,2	5.424,6	106,0
3	Departemen Kesehatan	3.367,5	3.583,0	106,4
4	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.800,2	1.800,2	100,0
5	Badan Pertanahan Nasional	1.350,4	1.388,0	102,8
6	Departemen Hukum dan HAM	1.400,0	1.408,2	100,6
Total PNBП Lainnya		20.040,3	20.873,5	104,2

Sumber : Departemen Keuangan

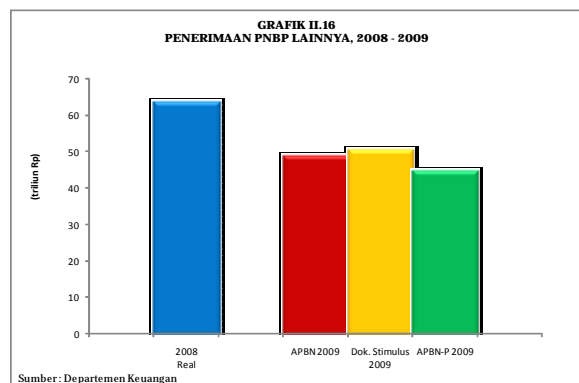
PNBP Departemen Komunikasi dan Informatika didukung dengan kebijakan antara lain sebagai berikut: (a) pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Depkominfo dengan tegas; (b) pembenahan database, baik pengguna frekuensi maupun penyelenggaraan telekomunikasi; (c) pelaksanaan sosialisasi secara intensif kepada penyelenggaraan telekomunikasi dan pengguna spektrum frekuensi berkenaan dengan kewajiban pembayaran PNBPN; dan (d) pembaharuan dan penambahan *tools* secara bertahap antara lain sistem monitoring frekuensi, otomatisasi sistem manajemen/perizinan frekuensi dan alat pengujian.

PNBP dari Departemen Pendidikan Nasional didukung dengan kebijakan antara lain sebagai berikut: (a) meningkatkan kapasitas dan daya tampung perguruan tinggi; (b) meningkatkan pelaksanaan berbagai program kegiatan kerjasama, baik antarinstansi maupun lembaga non-Pemerintah, serta dunia industri; dan (c) menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni dalam skala nasional maupun internasional.

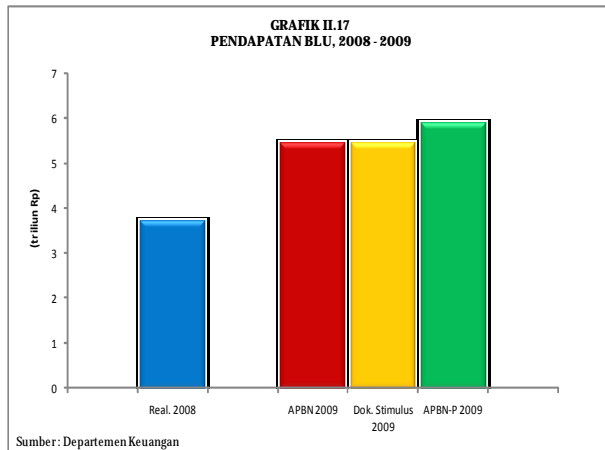
PNBP dari Departemen Kesehatan didukung dengan kebijakan antara lain melalui (a) peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan; (b) peningkatan pelayanan dan sarana/prasarana kesehatan yang terintegrasi sesuai standar, berorientasi pada kepuasan pelanggan; dan (c) peningkatan *cost recovery* rumah sakit untuk menuju kemandirian komputerisasi administrasi keuangan.

PNBP dari Kepolisian Negara RI didukung dengan kebijakan antara lain (a) menambah satuan administrasi penyelenggaraan SIM (Satpas) dan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap (Samsat) keliling untuk daerah yang letaknya jauh dari Satpas dan Samsat; dan (b) membangun jaringan Satpas yang *online* dalam penyelenggaraan SIM di seluruh Polda.

PNBP dari Departemen Hukum dan HAM didukung dengan kebijakan antara lain dengan mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Sementara PNBPN dari Badan Pertanahan Nasional didukung kebijakan antara lain dengan (a) meningkatkan sosialisasi kemudahan pelayanan pertanahan kepada masyarakat; dan (b) mendekatkan kantor pertanahan kepada masyarakat secara lebih adil dan merata di seluruh wilayah kabupaten/kota melalui “Kantor Pertanahan Bergerak” yaitu LARASITA. Penerimaan PNBPN lainnya dalam tahun 2008 - 2009 dapat dilihat dalam **Grafik II.16**.



Dalam APBN-P tahun 2009, target pendapatan BLU direncanakan sebesar Rp5.890,9 miliar, meningkat sebesar Rp448,7 miliar atau 8,2 persen dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp5.442,2 miliar. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 sebesar Rp3.734,3 miliar, target tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.156,6 miliar atau 57,8 persen. Hal tersebut terutama disebabkan jumlah satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU masih terus bertambah. Hingga semester I tahun 2009 jumlah satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU mencapai 68 unit, dan kemungkinan masih akan terus bertambah.

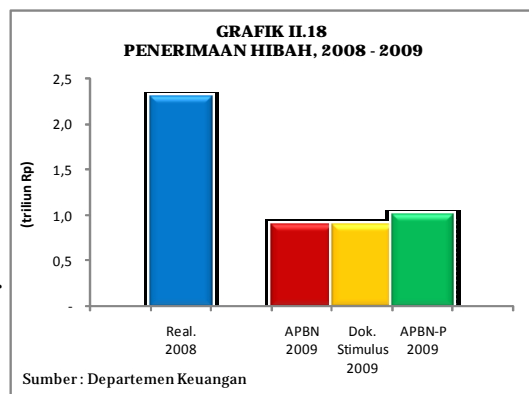


Realisasi pendapatan BLU sampai dengan semester I 2009 mencapai Rp1.140,4 miliar atau 20,3 persen dari target Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp5.442,2 miliar. Pendapatan BLU tersebut meliputi: (a) pendapatan jasa BLU, (b) pendapatan hibah BLU, (c) pendapatan hasil kerjasama BLU, dan (d) pendapatan BLU lainnya. Realisasi semester I 2009 dari masing-masing jenis pendapatan BLU tersebut adalah sebesar Rp1.007,3 miliar, Rp9,3 miliar, Rp34,9 miliar dan Rp52,8 miliar. Pendapatan BLU dalam tahun 2008 - 2009 dapat dilihat dalam **Grafik II.17**.

2.2.2 Hibah Tahun 2009

Dalam APBN-P 2009, penerimaan hibah diperkirakan akan mencapai Rp1.006,5 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp67,6 miliar (7,2 persen) bila dibandingkan dengan Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp938,9 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan hibah tahun 2008 sebesar Rp2.304,0 miliar, perkiraan penerimaan hibah dalam tahun 2009 tersebut menurun sebesar Rp1.297,5 miliar.

Sebagian besar hibah tersebut akan dialokasikan untuk mendanai program-program mitigasi dan perubahan iklim. Sedangkan sebagian lainnya merupakan hibah yang dialokasikan kepada K/L. Selain itu, dana hibah akan dipergunakan untuk membiayai berbagai program atau proyek yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Indonesia dengan pihak pemberi hibah berdasarkan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*). Penerimaan hibah dalam tahun 2008 - 2009 dapat dilihat pada **Grafik II.18**.



BAB III

PERKIRAAN REALISASI ANGGARAN BELANJA NEGARA

3.1 Pendahuluan

Pelaksanaan anggaran belanja negara, sebagai bagian integral dari pelaksanaan APBN tahun 2009, sejak ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun Anggaran 2009, mendapatkan tekanan yang sangat berat terutama dari berbagai faktor eksternal akibat krisis ekonomi global. Berbagai tekanan pada pelaksanaan APBN tahun 2009 tersebut, mendorong perlunya dilakukan langkah-langkah kebijakan penyesuaian di bidang fiskal, dengan antara lain mengubah beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi basis perhitungan berbagai besaran APBN, yang dirasakan sudah tidak lagi realistis; memperlebar defisit anggaran; memperluas program stimulus fiskal ekonomi melalui APBN 2009; dan melakukan penyesuaian terhadap berbagai besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

Krisis finansial global yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi global, telah menyebabkan turunnya kinerja perekonomian dunia secara tajam sejak tahun 2008, sehingga sangat dirasakan dampaknya pada perekonomian domestik sejak triwulan IV tahun 2008, dan terutama pada triwulan I 2009. Meskipun secara umum fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat dalam menahan krisis ekonomi global, namun terdapat sektor-sektor tertentu dalam perekonomian yang mengalami dampak cukup berat. Dalam triwulan I 2009, pertumbuhan ekspor dan impor mengalami kontraksi secara tajam masing-masing sebesar 32,0 persen dan 17,8 persen. Imbas krisis ekonomi juga terlihat pada tingkat konsumsi, seperti tercermin pada perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak pertambahan nilai dalam negeri, konsumsi listrik, penjualan motor dan mobil, dan pada triwulan I 2009, pertumbuhan PDB mencapai 4,4 persen, dengan laju pertumbuhan investasi mencapai 3,4 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan investasi triwulan I 2008 sebesar 13,7 persen.

Memburuknya prospek perekonomian global diperkirakan membawa tekanan baru terhadap prospek penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran di tahun 2009. Pada bulan Januari 2009, tercatat telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 17 ribu pekerja, dan sebanyak 65 ribu pekerja telah dirumahkan di beberapa perusahaan dan industri seperti industri tekstil dan garmen, perkebunan, industri kertas, elektronik, dan alas kaki.

Dalam rangka memperkecil dampak negatif dari krisis ekonomi global tersebut, Pemerintah memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah penyesuaian darurat di bidang fiskal, guna menyelamatkan perekonomian nasional tahun 2009 dari krisis global, antara lain dengan memperluas program stimulus fiskal melalui APBN 2009. Kebijakan stimulus fiskal tersebut ditujukan terutama untuk (a) memelihara dan/atau meningkatkan daya beli masyarakat untuk menjaga agar konsumsi rumah tangga tumbuh 4,0 sampai dengan 4,7 persen; (b) menjaga daya tahan perusahaan/ sektor usaha menghadapi krisis global; serta (c) menciptakan kesempatan kerja dan menyerap dampak PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya. Pada program stimulus fiskal, dalam rangka

peningkatan daya beli masyarakat telah dilakukan pemberian subsidi harga untuk obat generik, PPN ditanggung Pemerintah (DTP) untuk produk akhir, dan penurunan harga BBM. Sementara itu, dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tahan usaha dan ekspor telah dilakukan kebijakan pemberian fasilitas bea masuk DTP, PPh Pasal 21 dan 25 DTP, PPN DTP; potongan tarif listrik untuk industri; dan penurunan harga solar. Selanjutnya, dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan pencegahan/pengamanan dampak PHK telah dilakukan penambahan alokasi anggaran untuk infrastruktur yang terkait gabungan penanganan dengan bencana alam, proyek tahun jamak, jaringan kereta api, instalasi pengolahan air minum, perumahan rakyat, pembangkit dan transmisi listrik, rehabilitasi jalan usaha tani, pelabuhan, pasar, serta pembangunan infrastruktur pergudangan pangan. Selain ditujukan untuk meredam dampak krisis ekonomi global, langkah-langkah penyesuaian darurat di bidang fiskal tersebut juga dimaksudkan untuk mempersiapkan fondasi yang lebih kuat dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta meletakkan dasar-dasar yang lebih kuat dan memperkokoh sendi-sendi perekonomian nasional.

Langkah-langkah penyesuaian darurat di bidang fiskal tersebut telah diusulkan kepada Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui penyampaian Dokumen Stimulus Fiskal 2009 pada pertengahan Februari 2009, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun 2009, dan telah dibahas bersama dan disetujui oleh Panitia Anggaran DPR-RI pada tanggal 26 Februari 2009. Dalam Dokumen Stimulus Fiskal APBN 2009 tersebut, dilakukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2009 guna menyesuaikan dengan kondisi ekonomi domestik dan global paling mutakhir. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut antara lain meliputi: (a) pertumbuhan ekonomi turun dari 6,0 persen menjadi 4,5 persen; (b) harga minyak mentah Indonesia (ICP) turun dari semula US\$80 per barel menjadi US\$45 per barel; (c) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, melemah semula dari Rp9.400 menjadi Rp11.000 per dolar Amerika Serikat; dan (d) tingkat inflasi turun dari 6,2 persen menjadi 6,0 persen.

Sebagai implikasi dari langkah-langkah penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro, dan paket kebijakan stimulus fiskal APBN 2009 tersebut, maka volume anggaran belanja negara mengalami perubahan yang cukup signifikan, yaitu dari semula Rp1.037.067,3 miliar (19,5 persen dari PDB) dalam APBN 2009 menjadi sebesar Rp988.087,3 miliar (18,0 persen dari PDB) dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Penurunan volume anggaran belanja negara secara cukup tajam tersebut terutama berkaitan dengan perubahan yang cukup signifikan pada pagu anggaran belanja pemerintah pusat dari semula Rp716.376,3 miliar (13,4 persen dari PDB) dalam APBN 2009 menjadi sebesar Rp685.035,5 miliar (12,5 persen dari PDB) pada Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Hal ini terutama berkaitan dengan perubahan pada beban anggaran subsidi energi (subsidi BBM dan subsidi listrik) dan bunga utang, masing-masing sebagai dampak dari penurunan asumsi harga minyak mentah Indonesia dari perkiraan semula US\$80 per barel seperti ditetapkan dalam APBN 2009 menjadi US\$45 per barel, dan depresiasi nilai tukar rupiah dari Rp9.400 per dolar Amerika Serikat seperti ditetapkan dalam APBN 2009 menjadi Rp11.000 per dolar Amerika Serikat. Selain itu, penurunan volume anggaran belanja negara pada Dokumen Stimulus Fiskal 2009 juga berkaitan dengan perubahan yang cukup signifikan pada anggaran transfer ke daerah dari semula Rp320.691,0 miliar (6,0 persen dari PDB) dalam APBN 2009 menjadi sebesar Rp303.051,8 miliar (5,5 persen dari PDB) pada Dokumen Stimulus Fiskal 2009, terutama

sebagai akibat dari turunnya dana bagi hasil (DBH) pajak dan DBH sumber daya alam (SDA) migas.

Selanjutnya, seiring dengan adanya beberapa kebutuhan anggaran yang sangat mendesak untuk diakomodasikan dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai konsekuensi dan tindak lanjut dari hasil audit BPK yang menyatakan adanya kurang salur DBH pajak (PPH dan PBB), DBH SDA (migas, pertambangan umum, dan pertambangan panas bumi), serta kurang salur dana tambahan otonomi khusus infrastruktur Papua tahun 2008, sehingga terhadap anggaran belanja negara dalam tahun 2009 perlu dilakukan penyesuaian.

Sementara itu, sejalan dengan perkembangan kondisi ekonomi makro dalam triwulan I 2009, dan memperhatikan pengaruh perkembangan krisis ekonomi global terhadap arah perkembangan berbagai indikator ekonomi makro hingga akhir tahun 2009, maka terhadap asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar perhitungan perkiraan realisasi tahun 2009 perlu dilakukan penyesuaian kembali sebagai berikut: (a) pertumbuhan ekonomi turun dari 4,5 persen menjadi 4,3 persen; (b) laju inflasi turun dari 6,0 persen menjadi 5,0 persen; (c) nilai tukar (kurs) mengalami apresiasi dari Rp11.000 per US\$ menjadi Rp10.500 per US\$; dan (d) harga minyak mentah Indonesia (ICP) cenderung naik dari US\$45 per barel menjadi US\$61 per barel.

Pada sisi anggaran belanja negara, perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang berpengaruh cukup signifikan antara lain adalah apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang mengakibatkan berubahnya beban pembayaran bunga utang; dan menurunnya harga minyak mentah Indonesia yang mengakibatkan menurunnya beban subsidi, terutama subsidi energi, dan menurunnya alokasi anggaran DBH PBB migas dan DBH SDA minyak bumi pada pos transfer ke daerah.

Dengan memperhitungkan beberapa perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang berpengaruh cukup signifikan terhadap berbagai besaran belanja, adanya berbagai perubahan yang diperlukan baik pada alokasi anggaran belanja Pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, serta adanya pelaksanaan langkah-langkah kebijakan yang perlu diakomodasikan dalam mengantisipasi dampak krisis ekonomi global, maka terhadap anggaran belanja negara tahun 2009 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun Anggaran 2009 perlu dilakukan perubahan, sesuai dengan kondisi mutakhir perkembangan ekonomi domestik dan global. Berdasarkan UU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2009 anggaran belanja negara, yang semula dalam APBN 2009 direncanakan sebesar Rp1.037.067,3 miliar (19,5 persen terhadap PDB) berubah menjadi Rp1.000.843,9 miliar (18,5 persen terhadap PDB). Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp36.223,4 miliar atau 3,5 persen bila dibandingkan dengan volume anggaran belanja negara dalam APBN 2009 sebesar Rp1.037.067,3 miliar (19,5 persen terhadap PDB). Namun, bila perkiraan realisasi tersebut dibandingkan dengan volume anggaran belanja negara dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp988.087,3 miliar (18,0 persen terhadap PDB), perkiraan realisasi anggaran belanja negara dalam perkiraan realisasi 2009 tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp12.756,6 miliar, atau 1,3 persen. Sebagian besar, yaitu sekitar 69,1 persen dari jumlah anggaran belanja negara dalam APBN-P 2009 tersebut dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, sedangkan 30,9 persen lainnya dialokasikan untuk transfer ke daerah. Ringkasan alokasi anggaran belanja negara dalam APBN dan APBN-P 2009 disajikan dalam **Tabel III.1**.

Tabel III.1
Belanja Negara, Tahun 2009¹⁾
(miliar rupiah)

	APBN		Dok. Stimulus		APBN-P			
	Pagu	% thd PDB	Pagu	% thd PDB	Pagu	% thd PDB	% thd APBN	% thd Dok Stim
I. Belanja Pemerintah Pusat	716.376,3	13,4	685.035,5	12,5	691.535,8	12,8	96,5	100,9
1. Belanja Pegawai	140.197,7	2,6	140.197,7	2,6	133.709,2	2,5	95,4	95,4
2. Belanja Barang	91.731,1	1,7	95.046,0	1,7	85.464,0	1,6	93,2	89,9
3. Belanja Modal	71.991,5	1,4	79.383,0	1,4	73.381,5	1,4	101,9	92,4
4. Pembayaran Bunga Utang	101.657,8	1,9	110.635,8	2,0	109.590,1	2,0	107,8	99,1
5. Subsidi	166.701,6	3,1	123.526,1	2,3	158.117,9	2,9	94,9	128,0
6. Belanja Hibah	-	-	-	-	31,6	0,0	-	-
7. Bantuan Sosial	78.973,1	1,5	79.601,8	1,5	77.932,5	1,4	98,7	97,9
8. Belanja Lainnya	65.123,6	1,2	56.645,2	1,0	53.309,0	1,0	81,9	94,1
II. Transfer Ke Daerah	320.691,0	6,0	303.051,8	5,5	309.308,2	5,7	96,5	102,1
1. Dana Perimbangan	296.952,4	5,6	279.313,2	5,1	285.053,1	5,3	96,0	102,1
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	23.738,6	0,4	23.738,6	0,4	24.255,1	0,4	102,2	102,2
JUMLAH	1.037.067,3	19,5	988.087,3	18,0	1.000.843,9	18,5	96,5	101,3

1) Perbedaan satu angka di belakang koma dalam angka penjumlahan adalah karena pembulatan.

3.2 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Perubahan berbagai indikator ekonomi makro, perkembangan faktor-faktor internal maupun eksternal, dan langkah-langkahantisipasi yang secara khusus dilakukan Pemerintah dalam rangka memperkecil dampak negatif dari krisis ekonomi global dan secara umum ditujukan untuk mempersiapkan fondasi yang lebih kuat dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta sekaligus meletakkan dasar-dasar yang lebih kuat dan memperkokoh sendi-sendi perekonomian nasional, telah memberikan implikasi yang cukup signifikan pada perubahan volume dan komposisi anggaran belanja Pemerintah pusat dalam tahun 2009. Perubahan tersebut merupakan kombinasi yang sangat dinamis dari naiknya kebutuhan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tertentu, yang disertai dengan menurunnya alokasi anggaran belanja untuk kegiatan yang lain, baik sebagai dampak perkembangan asumsi ekonomi makro, maupun sebagai dampak kebijakan yang diambil Pemerintah.

Pertama, sebagai implikasi dari perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari rata-rata US\$80,0 per barel sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun Anggaran 2009, atau rata-rata US\$45 per barel dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 menjadi rata-rata US\$61 per barel, dan kebijakan penurunan harga jual eceran Premium dan Minyak Solar dalam negeri sejak akhir tahun 2008 dan berlanjut pada bulan Januari 2009 sejalan dengan kecenderungan penurunan harga minyak mentah di pasar dunia, maka alokasi anggaran belanja subsidi mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama berkaitan dengan berubahnya beban kebutuhan subsidi energi, baik subsidi BBM maupun subsidi listrik.

Kedua, sebagai akibat dari paket kebijakan stimulus fiskal, alokasi anggaran pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang mendapat tambahan anggaran dalam rangka stimulus fiskal, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kebijakan stimulus fiskal yang dialokasikan melalui K/L tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan

pembangunan infrastruktur padat karya di berbagai bidang, di antaranya bidang pekerjaan umum, bidang perhubungan, bidang energi, dan bidang perumahan rakyat.

Ketiga, sebagai dampak dari adanya: (a) luncheon anggaran bantuan langsung masyarakat (BLM) dalam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), seperti program pengembangan kecamatan (PPK), program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), program pengembangan infrastruktur perdesaan (PIIP), dan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus (P2DTK); (b) kelanjutan penyelesaian program/kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang hingga akhir Desember 2008 belum dapat diselesaikan, dan dilanjutkan hingga bulan April 2009; dan (c) kelanjutan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur yang dilakukan dalam tahun 2008 tetapi belum dapat diselesaikan sampai akhir Desember 2008, dan dilanjutkan hingga bulan April 2009, maka alokasi anggaran belanja beberapa K/L mengalami perubahan.

Keempat, sebagai akibat adanya perubahan pagu penggunaan PNBPN, terkait dengan adanya perubahan target penerimaan PNBPN.

Kelima, adanya perubahan pagu PHLN. K/L yang mengalami perubahan pagu PHLN antara lain adalah Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Perhubungan, Departemen Kesehatan, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.

Keenam, realokasi dana stimulus fiskal ke subsidi. Sesuai dengan kesepakatan antara Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, dana stimulus fiskal untuk Departemen Pertanian sebesar Rp650,0 miliar direalokasi ke subsidi sebesar Rp390,0 miliar, yaitu untuk subsidi benih Rp295,0 miliar dan subsidi pupuk Rp95,0 miliar.

Dengan berbagai perkembangan di atas, realisasi anggaran belanja Pemerintah pusat dalam APBN-P 2009 diperkirakan mencapai Rp691.535,8 miliar atau 12,8 persen terhadap PDB. Jumlah ini berarti Rp24.840,5 miliar atau 3,5 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja Pemerintah pusat yang ditetapkan dalam APBN tahun 2009 sebesar Rp716.376,3 miliar. Lebih rendahnya perkiraan realisasi anggaran belanja Pemerintah pusat tahun 2009 tersebut, terutama berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi belanja pegawai, belanja barang, subsidi, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Sementara itu, perkiraan realisasi belanja modal meningkat terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal dalam mengantisipasi dampak negatif krisis ekonomi global. Namun, jika dibandingkan dengan volume anggaran belanja Pemerintah pusat dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp685.035,5 miliar, perkiraan realisasi anggaran belanja Pemerintah pusat tahun 2009 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp6.500,3 miliar atau 0,9 persen. Hal ini berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi subsidi terkait dengan meningkatnya asumsi harga minyak mentah Indonesia dari sebelumnya US\$45 per barel dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 menjadi US\$61 per barel dalam perkiraan realisasi tahun 2009.

3.2.1 Perubahan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis

Dari perubahan anggaran belanja Pemerintah pusat dalam tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas, realisasi belanja pegawai dalam APBN-P 2009 diperkirakan mencapai Rp133.709,2 miliar atau 95,4 persen dari pagu anggaran belanja pegawai yang ditetapkan

dalam APBN 2009. Jumlah tersebut Rp6.488,5 miliar atau 4,6 persen lebih rendah dari pagu anggaran belanja pegawai yang ditetapkan dalam APBN 2009 dan Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp140.197,7 miliar. Lebih rendahnya perkiraan realisasi anggaran belanja pegawai dalam tahun 2009 tersebut, terutama berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi belanja gaji dan tunjangan, belanja honorarium, vakasi dan lain-lain, serta belanja kontribusi sosial. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai dalam tahun 2008 sebesar Rp112.829,9 miliar atau 91,3 persen dari pagunya dalam APBN-P, maka perkiraan realisasi daya serap anggaran belanja pegawai dalam tahun 2009 tersebut berarti mengalami peningkatan sekitar 4,1 persen.

Perkiraan realisasi belanja pegawai dalam tahun 2009 tersebut, selain dipengaruhi oleh daya serap anggaran belanja masing-masing K/L, juga berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan dalam rangka memperbaiki penghasilan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri dan para pensiunan dalam tahun 2009, seperti kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok sebesar 15 persen, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, perluasan cakupan pelayanan kesehatan dengan pemberian subsidi/bantuan bagi penderita penyakit katastrofi, serta kebijakan perbaikan *sharing* beban APBN untuk pembayaran pensiun menjadi 100 persen beban APBN. Di samping itu, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen) yang mulai berlaku efektif sejak bulan April 2009, maka dalam perkiraan realisasi tahun 2009 telah dialokasikan anggaran untuk Jamkesmen sebesar Rp25,5 miliar.

Dalam APBN-P 2009, realisasi anggaran belanja gaji dan tunjangan diperkirakan mencapai Rp70.000,9 miliar, yang berarti Rp162,5 miliar (0,2 persen) lebih rendah dari pagu anggaran belanja gaji dan tunjangan yang ditetapkan dalam APBN 2009 dan Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp70.163,3 miliar. Hal ini terutama berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi anggaran gaji untuk pegawai baru, yang semula dialokasikan untuk menampung 100 ribu pegawai baru, namun realisasinya diperkirakan hanya mencapai 50 ribu pegawai baru. Sementara itu, realisasi anggaran belanja honorarium, vakasi, dan lain-lain dalam tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp13.803,2 miliar, yang berarti Rp5.197,1 miliar atau sekitar 27,4 persen lebih rendah dari pagu anggaran belanja honorarium, vakasi, dan lain-lain yang ditetapkan dalam APBN 2009 maupun dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, sebesar Rp19.000,3 miliar. Lebih rendahnya perkiraan realisasi anggaran belanja honorarium, vakasi, dan lain-lain dalam tahun 2009 tersebut, terutama berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi anggaran pada pos belanja pegawai transito. Sejalan dengan itu, realisasi anggaran belanja kontribusi sosial dalam tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp49.905,1 miliar, yang berarti Rp1.129,0 miliar atau sekitar 2,2 persen lebih rendah dari pagu anggaran belanja kontribusi sosial yang ditetapkan dalam APBN 2009 dan Dokumen Stimulus Fiskal 2009, sebesar Rp51.034,1 miliar. Lebih rendahnya perkiraan realisasi anggaran belanja kontribusi sosial dalam tahun 2009 tersebut, terutama berkaitan dengan perkiraan tidak terserapnya sebagian anggaran cadangan kontribusi sosial.

Sementara itu, realisasi anggaran belanja barang dalam APBN-P 2009 diperkirakan mencapai Rp85.464,0 miliar, atau menyerap 93,2 persen dari pagunya dalam APBN 2009, atau 89,9 persen dari pagunya dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Jumlah tersebut Rp6.267,1 miliar atau 6,8 persen lebih rendah dari pagu alokasi anggaran belanja

barang yang dianggarkan dalam APBN 2009 sebesar Rp91.731,1 miliar, dan Rp9.581,9 miliar atau 10,1 persen lebih rendah dari pagu alokasi belanja barang dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp95.046,0 miliar. Lebih rendahnya perkiraan realisasi anggaran belanja barang dalam tahun 2009 tersebut, selain dipengaruhi oleh tercapainya perbaikan efisiensi penggunaan anggaran belanja barang, terutama belanja pemeliharaan dan perjalanan, juga berkaitan dengan kemampuan penyerapan anggaran dari setiap K/L terhadap belanja barang. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja barang dalam tahun 2008 sebesar Rp55.963,5 miliar (82,9 persen dari pagunya dalam APBN-P), maka perkiraan realisasi anggaran belanja barang dalam tahun 2009 tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp29.500,5 miliar atau sekitar 52,7 persen. Hal lain yang juga mempengaruhi perkiraan realisasi anggaran belanja barang dalam tahun 2009 adalah perkembangan jumlah dan jenis kegiatan yang membutuhkan dukungan pembiayaan operasional dan pemeliharaan. Dari jumlah perkiraan realisasi anggaran belanja barang dalam tahun 2009 tersebut, realisasi belanja barang untuk kegiatan operasional diperkirakan mencapai Rp50.473,9 miliar, atau 0,4 persen lebih tinggi dari pagu alokasi anggaran belanja barang yang ditetapkan dalam APBN 2009. Sementara itu, realisasi anggaran belanja jasa dan belanja pemeliharaan dalam tahun 2009 diperkirakan masing-masing mencapai Rp11.907,0 miliar dan Rp6.140,5 miliar, atau masing-masing lebih rendah 9,6 persen dan 17,9 persen dari pagu alokasi anggaran belanja jasa dan belanja pemeliharaan yang ditetapkan dalam APBN 2009. Selain itu, realisasi anggaran belanja perjalanan diperkirakan mencapai Rp12.736,2 miliar, yang berarti lebih rendah 17,9 persen dari pagu alokasi belanja perjalanan yang ditetapkan dalam APBN 2009.

Di lain pihak, realisasi anggaran belanja modal dalam APBN-P 2009 diperkirakan mencapai Rp73.381,5 miliar, yang berarti Rp1.390,0 miliar, atau 1,9 persen lebih tinggi dari pagu alokasi anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBN 2009 sebesar Rp71.991,5 miliar. Lebih tingginya perkiraan realisasi anggaran belanja modal dalam tahun 2009 tersebut, berkaitan dengan tambahan alokasi dana stimulus fiskal untuk infrastruktur. Namun demikian, bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja modal dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp79.383,0 miliar, maka perkiraan realisasi anggaran belanja modal dalam tahun 2009 tersebut Rp6.001,5 miliar atau 7,6 persen lebih rendah. Hal ini berkaitan dengan kemampuan penyerapan anggaran belanja modal dari masing-masing K/L. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal dalam tahun 2008 sebesar Rp72.772,5 miliar (92,0 persen dari pagunya dalam APBN-P), maka perkiraan realisasi anggaran belanja modal dalam tahun 2009 tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp609,0 miliar atau 0,8 persen. Peningkatan penyerapan anggaran belanja modal dalam tahun 2009 tersebut terutama berkaitan dengan semakin membaiknya proses pengadaan barang dan jasa pada berbagai instansi pemerintah (K/L).

Selanjutnya, pembayaran bunga utang yang merupakan dampak dari penggunaan utang dalam pembiayaan APBN, dapat dibagi dalam dua komponen sebagai berikut:

1. Utang dalam negeri, adalah utang Pemerintah dalam mata uang rupiah yang sebagian besar komponennya terdiri atas surat berharga negara (SBN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*) maupun tidak diperdagangkan (*non-tradable*), sedangkan komponen lainnya adalah pinjaman dalam negeri yang saat ini belum dapat

dimanfaatkan oleh Pemerintah, mengingat peraturan operasional pada saat ini sedang dalam tahap penyusunan.

2. Utang luar negeri, adalah utang Pemerintah dalam mata uang asing yang komponen penyusunannya terdiri dari utang dalam bentuk pinjaman luar negeri baik multilateral maupun bilateral, dan SBN yang diterbitkan di luar negeri.

Beban pembayaran bunga utang dalam APBN, antara lain dipengaruhi oleh asumsi-asumsi ekonomi makro, terutama asumsi nilai tukar rupiah dan suku bunga SBI tiga bulan rata-rata. Asumsi makro APBN 2009 untuk nilai tukar IDR/USD sebesar Rp9.400 dan suku bunga mengikuti rata-rata tingkat bunga SBI tiga bulan rata-rata sebesar 7,5 persen. Asumsi nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang untuk SBN valas dan pinjaman dalam mata uang asing, sedangkan asumsi rata-rata tingkat bunga SBI tiga bulan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang SBN domestik, terutama SBN yang memiliki kupon variabel. Pagu alokasi anggaran pembayaran bunga utang pada APBN 2009 untuk utang dalam negeri/pembayaran bunga SBN domestik sebesar Rp69.340,0 miliar, sedangkan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp32.317,8 miliar (dengan rincian bunga pinjaman luar negeri sebesar Rp22.730,0 miliar dan bunga SBN valas sebesar Rp9.587,8 miliar).

Gejolak perekonomian global mengakibatkan Pemerintah harus menyesuaikan kembali anggarannya dengan terlebih dahulu merevisi asumsi-asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan APBN. Asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan proyeksi pembayaran bunga utang dalam perkiraan realisasi tahun 2009 adalah asumsi nilai tukar IDR/USD sebesar Rp10.500 dan asumsi tingkat bunga SBI tiga bulan rata-rata sebesar 7,5 persen. Berdasarkan asumsi tersebut, pagu alokasi pembayaran bunga utang domestik yang seluruhnya merupakan SBN domestik mengalami peningkatan sebesar Rp1.359,4 miliar (2,0 persen), yaitu dari semula Rp69.340,0 miliar dalam APBN tahun 2009 menjadi Rp70.699,4 miliar dalam APBN-P 2009. Sementara itu, pembayaran bunga utang luar negeri yang semula dianggarkan sebesar Rp32.317,8 miliar berubah menjadi Rp38.890,7 miliar dalam APBN-P 2009 (dengan rincian bunga pinjaman luar negeri berubah dari Rp22.730,0 miliar menjadi Rp25.505,2 miliar, sedangkan pembayaran bunga SBN valas berubah dari Rp9.587,8 miliar menjadi Rp13.385,5 miliar). Dengan berbagai perkembangan tersebut, secara keseluruhan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang dalam APBN-P 2009 meningkat sebagai akibat perubahan asumsi ekonomi makro, yaitu dari semula Rp101.657,8 miliar menjadi Rp109.590,1 miliar.

Anggaran belanja subsidi mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam tahun 2009, terutama berkaitan dengan beban kebutuhan subsidi energi, baik subsidi BBM maupun subsidi listrik akibat perubahan harga minyak mentah dunia. Perkembangan harga minyak mentah dunia periode akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009 mengalami penurunan, sehingga menimbulkan dampak pada anggaran subsidi energi. Pada bulan Januari 2009, Pemerintah menurunkan harga jual eceran Premium dan Minyak Solar. Perubahan harga minyak mentah di pasar dunia selama tahun 2009 juga berdampak pada perkiraan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada APBN-P 2009 yang diproyeksikan rata-rata US\$61 per barel, atau lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi harga minyak yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan APBN 2009 sebesar US\$80 per barel, tetapi lebih tinggi bila dibandingkan dengan asumsi harga minyak dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar US\$45 per barel.

Berdasarkan perubahan asumsi tersebut, rincian belanja subsidi dalam tahun 2009 dapat diikuti pada **Tabel III.2**.

Uraian	APBN	% thd PDB	Dok Stimulus	% thd PDB	APBN-P	% thd PDB	% Thd APBN	% Thd Dok Stimulus
Subsidi	166.701,6	3,1	123.526,1	2,3	158.117,9	2,9	94,9	128,0
a. Energi	103.568,6	1,9	67.017,1	1,2	99.938,9	1,8	96,5	149,1
1) Subsidi BBM	57.605,0	1,1	24.517,1	0,4	52.392,4	1,0	91,0	213,7
2) Subsidi Listrik	45.963,7	0,9	42.500,0	0,8	47.546,5	0,9	103,4	111,9
b. Non Energi	63.133,0	1,2	56.509,0	1,0	58.179,0	1,1	92,2	103,0
1) Subsidi Pangan	12.987,0	0,2	12.987,0	0,2	12.987,0	0,2	100,0	100,0
2) Subsidi Pupuk	17.537,0	0,3	17.537,0	0,3	18.532,0	0,3	105,7	105,7
3) Subsidi Benih	1.315,4	0,0	1.315,4	0,0	1.610,4	0,0	122,4	122,4
4) PSO	1.360,0	0,0	1.360,0	0,0	1.360,0	0,0	100,0	100,0
5) Kredit Program	4.683,6	0,1	4.709,5	0,1	4.709,5	0,1	100,6	100,0
6) Subsidi Pajak	25.250,0	0,5	18.250,0	0,3	18.630,0	0,3	73,8	102,1
7) Subsidi Obat Generik	-	-	350,0	0,0	350,0	0,0	-	100,0

Sebagai upaya untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan, maka alokasi anggaran belanja subsidi dalam APBN-P 2009 perlu dilakukan penyesuaian, sehingga diperkirakan mencapai Rp158.117,9 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar Rp8.583,8 miliar atau 5,1 persen apabila dibandingkan dengan anggaran subsidi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2009 sebesar Rp166.701,6 miliar, atau meningkat Rp34.591,8 miliar atau 28,0 persen apabila dibandingkan dengan Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp123.526,1 miliar. Perubahan yang sangat signifikan pada anggaran belanja subsidi tersebut, terutama berkaitan dengan perubahan beban subsidi BBM dan subsidi listrik.

Meningkatnya perkiraan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari US\$45 per barel pada Dokumen Stimulus Fiskal 2009 menjadi US\$61 per barel pada APBN-P 2009 membawa dampak yang cukup signifikan terhadap meningkatnya beban subsidi BBM dan subsidi listrik. Untuk mengurangi beban tersebut, dalam tahun 2009 akan dilakukan langkah-langkah kebijakan penghematan beban subsidi BBM. Dengan berbagai langkah tersebut, beban subsidi BBM dalam APBN-P 2009 diperkirakan menjadi Rp52.392,4 miliar. Jumlah ini berarti 9,0 persen lebih rendah dari pagu anggaran subsidi BBM yang ditetapkan dalam APBN 2009 sebesar Rp57.605,0 miliar, tetapi sekitar 113,7 persen lebih tinggi dari pagu alokasi anggaran subsidi BBM dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp24.517,1 miliar. Jumlah tersebut telah memperhitungkan sebagian kekurangan pembayaran subsidi BBM dan LPG tahun 2008, dan dapat terlaksananya program konversi minyak tanah ke LPG. Apabila dibandingkan dengan realisasi subsidi BBM dalam tahun 2008 sebesar Rp139.106,7 miliar, perkiraan beban anggaran subsidi BBM dalam APBN-P 2009 tersebut lebih rendah sebesar Rp86.714,3 miliar atau 62,3 persen. Lebih rendahnya beban subsidi BBM tahun 2009 dibandingkan tahun 2008 disebabkan oleh lebih rendahnya perkiraan harga minyak mentah Indonesia dari US\$95 per barel pada tahun 2008 menjadi US\$61 per barel pada tahun 2009.

Sementara itu, beban subsidi listrik dalam APBN-P 2009 diperkirakan mencapai Rp47.546,5 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp1.582,8 miliar atau 3,4 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran subsidi listrik yang ditetapkan dalam APBN 2009 sebesar Rp45.963,7 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp5.046,5 miliar atau 11,9 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp42.500,0 miliar. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi subsidi listrik dalam tahun 2008 sebesar Rp83.906,5 miliar, perkiraan beban anggaran subsidi listrik dalam APBN-P 2009 tersebut berarti mengalami penurunan sebesar Rp36.360,0 miliar, atau 43,3 persen. Penurunan beban anggaran subsidi listrik tahun 2009 tersebut, berkaitan dengan penurunan biaya pokok produksi listrik sebagai akibat dari menurunnya asumsi harga minyak dari US\$95 per barel menjadi US\$61 per barel, serta bertambahnya volume pemakaian bahan bakar gas untuk pembangkit tenaga listrik.

Jenis subsidi lainnya yang diperkirakan mengalami perubahan dalam APBN-P 2009 adalah subsidi pupuk, yang dalam keseluruhan tahun 2009, bebannya diperkirakan mencapai Rp18.532,0 miliar, yang berarti naik Rp995,0 miliar atau 5,7 persen dari pagu anggaran subsidi pupuk yang ditetapkan dalam APBN 2009 dan Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp17.537,0 miliar. Lebih tingginya perkiraan beban anggaran subsidi pupuk dari pagunya dalam APBN 2009 dan Dokumen Stimulus Fiskal 2009 tersebut, terutama berkaitan dengan pembayaran kekurangan pembayaran subsidi pupuk tahun 2008 berdasarkan hasil audit BPK sebesar Rp900,0 miliar, dan realokasi anggaran dari Dokumen Stimulus Fiskal 2009 untuk Departemen Pertanian ke subsidi pupuk sebesar Rp95,0 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran subsidi pupuk dalam tahun 2008 sebesar Rp15.181,5 miliar, maka perkiraan beban anggaran subsidi pupuk tahun 2009 tersebut lebih tinggi sebesar Rp3.350,5 miliar atau 22,1 persen.

Subsidi benih juga diperkirakan mengalami perubahan dalam keseluruhan tahun 2009, bebannya dalam APBN-P 2009 diperkirakan mencapai Rp1.610,4 miliar, yang berarti naik Rp295,0 miliar atau meningkat 22,4 persen dari pagu anggaran subsidi benih yang ditetapkan dalam APBN 2009 dan Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp1.315,4 miliar. Lebih tingginya perkiraan beban anggaran subsidi benih dari pagunya dalam APBN 2009 dan Dokumen Stimulus Fiskal 2009 tersebut, terutama berkaitan dengan realokasi anggaran dari Dokumen Stimulus Fiskal 2009 Departemen Pertanian ke subsidi benih sebesar Rp295,0 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran subsidi benih dalam tahun 2008 sebesar Rp985,2 miliar, maka perkiraan beban anggaran subsidi benih tahun 2009 tersebut lebih tinggi sebesar Rp652,2 miliar atau 63,5 persen.

Selanjutnya, pemberlakuan pajak DTP dalam pelaksanaan APBN bersifat *in-out*, dalam arti, di sisi pendapatan akan tercatat sebagai penerimaan perpajakan, sementara di sisi belanja tercatat sebagai belanja subsidi pajak. Pengalokasian dan penganggaran pajak DTP dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Misalnya, pajak DTP atas PPh bunga obligasi internasional diberikan karena sesuai dengan peraturan perpajakan, PPh WP luar negeri yang membeli obligasi ditanggung Pemerintah. Demikian pula dengan pajak DTP atas PPN BBM bersubsidi, yang dialokasikan untuk menanggung selisih PPN antara harga patokan dan harga jual eceran BBM, berkaitan dengan perubahan perhitungan subsidi BBM dari *cost and fee* menjadi pola *public service obligation* (PSO) sejak tahun anggaran 2006, besaran subsidi BBM dihitung dari selisih antara harga patokan dengan harga jual eceran BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah

setelah dikurangi dengan PPN dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Harga patokan BBM tersebut dikaitkan dengan harga pasar internasional (*MOPS-Mid Oil Plats Singapore*) ditambah dengan biaya distribusi dan margin. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, PPN seharusnya dihitung berdasarkan harga patokan. Dengan demikian, terdapat kekurangan pembayaran PPN atas penjualan BBM bersubsidi yang harus menjadi tanggung jawab Pemerintah, mengingat pemberian subsidi BBM merupakan kebijakan Pemerintah.

Dalam APBN-P 2009, beban anggaran subsidi pajak (*tax expenditure*) diperkirakan akan mencapai Rp18.630,0 miliar, berarti mengalami penurunan sebesar Rp6.620,0 miliar atau 26,2 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2009 sebesar Rp25.250,0 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp380,0 miliar atau 2,1 persen dari alokasi anggaran subsidi pajak yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp18.250,0 miliar. Lebih tingginya perkiraan realisasi subsidi pajak tahun 2009 karena adanya tambahan jenis PPh DTP baru, yaitu untuk Program *Tropical Forest Conservation Act (TFCA)* sebesar Rp80,0 miliar dan subsidi untuk penerbitan sukuk dan *samurai bond* sebesar Rp300,0 miliar. Jumlah subsidi pajak dalam APBN-P 2009 terdiri atas (1) subsidi pajak atas pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp9.130,0 miliar, (2) subsidi pajak atas pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp6.500,0 miliar, (3) subsidi pajak atas bea masuk sebesar Rp2.500,0 miliar, dan (4) subsidi atas BPHTB sebesar Rp500,0 miliar. Subsidi pajak atas PPh merupakan bentuk lain dari PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP), terdiri atas (1) PPh DTP atas panas bumi sebesar Rp800,0 miliar, (2) PPh DTP atas bunga obligasi internasional sebesar Rp1.200,0 miliar, (3) PPh DTP Pasal 25/29 badan (eksklusivitas PT Telkom) sebesar Rp250,0 miliar, (4) PPh DTP Pasal 21 sebesar Rp6.500,0 miliar, (5) PPh Program *Tropical Forest Conservation Act (TFCA)* sebesar Rp80,0 miliar, dan (6) PPh untuk penerbitan sukuk dan *samurai bond* Rp300,0 miliar. Sementara itu, subsidi pajak atas PPN terdiri atas (1) PPN DTP atas penyerahan BBM dalam negeri bersubsidi sebesar Rp3.000,0 miliar, (2) PPN DTP minyak goreng sebesar Rp800,0 miliar, (3) PPN DTP Bahan Bakar Nabati sebesar Rp200,0 miliar, dan (4) pemberian fasilitas PPN Impor atas kegiatan Eksplorasi (PDRI-PMK Nomor 178 Tahun 2007) sebesar Rp2.500,0 miliar. Untuk subsidi pajak DTP bea masuk dalam tahun 2009 diperkirakan sebesar Rp2.500,0 miliar dan subsidi pajak untuk BPHTB sebesar Rp500,0 miliar.

Realisasi anggaran belanja bantuan sosial dalam APBN-P 2009 diperkirakan mencapai Rp77.932,5 miliar, yang berarti mencapai 98,7 persen dari pagu anggaran belanja bantuan sosial yang ditetapkan dalam APBN 2009 sebesar Rp78.973,1 miliar, atau mencapai 97,9 persen dari Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp79.601,8 miliar. Lebih rendahnya perkiraan realisasi anggaran bantuan sosial dalam tahun 2009 tersebut, terutama berkaitan dengan kemampuan penyerapan K/L dalam memanfaatkan alokasi belanja bantuan sosial. Namun, apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja bantuan sosial dalam tahun 2008 sebesar Rp57.740,8 miliar (96,7 persen dari pagunya dalam APBN-P), perkiraan realisasi daya serap belanja bantuan sosial dalam tahun 2009 tersebut berarti mengalami peningkatan penyerapan.

Dari perkiraan realisasi anggaran belanja bantuan sosial dalam tahun 2009 tersebut, realisasi anggaran bantuan sosial yang dialokasikan kepada K/L diperkirakan mencapai Rp74.932,5 miliar, yang berarti 1,4 persen lebih rendah dari pagu alokasi anggaran belanja

bantuan sosial K/L yang ditetapkan dalam APBN 2009. Sementara itu, realisasi dana cadangan penanggulangan bencana dalam tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp3.000,0 miliar yang berarti sama dengan pagunya dalam APBN 2009.

Di sisi lain, realisasi anggaran belanja lain-lain dalam APBN-P 2009 diperkirakan mencapai Rp53.309,0 miliar, yang berarti Rp11.814,5 miliar atau 18,1 persen lebih rendah dari pagu anggaran belanja lain-lain yang ditetapkan dalam APBN 2009 sebesar Rp65.123,5 miliar. Demikian pula, bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja lain-lain dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp56.645,2 miliar, perkiraan realisasi anggaran belanja lain-lain dalam APBN-P 2009 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.336,2 miliar (5,9 persen). Perubahan alokasi anggaran belanja lain-lain dalam tahun 2009 tersebut terutama disebabkan oleh turunnya dana cadangan risiko fiskal. Selain itu, perubahan anggaran belanja lain-lain tersebut juga disebabkan oleh ditampungnya tambahan alokasi anggaran untuk beberapa kegiatan prioritas, seperti Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRH), dan luncuran kegiatan Pemilu 2008.

Dalam APBN 2009, Pemerintah telah mengalokasikan dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp15.765,0 miliar, yang digunakan untuk mengantisipasi risiko perubahan asumsi ekonomi makro sebesar Rp11.765,0 miliar, risiko penerimaan perpajakan nonmigas sebesar Rp2.000,0 miliar, dan untuk risiko kenaikan harga tanah sebesar Rp2.000,0 miliar. Tingginya alokasi anggaran untuk risiko asumsi ekonomi makro tersebut terutama berkaitan dengan ketidakpastian perkembangan harga minyak mentah di pasaran internasional pada saat APBN 2009 disusun. Akan tetapi, berdasarkan perkembangan realisasi berbagai indikator ekonomi makro sampai dengan semester I tahun 2009 yang cukup stabil, dan perkembangan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, maka diperkirakan bahwa risiko dari perubahan berbagai asumsi ekonomi makro dan risiko atas kenaikan harga tanah tidak sebesar seperti yang diperkirakan semula. Dengan demikian, dana cadangan risiko fiskal tersebut diperkirakan hanya terealisasi sebesar Rp1.000,0 miliar yaitu untuk risiko kenaikan harga tanah (*land capping*) terkait dukungan Pemerintah terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur.

Sementara itu, tambahan alokasi dana GNRH/Gerhan diperkirakan mencapai sebesar Rp394,0 miliar, berasal dari luncuran kegiatan Gerhan yang tidak terealisasi pada tahun 2008. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi, antara lain untuk pemeliharaan tanaman reboisasi yang telah dilakukan melalui kontrak *multiyears* tahun 2007 pada 255 satuan kerja. Sebagian besar pelaksanaan kegiatan tersebut telah selesai dilakukan oleh pihak ketiga pelaksana reboisasi Gerhan.

Perubahan anggaran belanja lain-lain dalam APBN-P 2009 juga menampung tambahan anggaran untuk luncuran kegiatan Pemilu tahun 2008 sebesar Rp2.854,3 miliar. Tambahan anggaran untuk luncuran kegiatan Pemilu tersebut merupakan kegiatan persiapan Pemilu yang belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2008, sehingga dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun 2009, dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemilu tahun 2009.

Realisasi belanja hibah dalam APBN-P 2009 diperkirakan mencapai Rp31,6 miliar, yang berarti meningkat Rp31,6 miliar dari pagu anggaran belanja hibah yang tidak dialokasikan dalam APBN 2009. Lebih tingginya perkiraan realisasi anggaran belanja hibah dalam tahun 2009 tersebut, dikarenakan adanya penerusan hibah ke daerah, yang berasal dari hibah Uni Eropa/ *World Bank* untuk *basic education capacity trust fund* sebesar Rp22,5

miliar, yang sebelumnya sudah teralokasi pada pagu Departemen Pendidikan Nasional, dan hibah ke daerah untuk *community health services project* sebesar Rp9,1 miliar yang bersumber dari Uni Eropa/WHO.

3.2.2 Perubahan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Secara garis besar, anggaran belanja Pemerintah pusat menurut organisasi dibedakan atas: (a) belanja Pemerintah pusat yang dikelola oleh K/L, dan (b) belanja Pemerintah pusat yang dikelola oleh bendahara umum negara (BA-BUN). Dalam APBN-P 2009, realisasi anggaran belanja Pemerintah pusat yang dikelola oleh K/L diperkirakan mencapai Rp314.716,9 miliar. Jumlah ini berarti Rp7.600,5 miliar atau 2,4 persen lebih rendah dari pagu anggaran belanja K/L yang ditetapkan dalam APBN 2009 sebesar Rp322.317,4 miliar, atau lebih rendah Rp18.935,5 miliar (5,7 persen) dari pagu alokasi anggaran belanja K/L dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp333.652,4 miliar. Perkiraan realisasi tersebut merupakan hasil analisis teknikal berdasarkan rata-rata tahun sebelumnya yang dianggap sebagai daya serap alami (natural) dan tidak berpengaruh terhadap pagu masing-masing K/L yang sudah dialokasikan kepada K/L dalam APBN 2009. Perkiraan realisasi yang kurang dari 100 persen mengimplikasikan daya serap alami, bukan pemotongan pagu. Perubahan anggaran belanja K/L tersebut selain berhubungan dengan daya serap alamiah anggaran dari masing-masing K/L, juga berkaitan dengan tambahan alokasi anggaran dalam kerangka kebijakan stimulus fiskal, perubahan pagu PHLN dan penggunaan PNBPN, dan adanya lunjuran PNPM. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapan belanja K/L dalam tahun 2008 sebesar Rp259.701,9 miliar (89,5 persen dari pagunya dalam APBN-P 2008), perkiraan realisasi penyerapan anggaran belanja K/L dalam tahun 2009 tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar 4,5 persen.

Dengan mengasumsikan bahwa pagu belanja K/L akan terserap 100 persen (termasuk tambahan alokasi anggaran stimulus fiskal), ditambah dengan perubahan-perubahan yang telah disebutkan di atas, pagu belanja K/L dalam tahun 2009 diperkirakan Rp334.575,7 miliar, atau 100,3 persen dari pagu belanja K/L dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009.

Kebijakan stimulus fiskal pada tahun 2009 pada dasarnya merupakan salah satu instrumen kebijakan anti-siklis (*counter-cyclical policies*) yang dirancang untuk meredam atau mengantisipasi dampak krisis ekonomi global dengan cara memperkuat permintaan agregat untuk mendorong peningkatan kinerja ekonomi makro. Kunci bagi keberhasilan stimulus fiskal yang dirancang baik adalah pelaksanaan stimulus fiskal dijamin tepat waktu (*timely*), bersifat sementara (*temporary*), dan tepat sasaran (*targeted*). Efektivitas dari kebijakan stimulus fiskal dalam merespon dampak krisis ekonomi global selain sangat ditentukan oleh berbagai faktor eksternal dan internal, juga sangat dipengaruhi oleh dampak multiplikasi (*multiplier effects*) dari kebijakan tersebut. Semakin tinggi *multiplier effect*, maka akan semakin besar dan semakin efektif pula dampak positif dari kebijakan stimulus fiskal.

Kebijakan stimulus fiskal yang dirancang untuk merespon imbas dan dampak dari krisis ekonomi global tersebut ditujukan antara lain untuk: (a) menjaga tingkat konsumsi

masyarakat dengan meningkatkan daya beli masyarakat antara lain melalui: penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP), kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), kenaikan gaji PNS/TNI-Polri, termasuk guru/dosen/pensiunan dan tunjangan veteran, peningkatan alokasi belanja sosial dan subsidi langsung ke rumah tangga sasaran dalam APBN 2009; (b) memperbaiki daya saing dan daya tahan sektor usaha antara lain melalui penurunan tarif PPh badan, pajak dan bea masuk (BM) ditanggung Pemerintah (DTP), subsidi energi dan air bersih, kenaikan volume penjaminan kredit usaha rakyat (KUR), penurunan tarif PPh Pasal 21/25; dan (c) menangani dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) antara lain melalui peningkatan belanja infrastruktur, program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), dan balai latihan kerja (BLK).

Pada anggaran belanja Pemerintah pusat, dana stimulus fiskal untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi global yang dialokasikan melalui K/L terutama bertujuan untuk penciptaan kesempatan kerja, serta penyerapan dampak PHK yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur padat karya di berbagai bidang. Bidang-bidang yang memperoleh alokasi dana stimulus fiskal tersebut antara lain adalah bidang pekerjaan umum, bidang perhubungan, bidang energi, dan bidang perumahan rakyat.

Agar secara optimal dapat mencapai tujuan seperti yang telah ditetapkan di atas, maka anggaran stimulus fiskal yang dialokasikan melalui belanja K/L tersebut diarahkan untuk melaksanakan program-program yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: (1) mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan; (2) hasilnya seketika dan dapat diselesaikan dalam tahun 2009; (3) memenuhi sasaran Inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009; (4) melengkapi sistem jaringan infrastruktur agar lebih efisien; (5) merupakan bagian dari rencana strategis pemerintah; (6) sudah memiliki desain atau dapat menyiapkan desain secara cepat; (7) tidak tersangkut dengan masalah tanah; dan (8) dipastikan dapat diserap pada tahun 2009.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut di atas, K/L yang mendapat alokasi tambahan dana stimulus fiskal tahun 2009 adalah: (1) Departemen Pekerjaan Umum Rp6.601,2 miliar; (2) Departemen Perhubungan Rp2.198,8 miliar; (3) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Rp500,0 miliar; (4) Kementerian Negara Perumahan Rakyat Rp400,0 miliar; (5) Departemen Kelautan dan Perikanan Rp100 miliar; (6) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp300,0 miliar; (7) Departemen Kesehatan Rp150,0 miliar; (8) Departemen Perdagangan Rp335,0 miliar; (9) Kementerian Negara Koperasi dan UKM Rp100,0 miliar; serta (10) Departemen Pertanian Rp650,0 miliar.

Untuk Departemen Pertanian, alokasi anggaran stimulus tersebut sesuai dengan kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah, sebagian direalokasi ke subsidi pupuk dan subsidi benih masing-masing sebesar Rp95,0 miliar dan Rp295,0 miliar. Sehingga dana stimulus fiskal Departemen Pertanian dalam APBN-P 2009 adalah sebesar Rp260,0 miliar.

Selain dana stimulus fiskal, postur belanja K/L dalam APBN-P juga dipengaruhi oleh perubahan pagu penggunaan PNBPN dan PHLN. Departemen-departemen yang mengalami perubahan pagu penggunaan PNBPN adalah (1) Sekretariat Negara; (2) Departemen Luar Negeri; (3) Departemen Hukum dan HAM; (4) Departemen Keuangan; (5) Departemen Pertanian; (6) Departemen Perhubungan; (7) Departemen Pendidikan Nasional; (8) Departemen Kesehatan; (9) Departemen Agama;

(10) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (11) Departemen Sosial; (12) Departemen Kehutanan; (13) Departemen Pekerjaan Umum; (14) Badan Pertanahan Nasional; (15) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; (16) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; (17) Badan Tenaga Nuklir Nasional; (18) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; (19) Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional; (20) Lembaga Administrasi Negara; dan (21) Departemen Perdagangan. Sedangkan departemen-departemen yang mengalami perubahan pagu PHLN adalah (1) Departemen Perhubungan; (2) Departemen Pendidikan Nasional; (3) Departemen Kesehatan; (4) Departemen Komunikasi dan Informatika; (5) Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang telah dan akan ditempuh Pemerintah dalam pelaksanaan stimulus fiskal, dan pemberian dukungan terhadap program dan kegiatan prioritas tersebut, maka dalam proyeksi anggaran belanja K/L dalam APBN-P 2009 terdapat 10 K/L yang realisasi anggarannya diperkirakan lebih tinggi dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2009. Kesepuluh K/L tersebut yaitu: (1) Kementerian Negara Perumahan Rakyat (39,7 persen lebih tinggi dari pagunya); (2) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (18,4 persen lebih tinggi dari pagunya); (3) Departemen Perdagangan (13,0 persen lebih tinggi dari pagunya); (4) Departemen Pekerjaan Umum (11,6 persen lebih tinggi dari pagunya); (5) Departemen Perhubungan (9,6 persen lebih tinggi dari pagunya); (6) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (9,5 persen lebih tinggi dari pagunya); (7) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (6,7 persen lebih tinggi dari pagunya); (8) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (4,3 persen lebih tinggi dari pagunya); (9) Departemen Komunikasi dan Informatika (4,1 persen lebih tinggi dari pagunya); dan (10) Kementerian Negara Koperasi dan UKM (0,9 persen lebih tinggi dari pagunya).

Kementerian negara/lembaga yang mendapat alokasi anggaran tambahan dalam rangka stimulus fiskal adalah sebagai berikut.

Departemen Pekerjaan Umum

Anggaran belanja Departemen Pekerjaan Umum diarahkan untuk mendukung upaya mewujudkan tersedianya infrastruktur yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dalam tahun 2009, pagu anggaran belanja Departemen Pekerjaan Umum adalah sebesar Rp41.619,6 miliar. Dengan asumsi daya serapnya hanya 93,8 persen dari pagunya tahun 2009, maka realisasi anggaran Departemen Pekerjaan Umum diperkirakan mencapai Rp39.056,9 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp4.069,5 miliar (11,6 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Departemen Pekerjaan Umum yang ditetapkan dalam APBN 2009 sebesar Rp34.987,5 miliar. Namun, apabila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja Departemen Pekerjaan Umum dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp41.588,7 miliar, maka perkiraan realisasi anggaran belanja Departemen Pekerjaan Umum tahun 2009 tersebut mengalami penurunan Rp2.531,7 miliar atau 6,1 persen. Perkiraan realisasi penyerapan anggaran Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 2009 tersebut relatif sama dengan realisasi penyerapan anggaran Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 2008 sebesar Rp30.670,0 miliar (93,5 persen dari pagunya dalam APBN-P). Lebih tingginya perkiraan realisasi anggaran belanja Departemen

Pekerjaan Umum dalam tahun 2009 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN 2009 tersebut terutama berkaitan dengan tambahan anggaran stimulus fiskal untuk pembangunan infrastruktur padat karya yang dialokasikan pada Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp6.601,2 miliar.

Tambahan alokasi anggaran dalam rangka stimulus fiskal tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan sebelas program, yaitu: (1) program penataan ruang Rp15,0 miliar; (2) program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rp2.035,4 miliar; (3) program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan Rp1.470,4 miliar; (4) program pengembangan ekonomi lokal Rp65,4 miliar; (5) program pengembangan perumahan Rp44,0 miliar; (6) program pemberdayaan komunitas perumahan Rp108,5 miliar; (7) program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Rp450,0 miliar; (8) program pengembangan wilayah perbatasan Rp25,0 miliar; (9) program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya Rp1.697,4 miliar; (10) program pengendalian banjir dan pengamanan pantai Rp685,0 miliar; dan (11) program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Rp5,0 miliar.

Pada program penataan ruang, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rencana tata ruang (RTR) pulau, RTR wilayah nasional, RTR wilayah propinsi, dan RTR kabupaten/kota. Sementara itu, alokasi anggaran pada program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan akan digunakan untuk: (1) kegiatan rehabilitasi jalan nasional; (2) rehabilitasi jembatan ruas jalan nasional; (3) pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi; dan (4) pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten dan kota. Sementara itu, pada program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan: (1) pembinaan/koordinasi/pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; (2) pembinaan manajemen kebinamargaan; (3) perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan; (4) pembangunan *flyover*; (5) peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan lintas dan non lintas; (6) pembangunan jalan kawasan di perbatasan; (7) pembinaan teknik jalan dan jembatan; (8) pembinaan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan wilayah timur; (9) pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan strategis; serta (10) pembangunan jalan tol.

Selanjutnya, pada program pengembangan ekonomi lokal, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan prasarana dan sarana kawasan agropolitan. Pada program pengembangan perumahan, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan kawasan pemukiman perkotaan, sedangkan alokasi anggaran pada program pemberdayaan komunitas perumahan digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan kawasan pemukiman perdesaan.

Pada program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut: (a) pembinaan/koordinasi/pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; (b) pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan; (c) pembinaan pemantauan dan evaluasi; (d) pembinaan teknik air minum; (e) peningkatan cakupan pelayanan air minum; (f) bantuan teknis/bantuan program penyehatan PDAM; (g) pembangunan sistem penyediaan air minum di desa rawan air, pesisir, dan terpencil; (h) penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpendapatan rendah; dan (i) penyediaan sarana dan prasarana air minum pada kawasan strategis nasional.

Pada program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain: (a) pembangunan/peningkatan/rehabilitasi prasarana sumber daya air provinsi dan kabupaten/kota; (b) pembangunan/peningkatan jaringan irigasi/rawa; serta (c) rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa. Sementara itu, pada program pengendalian banjir dan pengamanan pantai, alokasi anggaran digunakan untuk: (a) membiayai kegiatan pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir; (b) penanggulangan bencana/tanggap darurat; dan (c) rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir.

Pada program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain: (a) pembinaan pemantauan dan evaluasi; dan (b) pembinaan/penyusunan program, rencana kerja dan anggaran.

Departemen Perhubungan

Alokasi anggaran pada Departemen Perhubungan diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat, sehingga mampu mempercepat pembangunan infrastruktur perhubungan dalam mendukung dan mendorong pembangunan nasional. Dalam tahun 2009, pagu anggaran belanja Departemen Perhubungan adalah sebesar Rp19.352,9 miliar. Dengan asumsi daya serapnya hanya 96,2 persen dari pagunya tahun 2009, maka realisasi anggaran belanja Departemen Perhubungan diperkirakan mencapai Rp18.614,8 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp1.637,0 miliar (9,5 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja Departemen Perhubungan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2009 sebesar Rp16.977,8 miliar. Namun, apabila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja Departemen Perhubungan yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp 19.176,6 miliar maka perkiraan realisasi anggaran belanja Departemen Perhubungan tahun 2009 tersebut berarti lebih rendah Rp561,8 miliar atau 2,9 persen. Perkiraan realisasi penyerapan anggaran Departemen Perhubungan pada tahun 2009 tersebut meningkat 8,1 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran belanja Departemen Perhubungan pada tahun 2008 sebesar Rp13.477,1 miliar (88,1 persen dari pagunya dalam APBN-P). Lebih tingginya perkiraan realisasi anggaran belanja Departemen Perhubungan dalam tahun 2009 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN 2009 tersebut terutama berkaitan dengan tambahan anggaran stimulus fiskal untuk pembangunan infrastruktur padat karya yang dialokasikan pada Departemen Perhubungan sebesar Rp2.198,8 miliar.

Tambahan alokasi anggaran dalam rangka stimulus fiskal tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan sembilan program, yaitu (1) program pembangunan prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Rp60,3 miliar (2) program rehabilitasi prasarana dermaga sungai, danau, dan penyeberangan Rp1,5 miliar, (3) program pembangunan transportasi laut Rp670,9 miliar, (4) program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana transportasi laut Rp5,0 miliar, (5) program pembangunan transportasi udara Rp795,4 miliar, (6) program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana transportasi udara Rp63,8 miliar, (7) program peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan perkeretaapian Rp107,3 miliar, (8) program peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana kereta api Rp474,6 miliar, dan (9) program rehabilitasi prasarana dan sarana kereta api Rp20,0 miliar.

Pada program pembangunan prasarana dan sarana ASDP, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana serta pembangunan dermaga sungai, danau, dan penyeberangan. Sementara itu, pada program rehabilitasi prasarana dermaga sungai, danau, dan penyeberangan, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dermaga penyeberangan. Selanjutnya, pada program pembangunan transportasi laut, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dermaga pelabuhan.

Adapun alokasi anggaran pada program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana transportasi laut digunakan untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dermaga pelabuhan. Alokasi anggaran pada program pembangunan transportasi udara digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana, pembangunan landasan dan fasilitasnya, pembangunan bandara baru, dan pengembangan/peningkatan bandara. Sementara, alokasi anggaran pada program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana transportasi udara digunakan untuk membiayai kegiatan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana, rehabilitasi landasan dan fasilitasnya, rehabilitasi terminal dan fasilitasnya, serta rehabilitasi prasarana transportasi udara fasilitas sisi darat.

Pada program peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan perkeretaapian, alokasi anggaran digunakan untuk pengadaan sarana kereta api kelas ekonomi, KRL, dan KRDE/KRDE/KD3. Pada program peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana kereta api, alokasi anggaran digunakan untuk: (1) peningkatan jalan, prasarana kereta api, dan jembatan kereta api; (2) pembangunan jalan kereta api; (3) peningkatan dan rehabilitasi sistem sinyal dan telekomunikasi; (4) pembangunan *double track* dan *double-double track*; dan (5) pengembangan perkeretaapian. Sementara itu pada program rehabilitasi prasarana dan sarana kereta api, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan rehabilitasi jalan kereta api.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Alokasi anggaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di bidang energi dan meningkatkan kapasitas energi nasional sehingga bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dalam tahun 2009, pagu anggaran belanja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebesar Rp7.245,1 miliar. Dengan asumsi daya serapnya 102,0 persen dari pagunya tahun 2009 maka dalam tahun 2009, realisasi anggaran belanja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral diperkirakan mencapai Rp7.388,8 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp643,7 miliar (9,5 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan dalam APBN tahun 2009 sebesar Rp6.745,1 miliar atau lebih tinggi Rp143,7 miliar, atau 2,0 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp7.245,1 miliar. Perkiraan realisasi penyerapan anggaran belanja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2009 tersebut berarti meningkat 3,2 persen apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2008 sebesar Rp5.442,5 miliar (98,8 persen dari pagunya dalam APBN-P). Lebih tingginya perkiraan realisasi anggaran belanja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam tahun

2009 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN 2009 tersebut terutama berkaitan dengan tambahan anggaran stimulus fiskal untuk pembangunan infrastruktur padat karya yang dialokasikan pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp500,0 miliar.

Tambahan alokasi anggaran stimulus fiskal tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan dua program, yaitu: (1) program peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan Rp425,0 miliar; dan (2) program peningkatan aksesibilitas pemerintah daerah, koperasi dan masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana Rp75,0 miliar. Pada program peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan induk pembangkit listrik dan jaringan. Sementara itu, pada program peningkatan aksesibilitas pemerintah daerah, koperasi dan masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana, alokasi anggaran stimulus fiskal digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan dan pemanfaatan energi.

Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Anggaran belanja Kementerian Negara Perumahan Rakyat diarahkan untuk mendukung upaya mewujudkan tersedianya infrastruktur perumahan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam tahun 2009, pagu anggaran Kementerian Negara Perumahan Rakyat adalah sebesar Rp1.364,2 miliar. Dengan asumsi daya serapnya hanya 98,7 persen dari pagunya tahun 2009, maka realisasi anggaran belanja Kementerian Negara Perumahan Rakyat diperkirakan mencapai Rp1.346,8 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp382,6 miliar (39,7 persen) apabila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja Kementerian Negara Perumahan Rakyat yang ditetapkan dalam APBN tahun 2009 sebesar Rp964,2 miliar. Namun, apabila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja Kementerian Negara Perumahan Rakyat dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp1.364,2 miliar, maka perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian Negara Perumahan Rakyat pada tahun 2009 tersebut berarti lebih rendah Rp17,4 miliar atau 1,3 persen. Perkiraan realisasi penyerapan anggaran belanja Kementerian Negara Perumahan Rakyat tahun 2009 tersebut lebih tinggi sebesar 11,1 persen apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Kementerian Negara Perumahan Rakyat pada tahun 2008 sebesar Rp590,8 miliar (87,6 persen dari pagunya dalam APBN-P).

Dalam rangka stimulus fiskal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp400,0 miliar. Tambahan alokasi anggaran stimulus fiskal tersebut seluruhnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan perumahan, yaitu melalui kegiatan pembangunan rusunawa untuk TNI/Polri/pekerja/mahasiswa sebanyak 40 *twin blocks*.

Departemen Kelautan dan Perikanan

Alokasi anggaran belanja Departemen Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mendukung upaya dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Dalam tahun 2009, pagu

anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp3.547,6 miliar. Dengan asumsi daya serapnya hanya 87,5 persen dari pagunya tahun 2009, maka realisasi anggaran belanja Departemen Kelautan dan Perikanan diperkirakan mencapai Rp3.102,4 miliar, atau menyerap 90,0 persen dari pagu alokasi anggaran belanja Departemen Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2009 sebesar Rp3.447,6 miliar, atau menyerap 87,5 persen dari pagu alokasi anggaran belanja Departemen Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp3.547,6 miliar. Perkiraan realisasi penyerapan anggaran belanja Departemen Kelautan dan Perikanan tersebut berarti meningkat 8,0 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 2008 sebesar Rp2.398,9 miliar (79,5 persen dari pagunya dalam APBN-P).

Dalam rangka stimulus fiskal 2009, Departemen Kelautan dan Perikanan memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp100,0 miliar. Tambahan alokasi anggaran stimulus fiskal tersebut seluruhnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan, yaitu untuk membiayai kegiatan mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan perumahan khusus bagi nelayan, dan penduduk di pulau-pulau kecil.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Anggaran belanja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi diarahkan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan yang meliputi kebijakan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja, serta kebijakan perlindungan pekerja migran (TKI) dan mendukung penguatan kelembagaan. Dalam tahun 2009, pagu anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebesar Rp3.252,5 miliar. Dengan asumsi daya serapnya hanya 90,7 persen dari pagunya tahun 2009, realisasi anggaran belanja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi diperkirakan mencapai Rp2.949,7 miliar, yang berarti lebih tinggi Rp121,6 miliar atau 4,3 persen dari pagu anggaran belanja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2009 sebesar Rp2.828,1 miliar atau menyerap 94,3 persen dari pagu alokasi anggaran belanja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp3.128,1 miliar. Perkiraan realisasi penyerapan anggaran belanja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam tahun 2009 tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,7 persen apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam tahun 2008 sebesar Rp2.352,5 miliar (89,0 persen dari pagunya dalam APBN-P).

Dalam rangka stimulus fiskal 2009, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp300,0 miliar. Tambahan alokasi anggaran stimulus fiskal tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tiga program, yaitu: (1) program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja Rp29,2 miliar; (2) program penguatan kelembagaan iptek Rp7,3 miliar; dan (3) program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Rp263,5 miliar.

Pada program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan konsolidasi program-program perluasan kesempatan kerja. Sementara itu, pada program penguatan kelembagaan iptek, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem

informasi dan kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung. Pada program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan: (a) pembinaan/koordinasi/pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; (b) pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana; (c) pembinaan/ penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran; (d) pembangunan gedung; (e) penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis masyarakat; (f) peningkatan profesionalisme tenaga pelatihan dan instruktur; (g) pengembangan standar kompetensi kerja nasional dan program pelatihan; serta (h) peningkatan fungsi dan revitalisasi BLK menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi.

Departemen Kesehatan

Pada Departemen Kesehatan, alokasi anggaran diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan cakupan, kualitas, dan pemerataan program dan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas dan produktif. Dalam tahun 2009, pagu anggaran Departemen Kesehatan adalah sebesar Rp20.642,9 miliar. Dengan asumsi daya serapnya hanya 91,5 persen dari pagunya tahun 2009, maka realisasi anggaran belanja Departemen Kesehatan diperkirakan mencapai Rp18.893,8 miliar, yang berarti menyerap 93,2 persen dari pagu alokasi anggaran belanja Departemen Kesehatan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2009 sebesar Rp20.273,5 miliar atau menyerap 92,5 persen dari pagu alokasi anggaran belanja Departemen Kesehatan yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp20.423,5 miliar. Perkiraan realisasi penyerapan anggaran belanja Departemen Kesehatan pada tahun 2009 tersebut meningkat 5,4 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran belanja Departemen Kesehatan pada tahun 2008 sebesar Rp15.871,9 miliar (86,2 persen dari pagunya dalam APBN-P).

Dalam rangka stimulus fiskal, Departemen Kesehatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp150,0 miliar. Tambahan alokasi anggaran dalam rangka stimulus fiskal tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan program upaya kesehatan perorangan melalui kegiatan pemenuhan dan peningkatan fasilitas prasarana dan sarana kesehatan rujukan.

Departemen Perdagangan

Anggaran belanja Departemen Perdagangan diarahkan untuk mendukung kebijakan perdagangan luar negeri yang fokus pada penguatan daya saing ekspor yang dititikberatkan pada upaya peningkatan diplomasi perdagangan, pengembangan ekspor, dan peningkatan fasilitasi perdagangan. Sedangkan kebijakan perdagangan dalam negeri akan difokuskan pada peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri yang dititikberatkan pada pengembangan sarana perdagangan dan peningkatan pengamanan pasar domestik. Dalam tahun 2009, pagu anggaran Departemen Perdagangan adalah sebesar Rp1.638,4 miliar. Dengan asumsi daya serapnya hanya 89,8 persen dari pagunya tahun 2009, realisasi anggaran belanja Departemen Perdagangan diperkirakan mencapai Rp1.471,0 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp168,7 miliar (13,0 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja Departemen Perdagangan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2009 sebesar Rp1.302,4 miliar. Namun, apabila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja Departemen

Perdagangan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp1.637,4 miliar, perkiraan realisasi anggaran belanja Departemen Perdagangan pada tahun 2009 tersebut berarti lebih rendah Rp166,3 miliar atau 10,2 persen. Namun, apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran belanja Departemen Perdagangan pada tahun 2008 sebesar Rp1.144,5 miliar (81,2 persen dari pagunya dalam APBN-P), maka perkiraan realisasi penyerapan anggaran belanja Departemen Perdagangan dalam tahun 2009 tersebut berarti lebih tinggi 8,6 persen.

Dalam rangka stimulus fiskal, Departemen Perdagangan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp335,0 miliar. Tambahan alokasi anggaran stimulus fiskal tersebut seluruhnya digunakan untuk melaksanakan program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. Pada program tersebut, tambahan alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi dan kegiatan pengembangan sistem resi gudang. Kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi akan dilakukan di beberapa propinsi, antara lain yaitu propinsi Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Bali. Sementara itu, kegiatan pengembangan sistem resi gudang anatar lain akan dilakukan di propinsi NAD, Sumatera Barat, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.

Kementerian Negara Koperasi dan UKM

Anggaran belanja Kementerian Negara Koperasi dan UKM diarahkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional melalui peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produksi. Dalam tahun 2009, pagu anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM adalah sebesar Rp849,8 miliar. Dengan asumsi daya serapnya hanya 89,0 persen dari pagunya tahun 2009, maka realisasi anggaran belanja Kementerian Negara Koperasi dan UKM diperkirakan mencapai Rp756,3 miliar, atau menyerap sekitar 100,9 persen dari pagu anggaran belanja Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang ditetapkan dalam APBN tahun 2009 sebesar Rp749,8 miliar. Sementara itu, bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja Kementerian Negara Koperasi dan UKM pada Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp849,8 miliar, maka perkiraan realisasi anggaran belanja Departemen Koperasi dan UKM dalam tahun 2009 tersebut berarti mengalami penurunan sebesar Rp93,5 miliar atau 11,0 persen. Perkiraan realisasi penyerapan anggaran belanja Kementerian Negara Koperasi dan UKM dalam tahun 2009 tersebut relatif hampir sama dengan realisasi anggaran belanja Kementerian Negara Koperasi dan UKM dalam tahun 2008 sebesar Rp982,1 miliar (89,4 persen dari pagunya dalam APBN-P).

Dalam rangka stimulus fiskal, Kementerian Negara Koperasi dan UKM memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp100,0 miliar. Tambahan alokasi anggaran stimulus fiskal tersebut seluruhnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan usaha skala mikro untuk membiayai kegiatan fasilitasi pasar tradisional.

Departemen Pertanian

Alokasi anggaran belanja Departemen Pertanian diarahkan untuk menjamin ketersediaan pangan yang berasal dari produk dalam negeri dalam upaya menuju swasembada pangan

pokok. Dalam tahun 2009, pagu anggaran Departemen Pertanian adalah sebesar Rp8.452,8 miliar. Dengan asumsi daya serapnya hanya 80,6 persen dari pagunya tahun 2009, maka realisasi anggaran belanja Departemen Pertanian diperkirakan mencapai Rp6.810,4 miliar, atau menyerap 83,4 persen dari pagu alokasi anggaran belanja Departemen Pertanian yang ditetapkan dalam APBN tahun 2009 sebesar Rp8.170,8 miliar, atau menyerap 77,2 persen dari pagu alokasi anggaran belanja Departemen Pertanian yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp8.820,8 miliar. Perkiraan realisasi penyerapan anggaran belanja Departemen Pertanian dalam tahun 2009 tersebut menurun 6,2 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran belanja Departemen Pertanian pada tahun 2008 sebesar Rp7.203,9 miliar (86,7 persen dari pagunya dalam APBN-P).

Dalam rangka stimulus fiskal, Departemen Pertanian memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp650,0 miliar. Tambahan alokasi anggaran tersebut semula akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan jalan produksi sentra perkebunan Rp40,5 miliar; pembangunan jalan usaha tani sentra produksi peternakan dan holtikultura Rp234,0 miliar; dan pembangunan jalan usaha tani dan sentra produksi tanaman pangan sebesar Rp375,5 miliar. Namun, berdasarkan kesepakatan DPR dan Pemerintah, sebagian dana tersebut di realokasikan ke subsidi pupuk dan subsidi benih masing-masing sebesar Rp95,0 miliar dan Rp295,0 miliar. Sehingga dana stimulus Departemen Pertanian dalam APBN-P 2009 menjadi Rp260,0 miliar.

Sesuai dengan kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah, alokasi anggaran stimulus fiskal 2009 sebesar Rp260,0 miliar tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut: (1) pengembangan pusat pembibitan sapi bali dan peningkatan populasi sapi betina produktif (Rp50,0 miliar); (2) pengadaan kendaraan roda dua untuk petugas lapangan (Rp30,0 miliar); (3) pengadaan terpal untuk penanganan pasca panen padi (Rp37,0 miliar); (4) pengembangan kawasan buah tropis unggulan (Rp10,0 miliar); (5) pengadaan peralatan diagnostik *swine flu*, pengawasan keamanan pangan, rabies (Rp13,0 miliar); (6) Badan Karantina/Pengembangan Instalasi Teknik dan Metode (Rp38,0 miliar); (7) peremajaan unit penggilingan padi rakyat (Rp20,0 miliar); (8) pengadaan GPS (Rp20,0 miliar); (9) pengadaan sarana laboratorium mutu holtikultura (Rp30,0 miliar); dan (10) pengadaan alat pembuat pupuk organik (APPO) (Rp12,0 miliar).

Sementara itu, K/L yang secara nominal perkiraan realisasinya cukup tinggi adalah sebagai berikut.

Departemen Pendidikan Nasional

Alokasi anggaran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) diarahkan untuk mendukung pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2005–2009, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009. Dalam Renstra Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2005–2009, pembangunan pendidikan nasional didasarkan kepada tiga pilar kebijakan, yaitu: (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; serta (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. Ketiga pilar kebijakan pembangunan pendidikan nasional tersebut, pada dasarnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009. Dalam tahun 2009, pagu anggaran

Departemen Pendidikan Nasional adalah sebesar Rp62.276,2 miliar. Dengan asumsi daya serapnya hanya 96,8 persen dari pagunya tahun 2009, maka realisasi anggaran belanja Departemen Pendidikan Nasional diperkirakan mencapai Rp60.309,0 miliar, atau menyerap 97,1 persen dari pagu alokasi anggaran belanja Departemen Pendidikan Nasional yang ditetapkan dalam APBN dan Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp62.098,3 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2008 sebesar 96,1 persen, maka perkiraan realisasi penyerapan anggaran belanja Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009 tersebut berarti 0,7 persen lebih tinggi.

Alokasi anggaran pada Depdiknas tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan 14 program kerja, antara lain meliputi: (1) program pendidikan anak usia dini; (2) program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; (3) program pendidikan menengah; (4) program pendidikan tinggi; serta (5) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Pada program pendidikan anak usia dini, alokasi anggaran terutama digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, yaitu: (a) peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini melalui pembangunan lembaga PAUD dan penyediaan bahan ajar dan alat permainan edukasi; dan (b) perluasan dan peningkatan mutu TK (subsidi TK-SD satu atap). Sementara itu, pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, alokasi anggaran diprioritaskan antara lain untuk: (a) penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan dasar, baik formal maupun nonformal untuk siswa SD/setara dan SMP/setara; (b) penyediaan beasiswa untuk siswa miskin jenjang SD/setara dan jenjang SMP/setara; (c) penyelenggaraan pendidikan paket A setara SD dan paket B setara SMP; (d) rehabilitasi sarana dan prasarana SMP; (e) pembangunan SD-SMP satu atap, unit sekolah baru SMP, dan ruang kelas baru SMP; dan (f) pembangunan prasarana pendukung berupa ruang perpustakaan dan pusat sumber belajar SD, serta pembangunan laboratorium IPA, termasuk peralatan laboratorium, dan perpustakaan SMP; dan (g) tunjangan profesi guru.

Selanjutnya, anggaran belanja pada program pendidikan menengah digunakan antara lain untuk: (a) penyediaan beasiswa untuk siswa miskin jenjang pendidikan menengah; (b) rehabilitasi ruang kelas jenjang pendidikan SMA dan SMK; dan (c) pembangunan unit sekolah baru SMA dan SMK, ruang kelas baru SMA dan SMK, dan perpustakaan, laboratorium dan workshop SMA dan SMK; dan (d) tunjangan profesi guru. Pada program pendidikan tinggi, alokasi anggaran digunakan antara lain untuk: (a) penyediaan beasiswa untuk mahasiswa miskin dan peningkatan prestasi akademik, serta bantuan belajar bagi daerah konflik dan bencana; (b) pembangunan gedung dan laboratorium baru serta pengadaan peralatan laboratorium untuk Perguruan Tinggi; serta (c) pendirian dan peningkatan kapasitas politeknik. Selanjutnya, anggaran pada program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dalam tahun 2009 digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (a) percepatan sertifikasi akademik bagi pendidik; (b) peningkatan mutu dan profesionalisme guru; dan (c) tunjangan profesi guru.

Departemen Agama

Alokasi anggaran pada Departemen Agama diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan agama, yang merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam

memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan setiap warga negara sebagai individu. Dalam tahun 2009, pagu anggaran Departemen Agama adalah sebesar Rp26.661,0 miliar. Dengan asumsi daya serapnya hanya 94,0 persen dari pagunya tahun 2009, maka realisasi anggaran Departemen Agama diperkirakan mencapai Rp25.053,4 miliar, atau menyerap 94,0 persen dari pagu alokasi anggaran Departemen Agama yang ditetapkan dalam APBN dan pagunya tahun 2009 sebesar Rp26.656,6 miliar. Perkiraan realisasi penyerapan anggaran belanja Departemen Agama dalam tahun 2009 tersebut berarti 1,0 persen lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran Departemen Agama dalam tahun 2008 sebesar Rp14.874,7 miliar (93,0 persen dari pagunya dalam APBN-P). Alokasi anggaran Departemen Agama tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pokok, diantaranya: (1) program manajemen pelayanan pendidikan; (2) program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; (3) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; (4) program pendidikan tinggi; dan (5) program pendidikan menengah.

Pada program manajemen pelayanan pendidikan, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, yaitu antara lain: (a) pelayanan publik atau birokrasi; (b) peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional; (c) pembinaan/koordinasi/pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan (d) pengembangan manajemen informasi kependidikan (EMS). Sementara itu, pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain: (a) penyediaan BOS jenjang pendidikan dasar; (b) rehabilitasi MI/MTs; (c) beasiswa untuk siswa miskin MI dan MTs; dan (d) penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di MI/MTs. Pada program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas sebagai berikut: (a) bantuan tunjangan fungsional guru MI/MTs dan MA non PNS; (b) tunjangan profesi guru madrasah non PNS; (c) percepatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik; (d) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara; dan (e) pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan. Sementara itu, pada program pendidikan tinggi, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (a) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan PTA; (b) penyelenggaraan kerjasama internasional program perguruan tinggi; (c) penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pendidikan tinggi agama; dan (d) pembangunan gedung pendidikan tinggi agama. Selanjutnya, pada program pendidikan menengah, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, yang meliputi : (a) bantuan pembangunan untuk MA, (b) pemberian beasiswa bagi siswa miskin jenjang MA; (c) rehabilitasi MA; (d) pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana; dan (e) penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Departemen Keuangan

Alokasi anggaran belanja Departemen Keuangan diarahkan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan, sehingga mampu menjadi pengaman dan pengendali dalam aspek-aspek seperti infrastruktur, kelembagaan, dan pasar uang. Dalam tahun 2009, pagu anggaran Departemen Keuangan adalah sebesar Rp15.367,3 miliar. Dengan asumsi daya serapnya hanya 94,0 persen dari pagunya tahun 2009, maka realisasi anggaran

Departemen Keuangan diperkirakan mencapai Rp14.450,5 miliar, atau menyerap 94,0 persen dari pagu alokasi anggaran Departemen Keuangan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2009 dan Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp15.369,6 miliar. Perkiraan realisasi penyerapan anggaran belanja Departemen Keuangan dalam tahun 2009 tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar 13,4 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja Departemen Keuangan dalam tahun 2008 sebesar Rp12.051,1 miliar (80,6 persen dari pagunya dalam APBN-P). Alokasi anggaran belanja Departemen Keuangan dalam tahun 2009 tersebut, dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program kerja prioritas, di antaranya: (1) program peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara; (2) program peningkatan efektivitas pengeluaran negara; (3) program pembinaan akuntansi keuangan negara; (4) program pengembangan kelembagaan keuangan; (5) program stabilisasi ekonomi dan sektor keuangan; (6) program pengelolaan dan pembiayaan utang; serta (7) program peningkatan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.

Pada program peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara, alokasi anggaran ditetapkan penggunaannya antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (a) pemantapan modernisasi administrasi perpajakan; (b) modernisasi administrasi kepabeanan dan cukai; (c) peningkatan sarana pengawasan kepabeanan; (d) pengembangan sistem informasi kepabeanan dan cukai; dan (e) pengelolaan risiko fiskal. Pada program peningkatan efektivitas pengeluaran negara, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, antara lain: (a) penyempurnaan dan pengembangan manajemen keuangan pemerintah; (b) peningkatan pengelolaan kas negara; (c) penyelenggaraan dan peningkatan sistem informasi keuangan daerah (SIKD); dan (d) pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Pada program pembinaan akuntansi keuangan negara, alokasi anggaran ditetapkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, antara lain meliputi: (a) penyempurnaan sistem informasi akuntansi berbasis accrual; (b) penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat; (c) pengembangan dan pelaksanaan sistem akuntansi instansi (SAI); serta (d) penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN. Pada program pengembangan kelembagaan keuangan, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, yang meliputi antara lain: (a) pembinaan/pembuatan/pengembangan sistem, data, statistik dan informasi; (b) penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan; serta (c) peningkatan kerjasama pengkajian pengembangan produk pasar modal dan lembaga keuangan berbasis syariah. Pada program stabilisasi ekonomi dan sektor keuangan, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, antara lain: (a) pemantapan koordinasi penegakan hukum di bidang pasar modal dan lembaga keuangan; (b) penyusunan dan evaluasi pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; dan (c) pengkajian kebijakan/analisis isu-isu ekonomi dan keuangan dalam kerangka kerjasama internasional dan penanganan liberalisasi bidang jasa. Pada program pengelolaan dan pembiayaan utang, alokasi anggaran ditetapkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, yang meliputi antara lain: (a) penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan utang; (b) pengelolaan pinjaman dan hibah; (c) pengelolaan surat utang negara; (d) pelaksanaan evaluasi akuntansi dan settlement utang; (e) pengelolaan strategi dan portofolio utang; serta (f) pengelolaan dan

pembiayaan syariah. Pada program peningkatan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, alokasi anggaran ditetapkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, antara lain meliputi: (a) inventarisasi dan penilaian kekayaan negara/barang milik negara (BMN); dan (b) penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan negara.

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas

Anggaran belanja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas diarahkan untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang lebih merata dan berkeadilan. Dalam tahun 2009, pagu anggaran Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas adalah sebesar Rp393,1 miliar. Dengan asumsi daya serapnya hanya 93,5 persen dari pagunya tahun 2009, maka realisasi anggaran belanja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas diperkirakan mencapai Rp367,4 miliar, atau menyerap 93,5 persen dari pagu anggaran belanja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang ditetapkan dalam APBN tahun 2009 dan Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp393,1 miliar. Perkiraan realisasi penyerapan anggaran belanja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam tahun 2009 tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar 13,9 persen apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam tahun 2008 sebesar Rp312,3 miliar.

Alokasi anggaran belanja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam tahun 2009 tersebut digunakan untuk melaksanakan berbagai program kerja, diantaranya, yaitu: (1) program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; serta (2) program pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Pada program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pokok, yang meliputi antara lain: (a) kerjasama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga; (b) peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan, serta (c) penciptaan sistem administrasi pendukung dan database perencanaan yang efektif dan efisien. Sementara itu, pada program pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pokok, antara lain: (a) pengembangan kapasitas SDM aparatur; dan (b) pengembangan kapasitas SDM perencana.

Rincian belanja K/L dalam APBN, Dokumen Stimulus Fiskal, pagu riil APBN-P 2009, dan perkiraan realisasi disajikan dalam **Tabel III.3**.

3.3 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah 2009

Kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang diimplementasikan dalam alokasi anggaran transfer ke daerah dalam APBN, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan fiskal secara nasional. Sehubungan dengan itu, kebijakan alokasi transfer ke daerah dalam tahun 2009 tetap diarahkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas nasional, dengan tetap menjaga

konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Dengan tetap memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan serta berpijak pada hasil evaluasi selama implementasi tahun 2007-2008, dan mengacu pada hasil pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2009, kebijakan transfer ke daerah pada tahun 2009 akan lebih dipertajam untuk: (1) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (*vertical fiscal imbalance*), dan antardaerah (*horizontal fiscal imbalance*); (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (3) mendukung kesinambungan fiskal nasional (*fiscal sustainability*) dalam rangka kebijakan ekonomi makro; (4) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (5) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; serta (6) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Dalam APBN-P 2009, realisasi transfer ke daerah diperkirakan mencapai Rp309.308,2 miliar atau 5,7 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut berarti mengalami penurunan sebesar Rp11.382,8 miliar atau 3,5 persen dari pagu anggaran transfer ke daerah dalam APBN 2009 sebesar Rp320.691,0 miliar. Namun, apabila dibandingkan dengan pagu

TABEL III.3⁰
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI, 2009
(miliar rupiah)

KODE	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN	Dokumen Stimulus	Pagu Riil APBN-P	Perkiraan Realisasi
1	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	337,7	337,7	337,7	316,3
2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.948,4	1.948,4	1.948,4	1.752,2
4	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.725,5	1.725,5	1.725,5	1.587,0
5	MAHKAMAH AGUNG	5.473,1	5.473,1	5.473,1	5.077,5
6	KEJAKSAAN AGUNG	1.911,2	1.911,2	1.911,2	1.706,1
7	SEKRETARIAT NEGARA	1.532,9	1.532,9	1.715,6	1.244,2
10	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	8.702,2	8.702,2	8.782,4	8.048,3
11	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	5.221,0	5.221,0	5.364,1	4.112,5
12	DEPARTEMEN PERTAHANAN	33.667,6	33.667,6	33.667,6	31.984,3
13	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM	4.391,4	4.391,4	4.393,9	4.391,4
15	DEPARTEMEN KEUANGAN	15.369,6	15.369,6	15.367,3	14.450,5
18	DEPARTEMEN PERTANIAN	8.170,8	8.820,8	8.452,8	6.810,4
19	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	1.763,0	1.763,0	1.763,0	1.704,0
20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.745,1	7.245,1	7.245,1	7.388,8
22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	16.977,8	19.176,6	19.352,9	18.614,8
23	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	62.098,3	62.098,3	62.276,2	60.309,0
24	DEPARTEMEN KESEHATAN	20.273,5	20.423,5	20.642,9	18.893,8
25	DEPARTEMEN AGAMA	26.656,6	26.656,6	26.661,0	25.053,4
26	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.828,1	3.128,1	3.252,5	2.949,7
27	DEPARTEMEN SOSIAL	3.427,2	3.427,2	3.427,5	3.201,5
29	DEPARTEMEN KEHUTANAN	2.616,9	2.616,9	2.407,0	2.193,4
32	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.447,6	3.547,6	3.547,6	3.102,4
33	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	34.987,5	41.588,7	41.619,6	39.056,9
34	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	207,4	207,4	207,4	187,0
35	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	129,1	129,1	129,1	89,7
36	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	99,3	99,3	99,3	65,2
40	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.118,2	1.118,2	1.118,2	1.193,0
41	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	176,4	176,4	176,4	131,9
42	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	424,4	424,4	424,4	418,1
43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	376,4	376,4	376,4	349,4
44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	749,8	849,8	849,8	756,3
47	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	117,0	117,0	117,0	106,3
48	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	121,8	121,8	121,8	111,8

TABEL III.3¹⁾ (lanjutan)
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI, 2009
 (miliar rupiah)

KODE	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN	Dokumen Stimulus	Pagu Riil APBN-P	Perkiraan Realisasi
50	BADAN INTELIJEN NEGARA	982,9	982,9	982,9	982,9
51	LEMBAGA SANDI NEGARA	497,9	497,9	497,9	497,9
52	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	25,6	25,6	25,6	25,6
54	BADAN PUSAT STATISTIK	1.706,3	1.706,3	1.706,3	1.517,0
55	KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	393,1	393,1	393,1	367,4
56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.858,4	2.858,4	2.889,0	2.713,4
57	PERPUSTAKAAN NASIONAL	366,6	366,6	366,6	349,5
59	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.061,0	2.061,0	2.145,4	2.145,2
60	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	24.816,7	24.816,7	24.816,7	24.418,5
63	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	661,4	661,4	661,4	609,8
64	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	128,2	128,2	128,2	128,2
65	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	376,8	376,8	376,8	342,7
66	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	324,8	324,8	324,8	302,3
67	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	1.091,8	1.091,8	1.283,1	1.292,4
68	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1.196,0	1.196,0	1.196,0	1.166,9
74	KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA	55,1	55,1	55,1	55,1
75	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	801,1	801,1	819,4	769,3
76	KOMISI PEMILIHAN UMUM	956,6	956,6	956,6	870,7
77	MAHKAMAH KONSTITUSI	193,2	193,2	193,2	160,1
78	PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN	113,2	113,2	113,2	105,3
79	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	478,6	478,6	486,2	471,4
80	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	382,0	382,0	383,9	362,3
81	BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	523,0	523,0	523,0	506,5
82	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	206,2	206,2	216,3	201,1
83	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	359,5	359,5	362,4	346,4
84	BADAN STANDARISASI NASIONAL	74,1	74,1	74,1	68,0
85	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	55,6	55,6	55,6	51,6
86	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	193,9	193,9	196,9	184,8
87	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	115,0	115,0	115,0	111,7
88	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	360,1	360,1	360,1	334,0
89	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	610,2	610,2	610,2	562,6
90	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	1.302,4	1.637,4	1.638,4	1.471,0
91	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	964,2	1.364,2	1.364,2	1.346,8
92	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	858,1	858,1	858,1	806,6
93	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	315,2	315,2	315,2	294,6
95	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	462,2	462,2	462,2	390,3
100	KOMISI YUDISIAL RI	99,8	99,8	99,8	74,9
103	BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	147,5	147,5	157,9	118,3
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	262,5	262,5	262,5	244,7
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.147,7	1.147,7	1.147,7	592,1
JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA		322.317,4	333.652,4	334.575,7	314.716,9

1) Perbedaan satu angka dibelakang koma dalam angka penjumlahan karena pembulatan

anggaran transfer ke daerah dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp303.051,8 miliar, perkiraan realisasi anggaran transfer ke daerah dalam tahun 2009 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp6.256,4 miliar atau 2,1 persen. Demikian pula, apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2008 sebesar Rp292.433,5 miliar, perkiraan realisasi anggaran transfer ke daerah dalam APBN-P 2009 berarti mengalami peningkatan sebesar Rp16.874,7 miliar atau 5,8 persen. Perkiraan realisasi anggaran transfer ke daerah tersebut terdiri atas dana perimbangan 92,2 persen, serta dana otonomi khusus dan penyesuaian 7,8 persen.

3.3.1 Perubahan Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah, sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pengalokasian dana perimbangan berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) bertujuan

untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Dengan demikian, dana perimbangan merupakan salah satu pilar pokok desentralisasi fiskal dalam konteks transfer dana dari Pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah.

Dalam APBN-P 2009, realisasi anggaran dana perimbangan diperkirakan mencapai Rp285.053,1 miliar atau 5,3 persen terhadap PDB. Apabila dibandingkan dengan pagu alokasi dana perimbangan dalam APBN 2009 sebesar Rp296.952,4 miliar, jumlah ini berarti mengalami penurunan sebesar Rp11.899,4 miliar atau 4,0 persen. Namun, sebaliknya, apabila dibandingkan dengan pagu alokasi dana perimbangan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp279.313,2 miliar, perkiraan realisasi dana perimbangan dalam APBN-P 2009 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp5.739,9 miliar atau 2,1 persen. Demikian pula, apabila dibandingkan dengan realisasi dana perimbangan dalam tahun 2008 sebesar Rp278.714,7 miliar, perkiraan realisasi anggaran dana perimbangan dalam APBN-P 2009 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp6.338,4 miliar atau 2,3 persen. Perkiraan realisasi anggaran dana perimbangan dalam APBN-P 2009 tersebut terdiri atas DBH sebesar 25,9 persen, DAU sebesar 65,4 persen, dan DAK sebesar 8,7 persen.

3.3.1.1 Perubahan Dana Bagi Hasil (DBH)

Kebijakan alokasi DBH dalam tahun 2009 tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. DBH yang terdiri atas DBH pajak dan DBH sumber daya alam (SDA) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya memperhitungkan potensi daerah penghasil (*by origin*).

Sumber-sumber penerimaan pajak yang dibagihasilkan meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPND), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta penerimaan cukai hasil tembakau. Sementara itu, sumber-sumber penerimaan SDA yang dibagihasilkan terdiri atas minyak bumi, gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, terdapat penambahan obyek DBH SDA, yaitu DBH SDA panas bumi.

Kebijakan di bidang DBH dalam tahun 2009 lebih dititikberatkan pada penyempurnaan dan percepatan dalam proses perhitungan, pengalokasian, dan penetapan DBH ke daerah. Hal ini dilakukan agar penyaluran DBH ke daerah dapat dilakukan tepat waktu. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah lebih aktif dalam penyempurnaan proses dan mekanisme penyaluran DBH ke daerah, antara lain melalui peningkatan koordinasi antardepartemen/instansi terkait, serta peningkatan akurasi data oleh departemen/instansi terkait.

Dalam APBN-P 2009, realisasi DBH diperkirakan mencapai Rp73.819,4 miliar atau 1,4 persen terhadap PDB. Jumlah ini berarti mengalami penurunan sebesar Rp11.899,4 miliar atau 13,9 persen dari pagu DBH dalam APBN 2009 sebesar Rp85.718,7 miliar. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan pagu anggaran DBH dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp68.079,5 miliar, perkiraan realisasi anggaran DBH dalam APBN-P 2009 berarti mengalami peningkatan sebesar Rp5.739,9 miliar atau 8,4 persen. Perkiraan realisasi DBH dalam APBN-P 2009 tersebut terdiri atas DBH pajak sebesar 52,2 persen dan DBH SDA sebesar 47,8 persen.

3.3.1.1.1 Perubahan DBH Pajak

Dua faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran DBH pajak dalam tahun 2009 adalah alokasi anggaran penerimaan dari potensi sumber-sumber perpajakan yang dapat dihimpun dan ketentuan-ketentuan mengenai pembagian DBH perpajakan. Dalam APBN-P 2009, realisasi DBH pajak diperkirakan mencapai Rp38.563,3 miliar atau 0,7 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalami penurunan sebesar Rp7.191,1 miliar (15,7 persen) apabila dibandingkan dengan pagu DBH pajak dalam APBN 2009 sebesar Rp45.754,4 miliar. Apabila dibandingkan dengan pagu DBH pajak dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, perkiraan realisasi DBH pajak dalam APBN-P 2009 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.356,1 miliar (3,4 persen). Namun, apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2008 sebesar Rp37.879,0 miliar, perkiraan realisasi DBH pajak dalam APBN-P 2009 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp684,4 miliar (1,8 persen). Perkiraan realisasi DBH pajak dalam APBN-P 2009 tersebut telah menampung kurang bayar DBH pajak tahun-tahun sebelumnya, dengan rincian kurang bayar DBH PPh sebesar Rp3,8 miliar dan kurang bayar DBH PBB tahun 2006-2008 sebesar Rp122,8 miliar.

Dari perkiraan realisasi anggaran DBH pajak dalam APBN-P 2009 tersebut, realisasi DBH PPh diperkirakan mencapai Rp8.207,4 miliar atau turun sebesar Rp1.881,8 miliar (18,7 persen) dari pagu DBH PPh dalam APBN 2009, dan realisasi DBH PBB diperkirakan mencapai Rp22.811,0 miliar atau turun sebesar Rp4.635,8 miliar (16,9 persen) dari pagu DBH PBB dalam APBN 2009. Sementara itu, realisasi anggaran DBH BPHTB dalam APBN-P 2009 diperkirakan mencapai Rp6.480,0 miliar atau turun sebesar Rp773,7 miliar (10,7 persen) dari pagu DBH BPHTB dalam APBN 2009. Di lain pihak, realisasi DBH cukai hasil tembakau dalam APBN-P 2009 diperkirakan sebesar Rp1.065,1 miliar atau naik sebesar Rp100,3 miliar (10,4 persen) dari pagu DBH cukai hasil tembakau dalam APBN 2009.

3.3.1.1.2 Perubahan DBH Sumber Daya Alam

Alokasi anggaran DBH SDA dalam tahun 2009 dipengaruhi oleh alokasi anggaran penerimaan dari potensi sumber-sumber SDA yang dapat dihimpun dan ketentuan-ketentuan mengenai pembagian DBH SDA yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2009, realisasi DBH SDA diperkirakan mencapai Rp35.256,0 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp4.708,3 miliar (11,8 persen) apabila dibandingkan dengan pagu DBH SDA yang ditetapkan dalam APBN 2009 sebesar Rp39.964,3 miliar. Penurunan perkiraan realisasi DBH SDA dalam tahun 2009 tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan DBH SDA minyak bumi dan gas bumi

sehubungan dengan lebih rendahnya target penerimaan minyak bumi dan gas bumi yang dibagihasilkan dalam tahun 2009. Namun, apabila dibandingkan dengan pagu DBH SDA dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp28.160,1 miliar, perkiraan realisasi DBH SDA tahun 2009 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp7.095,9 miliar atau 25,2 persen. Perkiraan realisasi anggaran DBH SDA dalam tahun 2009 tersebut telah memperhitungkan kurang bayar DBH SDA tahun-tahun sebelumnya, dengan rincian kurang bayar DBH SDA minyak dan gas bumi sebesar Rp2.000,0 miliar, kurang bayar DBH SDA pertambangan umum sebesar Rp221,5 miliar, serta kurang bayar DBH SDA pertambangan panas bumi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp753,1 miliar.

Perkiraan realisasi anggaran DBH SDA dalam APBN-P 2009 tersebut terdiri atas:

- a. Alokasi anggaran DBH migas sebesar Rp26.128,7 miliar, yang meliputi:
 - (1) Alokasi anggaran DBH SDA minyak bumi sebesar Rp13.495,9 miliar, atau turun sebesar Rp5.656,6 miliar dari pagu DBH SDA minyak bumi dalam APBN 2009;
 - (2) Alokasi anggaran DBH SDA gas bumi sebesar Rp10.632,8 miliar, atau turun sebesar Rp1.574,5 miliar dari pagu DBH SDA gas bumi dalam APBN 2009;
 - (3) Kurang bayar DBH SDA minyak dan gas bumi sebesar Rp2.000,0 miliar.
- b. Alokasi anggaran DBH nonmigas sebesar Rp9.127,3 miliar, yang meliputi:
 - (1) Alokasi anggaran DBH SDA pertambangan umum sebesar Rp7.197,6 miliar, atau naik Rp218,9 miliar dari pagu DBH SDA pertambangan umum dalam APBN 2009;
 - (2) Alokasi anggaran DBH SDA kehutanan sebesar Rp800,6 miliar, atau turun sebesar Rp705,1 miliar dari pagu DBH SDA kehutanan dalam APBN 2009;
 - (3) Alokasi anggaran DBH SDA perikanan sebesar Rp120,0 miliar, atau sama dengan pagu DBH SDA perikanan dalam APBN 2009;
 - (4) Alokasi anggaran DBH SDA pertambangan panas bumi sebesar Rp1.009,1 miliar, atau naik Rp1.009,1 miliar dari pagu DBH SDA pertambangan panas bumi dalam APBN 2009 yang sebesar nihil.

3.3.1.2 Perubahan Dana Alokasi Umum (DAU)

Sesuai amanat Pasal 27 UU Nomor 33 Tahun 2004, jumlah keseluruhan DAU pada tahun 2009 direncanakan sebesar 26 persen dari pendapatan dalam negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN. PDN neto merupakan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah, serta faktor-faktor pengurang DAU.

Dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan alokasi dana antardaerah dan mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah maka langkah-langkah untuk meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU, yang meliputi variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, serta data alokasi dasar terus dilakukan. *Williamson Index* (WI) dan *Coefficient of Variation* (CoF) digunakan sebagai parameter standar pengukuran tingkat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah secara relatif terhadap jumlah penduduk.

Dalam APBN-P 2009, realisasi DAU diperkirakan mencapai Rp186.414,1 miliar (3,5 persen terhadap PDB), yang berarti sama dengan pagunya baik dalam APBN tahun 2009

maupun Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Namun, apabila dibandingkan dengan realisasi DAU dalam tahun 2008 sebesar Rp179.507,1 miliar (3,6 persen terhadap PDB), jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp6.907,0 miliar atau 3,8 persen. Peningkatan ini terjadi seiring dengan meningkatnya perkiraan penerimaan dalam negeri neto dalam tahun 2009 dibandingkan tahun 2008. Alokasi DAU tahun 2009 akan didistribusikan 10 persen dari total DAU Nasional untuk provinsi dan 90 persen dari total DAU Nasional untuk kabupaten/kota, masing-masing sebesar Rp18.641,4 miliar dan Rp167.772,7 miliar.

Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 33 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa perhitungan alokasi DAU berdasarkan formula akan dilaksanakan secara penuh mulai tahun 2008. Perhitungan DAU tahun 2009 yang telah didasarkan pada formula sebagaimana amanat UU Nomor 33 tahun 2004 tersebut dapat menghasilkan alokasi DAU suatu daerah sebesar nol (tidak mendapatkan DAU), lebih kecil, sama dengan, atau lebih besar jika dibandingkan dengan DAU yang diterimanya dalam tahun 2008.

3.3.1.3 Perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Secara umum, arah kebijakan pengalokasian DAK tahun 2009 adalah untuk:

1. Membantu daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah, dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat;
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana jalan, irigasi, air minum dan sanitasi di kabupaten daerah tertinggal yang terdiri dari daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan bencana, serta daerah yang termasuk kategori daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata;
3. Menunjang penguatan sistem distribusi nasional, terutama untuk memperlancar arus barang antarwilayah yang dapat meningkatkan ketersediaan bahan pokok di daerah perdesaan, daerah tertinggal/terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah pulau-pulau kecil terluar, dan daerah rawan bencana, melalui kegiatan khusus di bidang, perdagangan, serta sarana dan prasarana perdesaan;
4. Mendorong peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, angkutan barang dan kebutuhan pokok, serta pembangunan perdesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, infrastruktur, perdagangan, serta pembangunan perdesaan;
5. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar, sarana dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur, serta sarana dan prasarana perdesaan daerah tertinggal;
6. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Menyediakan serta meningkatkan cakupan, keandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar, melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur jalan;

8. Mendukung penyediaan prasarana pemerintahan di daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan;
9. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga serta kegiatan yang didanai dari APBD, melalui peningkatan koordinasi pengelolaan DAK di pusat dan daerah;
10. Melanjutkan pengalihan secara bertahap anggaran Kementerian/Lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah ke DAK, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam APBN-P 2009, realisasi DAK diperkirakan mencapai Rp24.819,6 miliar atau sama dengan pagu DAK dalam APBN 2009 dan Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2008 sebesar Rp20.787,3 miliar, perkiraan realisasi DAK dalam APBN-P 2009 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp4.032,2 miliar atau 19,4 persen. DAK dalam APBN-P 2009 tersebut, sudah termasuk pengalihan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang sudah menjadi urusan daerah, yang berasal dari anggaran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Departemen Perdagangan.

Prioritas penggunaan DAK tahun 2009 diarahkan untuk kegiatan pada bidang-bidang sebagai berikut:

1. Pendidikan, untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukkan bagi SD, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, serta daerah pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Kesehatan, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, dan jaringannya termasuk poskesdes, dan rumah sakit provinsi/kabupaten/kota untuk pelayanan kesehatan rujukan, serta penyediaan sarana/prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/kota;
3. Keluarga Berencana, untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan Program KB, sarana dan prasarana pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)/advokasi Program KB; sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB; dan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk; serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
4. Infrastruktur Jalan dan Jembatan, untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata, sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional;

5. Infrastruktur Irigasi, untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan;
6. Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan keandalan pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
7. Pertanian, untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional;
8. Kelautan dan Perikanan, untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
9. Prasarana Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah pemekaran, dan diprioritaskan untuk daerah yang terkena dampak pemekaran tahun 2007/2008, serta digunakan untuk pembangunan/perluasan/rehabilitasi total gedung kantor/bupati/walikota, dan pembangunan/perluasan/rehabilitasi total gedung kantor DPRD, dengan tetap memperhatikan kriteria perhitungan alokasi DAK;
10. Lingkungan hidup, untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan dan sistem informasi pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, serta perlindungan sumber daya air di luar kawasan hutan;
11. Kehutanan, untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), meningkatkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai, pemantapan fungsi hutan lindung, Taman Hutan Raya (TAHURA), hutan kota, serta pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan termasuk operasional kegiatan penyuluhan kehutanan;
12. Sarana dan Prasarana Perdesaan, ditujukan khusus untuk daerah tertinggal, dan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di perdesaan ke daerah pemasaran;
13. Perdagangan, untuk menunjang penguatan sistem distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang terutama berupa pasar tradisional di daerah perbatasan, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, serta daerah pascabencana.

3.3.2 Perubahan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

3.3.2.1 Perubahan Dana Otonomi Khusus

Selain dana perimbangan, kepada daerah-daerah tertentu juga dialokasikan dana otonomi khusus, yaitu kepada: (a) Provinsi Papua dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan (b) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Realisasi anggaran dana otonomi khusus dalam APBN-P 2009 diperkirakan mencapai Rp9.526,6 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp670,0 miliar (7,6 persen) apabila dibandingkan dengan pagu dana otonomi khusus dalam APBN 2009 dan Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp8.856,6 miliar. Begitu juga, apabila dibandingkan dengan realisasi dana otonomi khusus dalam tahun 2008 sebesar Rp7.510,3 miliar, jumlah tersebut berarti mengalami kenaikan sebesar Rp2.016,3 miliar (26,8 persen).

Rincian perkiraan Dana Otonomi Khusus dalam APBN-P 2009 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Papua sebesar Rp3.728,3 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN 2009.

Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua diutamakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dana Otonomi Khusus Papua tersebut dibagikan kepada Provinsi Papua Rp2.609,8 miliar dan Provinsi Papua Barat Rp1.118,5 miliar, yang jumlahnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional. Pengalokasian Dana Otonomi Khusus ke provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menggunakan basis penghitungan secara proporsional. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dimaksud tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

- b. Untuk Provinsi NAD sebesar Rp3.728,3 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN 2009.

Dana Otonomi Khusus Aceh diarahkan penggunaannya untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2008.

Dana otonomi khusus NAD direncanakan, dilaksanakan, serta dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi NAD dan merupakan bagian yang utuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Perencanaan sebagian besar dari penggunaan dana otonomi khusus tersebut direncanakan bersama oleh Pemerintah Provinsi NAD dengan masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam Pemerintah Provinsi NAD serta merupakan lampiran dari APBA.

- c. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus sebesar Rp2.070,0 miliar, atau meningkat sebesar Rp670,0 miliar dari pagunya dalam APBN 2009.

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menerima Dana Tambahan Infrastruktur masing-masing sebesar Rp800,0 miliar dan Rp 600,0 miliar, yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Selain itu, sebagaimana amanat Penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Angka 3 UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, dalam perkiraan realisasi dana tambahan infrastruktur tahun 2009 tersebut juga menampung kekurangan dana tambahan otonomi khusus infrastruktur Provinsi Papua tahun 2008 sebesar Rp670,0 miliar.

3.3.2.2 Perubahan Dana Penyesuaian

Realisasi dana penyesuaian dalam APBN-P 2009 diperkirakan mencapai Rp14.728,6 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp153,5 miliar dari pagu alokasi dana penyesuaian dalam APBN 2009 dan Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp14.882,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana tambahan DAU untuk guru pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp7.490 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN 2009.
- b. Dana tambahan DAU yang dialokasikan kepada daerah tertentu sebagai penguatan desentralisasi fiskal dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sebesar Rp7.000,0 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN 2009 .
- c. Kurang bayar dana prasarana infrastruktur jalan dan lainnya tahun 2007 sebesar Rp41,4 miliar atau sama dengan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 72/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya.
- d. Kurang bayar DAK tahun 2007 sebesar Rp197,1 miliar atau sama dengan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 71/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 yang dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2008.

Ringkasan transfer ke daerah dalam APBN, Dokumen Stimulus Fiskal, dan APBNP-P 2009 disajikan dalam **Tabel III.4**.

Tabel III.4
TRANSFER KE DAERAH, 2009¹⁾
(miliar rupiah)

	APBN	% thd PDB	Dok. Stimulus	% thd PDB	APBN-P	% thd PDB	% thd APBN	% thd APBN dok. Stimulus
I. DANA PERIMBANGAN	296.952,4	5,6	279.313,2	5,1	285.053,1	5,3	96,0	102,1
A. DANA BAGI HASIL	85.718,7	1,6	68.079,5	1,2	73.819,4	1,4	86,1	108,4
1. Pajak	45.754,4	0,9	39.919,4	0,7	38.563,3	0,7	84,3	96,6
a. Pajak Penghasilan	10.089,2	0,2	9.503,6	0,2	8.207,4	0,2	81,3	86,4
i. Pasal 21	9.387,0	0,2	8.842,2	0,2	7.542,2	0,1	80,3	85,3
ii. Pasal 25/29 orang pribadi	702,2	0,0	661,4	0,0	661,4	0,0	94,2	100,0
iii. Kurang bayar PPh	-	-	-	-	3,8	0,0	-	-
b. PBB	27.446,8	0,5	22.688,2	0,4	22.811,0	0,4	83,1	100,5
i. DBH PBB	27.446,8	0,5	22.688,2	0,4	22.688,2	0,4	82,7	100,0
ii. Kurang bayar DBH PBB	-	-	-	-	122,8	0,0	-	-
c. BPHTB	7.253,6	0,1	6.665,5	0,1	6.480,0	0,1	89,3	97,2
d. Cukai	964,8	0,0	1.062,2	0,0	1.065,1	0,0	110,4	100,3
2. Sumber Daya Alam	39.964,3	0,8	28.160,1	0,5	35.256,0	0,7	88,2	125,2
a. migas	31.359,8	0,6	19.299,6	0,4	26.128,7	0,5	83,3	135,4
i. Minyak Bumi	19.152,5	0,4	10.027,1	0,2	13.495,9	0,2	70,5	134,6
ii. Gas Bumi	12.207,3	0,2	9.272,5	0,2	10.632,8	0,2	87,1	114,7
iii. Kurang bayar migas	-	-	-	-	2.000,0	0,0	-	-
b. Pertambangan Umum	6.978,8	0,1	6.978,8	0,1	7.197,6	0,1	103,1	103,1
i. Iuran Tetap	67,5	0,0	67,5	0,0	85,1	0,0	125,9	125,9
ii. Royalti	6.911,2	0,1	6.911,2	0,1	6.891,1	0,1	99,7	99,7
iii. Kurang bayar DBH pertambangan umum	-	-	-	-	221,5	0,0	-	-
c. Kehutanan	1.505,8	0,0	1.505,8	0,0	800,6	0,0	53,2	53,2
i. Provisi Sumber Daya Hutan	999,4	0,0	999,4	0,0	342,1	0,0	34,2	34,2
ii. Iuran Hak Pengusahaan Hutan	12,2	0,0	12,2	0,0	43,9	0,0	361,5	361,5
iii. Dana Reboisasi	494,2	0,0	494,2	0,0	414,6	0,0	83,9	83,9
d. Perikanan	120,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	100,0	100,0
e. Pertambangan Panas Bumi (PPB)	-	-	256,0	0,0	1.009,1	0,0	-	394,2
i. Alokasi DBH PPB 2009	-	-	256,0	0,0	256,0	0,0	-	100,0
ii. Kurang bayar DBH PPB 2006 - 2008	-	-	-	-	753,1	0,0	-	-
B. DANA ALOKASI UMUM	186.414,1	3,5	186.414,1	3,4	186.414,1	3,5	100,0	100,0
C. DANA ALOKASI KHUSUS	24.819,6	0,5	24.819,6	0,5	24.819,6	0,5	100,0	100,0
II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN	23.738,6	0,4	23.738,6	0,4	24.255,1	0,4	102,2	102,2
A. DANA OTONOMI KHUSUS	8.856,6	0,2	8.856,6	0,2	9.526,6	0,2	107,6	107,6
1. Dana Otsus	7.456,6	0,1	7.456,6	0,1	7.456,6	0,1	100,0	100,0
a. Dana Otsus Prov. Papua dan Papua Barat	3.728,3	0,1	3.728,3	0,1	3.728,3	0,1	100,0	100,0
- Provinsi Papua	2.609,8	0,0	2.609,8	0,0	2.609,8	0,0	100,0	100,0
- Provinsi Papua Barat	1.118,5	0,0	1.118,5	0,0	1.118,5	0,0	100,0	100,0
b. Dana Otsus Aceh	3.728,3	0,1	3.728,3	0,1	3.728,3	0,1	100,0	100,0
2. Dana tambahan Otsus Infrastruktur Prov Papua	1.400,0	0,0	1.400,0	0,0	2.070,0	0,0	147,9	147,9
a. Papua	800,0	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0	100,0	100,0
b. Papua Barat	600,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	100,0	100,0
c. Tambahan otsus infrastruktur Prov Papua	-	-	-	-	670,0	0,0	-	-
B. DANA PENYESUAIAN	14.882,0	0,3	14.882,0	0,3	14.728,6	0,3	99,0	99,0
1. Dana Tambahan DAU untuk Guru PNSD	7.490,0	0,1	7.490,0	0,1	7.490,0	0,1	100,0	100,0
2. Dana Tambahan DAU	7.000,0	0,1	7.000,0	0,1	7.000,0	0,1	100,0	100,0
3. Kurang Bayar DPIL 2007	96,7	0,0	96,7	0,0	41,4	0,0	42,8	42,8
4. Kurang Bayar DAK 2007	295,3	0,0	295,3	0,0	197,1	0,0	66,8	66,8
J U M L A H	320.691,0	6,0	303.051,8	5,5	309.308,2	5,7	96,5	102,1

1) Perbedaan satu angka di belakang koma adalah karena pembulatan

BAB IV

POKOK-POKOK PERUBAHAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

4.1 Defisit Anggaran

Dalam APBN tahun 2009 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008, pendapatan negara dan hibah ditetapkan sebesar Rp985.725,3 miliar atau 18,5 persen terhadap PDB, sementara belanja negara ditetapkan sebesar Rp1.037.067,3 miliar atau 19,5 persen terhadap PDB. Oleh karena itu, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp51.342,0 miliar atau 1,0 persen terhadap PDB.

Defisit anggaran tersebut akan dipenuhi melalui sumber pembiayaan non-utang dan utang. Penentuan besaran pembiayaan tersebut mempertimbangkan potensi masing-masing sumber dengan memperhitungkan tingkat risiko dan beban biaya yang akan ditanggung oleh Pemerintah. Dalam APBN tahun 2009, defisit anggaran sebesar Rp51.342,0 miliar tersebut diharapkan dapat ditutup dengan pembiayaan non-utang sebesar Rp6.071,3 miliar dan pembiayaan utang sebesar Rp45.270,8 miliar.

APBN 2009 disusun berdasarkan asumsi atas kondisi yang terjadi sampai dengan triwulan ketiga tahun 2008 dan proyeksi perubahan yang akan terjadi hingga akhir tahun 2009. Dalam perkembangannya, kondisi perekonomian pada triwulan keempat 2008 mengalami perubahan yang sangat cepat dan cukup signifikan, sehingga tidak lagi sesuai dengan proyeksi yang telah disusun sebelumnya. Perubahan kondisi yang berdampak pada perlambatan perekonomian pada triwulan keempat tahun 2008 diproyeksikan masih akan terjadi pada tahun 2009. Penurunan pertumbuhan ekonomi akan ditransmisikan ke dalam turunnya penerimaan perpajakan di APBN. Di lain pihak, penurunan harga minyak yang sangat drastis yang terjadi pada triwulan terakhir tahun 2008 berpengaruh pada sisi penerimaan berupa penurunan penerimaan migas, dan juga pada sisi pengeluaran, yaitu penurunan subsidi. Sementara itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing akan berpengaruh pada komponen APBN, baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan yang memiliki kandungan (*content*) valuta asing, seperti penerimaan pinjaman luar negeri, pembayaran bunga utang luar negeri, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada triwulan keempat tahun 2008 mengakibatkan Pemerintah mengajukan Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, dilakukan penyesuaian asumsi pada variabel utama yang secara signifikan berpengaruh terhadap besaran-besaran APBN 2009, yaitu pertumbuhan ekonomi dari semula 6,0 persen menjadi 4,5 persen, penurunan tingkat inflasi dari 6,2 persen menjadi 6,0 persen, pelemahan nilai tukar dari Rp9.400 per USD menjadi Rp11.000 per USD, dan penurunan harga minyak dari USD80,0 per barel menjadi USD45,0 per barel. Sementara itu, dengan mempertimbangkan realisasi kondisi ekonomi dan APBN dalam semester I tahun 2009, Pemerintah melakukan penyesuaian kembali terhadap berbagai variabel utama ekonomi makro pada APBN-P 2009, yaitu pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 4,3 persen, tingkat

inflasi sebesar 4,5 persen, nilai tukar sebesar Rp10.500 per USD, dan harga minyak sebesar USD61,0 per barel.

Berdasarkan kondisi tersebut, realisasi pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2009 diperkirakan mencapai sebesar Rp870.999,0 miliar. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp114.726,3 miliar (11,6 persen) apabila dibandingkan dengan APBN 2009, dan mengalami kenaikan sebesar Rp22.427,1 miliar (2,6 persen) apabila dibandingkan dengan Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Sementara itu, realisasi belanja negara dalam APBN-P 2009 diperkirakan sebesar Rp1.000.843,9 miliar. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp36.223,4 miliar (3,5 persen) apabila dibandingkan dengan APBN 2009 dan mengalami kenaikan sebesar Rp12.756,6 miliar (1,3 persen) apabila dibandingkan dengan Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Perubahan pendapatan negara dan hibah serta belanja negara tersebut pada akhirnya juga mengakibatkan perubahan terhadap besaran defisit anggaran, yaitu dari Rp51.342,0 miliar (1,0 persen terhadap PDB) dalam APBN 2009 menjadi sebesar Rp139.515,4 miliar (2,5 persen terhadap PDB) dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 dan menjadi sebesar Rp129.844,9 miliar (2,4 persen terhadap PDB) dalam APBN-P 2009.

Besaran defisit yang cenderung meningkat tersebut, mengakibatkan peningkatan kebutuhan pembiayaan, yang harus dipenuhi dari berbagai sumber yang tersedia, dengan cara memaksimalkan pencapaiannya. Setiap pemilihan sumber pembiayaan akan membawa konsekuensi pada biaya dan risiko. Apabila Pemerintah memilih sumber pembiayaan yang berasal dari non-utang untuk membiayai defisit, maka jumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintah akan berkurang. Aset Pemerintah tersebut dapat berupa dana tunai yang disimpan dalam rekening Pemerintah, kepemilikan saham Pemerintah pada BUMN, maupun aset lainnya seperti yang saat ini dikelola oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Sementara itu, apabila pembiayaan defisit dipenuhi melalui utang, maka sebagai konsekuensinya kewajiban Pemerintah untuk membayar kewajiban utang, baik dalam bentuk bunga maupun pembayaran pokok utang, baik di masa kini maupun masa yang akan datang, akan mengalami peningkatan. Pilihan sumber pembiayaan mengharuskan Pemerintah untuk memilih kombinasi sumber-sumber pembiayaan defisit yang tersedia dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dengan biaya dan risiko yang akan dihadapi.

4.2 Pembiayaan Defisit Anggaran

Kebutuhan pembiayaan anggaran dalam APBN-P 2009 diperkirakan mencapai sebesar Rp129.844,9 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp78.502,9 miliar (152,9 persen) apabila dibandingkan dengan APBN 2009, atau mengalami penurunan sebesar Rp9.670,5 miliar (6,9 persen) apabila dibandingkan dengan Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Peningkatan kebutuhan pembiayaan anggaran dalam APBN-P 2009 direncanakan akan dibiayai dari pembiayaan non-utang sebesar Rp43.312,6 miliar dan pembiayaan utang sebesar Rp86.532,3 miliar.

4.2.1 Pembiayaan Non-Utang

Dalam APBN-P 2009, pembiayaan non-utang terutama berasal dari perbankan dalam negeri dan non-perbankan dalam negeri. Sumber pembiayaan non-utang yang berasal dari perbankan dalam negeri antara lain berasal dari rekening dana investasi (RDI), sisa lebih

pembiayaan anggaran (SILPA) 2008, rekening pembangunan hutan (RPH), dan rekening Pemerintah lainnya. Pemanfaatan sumber pembiayaan perbankan dalam negeri yang utamanya bersumber dari saldo kas rekening Pemerintah harus melalui persetujuan DPR RI. Hal ini mengingat saldo kas merupakan aset bersifat tunai atau lancar yang dapat digunakan setiap saat dan tersimpan di dalam Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di Bank Indonesia. Sedangkan sumber pembiayaan non-utang yang berasal dari non-perbankan dalam negeri mengandalkan penerimaan dari privatisasi dan hasil pengelolaan aset.

Perbankan Dalam Negeri

Penggunaan pembiayaan perbankan dalam negeri untuk menutup defisit anggaran merupakan *non-discretionary policy* Pemerintah, tetapi harus tetap sejjin DPR RI. Komponen utama pembiayaan perbankan dalam negeri adalah saldo kas rekening Pemerintah, yang merupakan akumulasi simpanan Pemerintah dalam bentuk tunai dari hasil lebih realisasi APBN tahun-tahun sebelumnya. Saldo kas tersebut dapat bersumber dari RKUN dan/atau rekening Pemerintah lainnya yang dikelola/dikuasai oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Peningkatan kebutuhan pembiayaan non-utang secara signifikan dalam APBN-P 2009 terutama akan dibiayai dari SILPA 2008 sebesar Rp51.857,1 miliar. SILPA yang terjadi pada tahun 2008 tersebut merupakan tambahan akumulasi dana tunai di rekening Pemerintah yang belum terpakai yang terjadi akibat penerimaan, baik dari pendapatan negara maupun penerimaan pembiayaan, lebih besar daripada pengeluaran, baik untuk belanja negara maupun pengeluaran pembiayaan.

Selain dari SILPA 2008, APBN-P 2009 juga akan dibiayai dari setoran RDI sebesar Rp3.690,0 miliar, RPH sebesar Rp625,0 miliar, dan rekening Pemerintah sebesar Rp394,0 miliar yang merupakan saldo dana gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan) tahun 2008. Saldo dana Gerhan tersebut berasal dari dana reboisasi tahun anggaran 2008 sebesar Rp1.875,0 miliar yang dalam realisasinya ternyata hanya terserap sebesar Rp1.481,0 miliar, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp394,0 miliar yang disetorkan kembali ke rekening khusus Menteri Keuangan. Dalam APBN-P 2009, saldo dana Gerhan sebesar Rp394,0 miliar tersebut ditempatkan pada pos pembiayaan di perbankan dalam negeri, mengingat dana tersebut disetor ke rekening Pemerintah dan bukan merupakan tambahan pendapatan baru yang bersumber dari dana reboisasi. Sedangkan pada sisi penggunaan/pengeluaran akan ditempatkan pada Belanja Lain-lain (BA 999.06) sebagai cadangan dana reboisasi.

Pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri pada APBN-P 2009 diperkirakan mencapai sebesar Rp56.566,2 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami kenaikan sebesar Rp39.937,0 miliar (240,2 persen) apabila dibandingkan dengan APBN 2009. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan perhitungan SILPA pada tahun 2008. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan Dokumen Stimulus Fiskal 2009, pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri pada APBN-P 2009 mengalami penurunan sebesar Rp9.231,3 miliar (14,0 persen). Penurunan tersebut disebabkan menurunnya setoran RPH yang akan digunakan untuk membiayai dana bergulir sektor kehutanan. Selain itu, penurunan tersebut juga disebabkan adanya perubahan pencatatan pelunasan piutang negara oleh PT Pertamina (Persero) sebesar Rp9.136,4 miliar, yang semula dicatat sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam negeri menjadi setoran penerimaan negara bukan pajak (SDA Migas). Hal ini mengingat bahwa penerimaan tersebut merupakan penyelesaian kewajiban PT Pertamina (Persero) tahun 2003 yang terkait erat dengan PNBPN. Penerimaan

tersebut seluruhnya akan dikonversikan menjadi penyertaan modal negara (PMN) pada PT Pertamina (Persero). Atas setoran PNBPT PT Pertamina (Persero) tersebut tidak dibagikan ke daerah.

Non-Perbankan Dalam Negeri

Sumber pembiayaan non-perbankan dalam negeri yang berasal dari non-utang dalam APBN-P 2009 bersumber dari hasil pengelolaan aset serta dana investasi Pemerintah dan restrukturisasi BUMN sebesar negatif Rp13.253,6 miliar.

Privatisasi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, program privatisasi dilakukan Pemerintah dengan tujuan utama untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan (BUMN). Peningkatan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas modal BUMN dan pelepasan kepemilikan Pemerintah kepada swasta agar BUMN lebih mampu bersaing. Sementara itu, kondisi pasar finansial tahun 2009 yang masih fluktuatif menyebabkan harga saham BUMN yang semula direncanakan akan diprivatisasi diperkirakan akan turun secara signifikan. Terlebih privatisasi yang akan dilakukan, salah satunya akan menggunakan metode penawaran umum di pasar modal (*initial public offering/IPO*). Mempertimbangkan kondisi tersebut, Pemerintah menempuh kebijakan untuk tidak melakukan program privatisasi, sehingga diproyeksikan tidak ada penerimaan hasil privatisasi untuk tahun 2009. Proyeksi tersebut lebih rendah dari target privatisasi dalam APBN 2009 dan Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp500,0 miliar.

Hasil Pengelolaan Aset dan Restrukturisasi BUMN

Sumber pembiayaan yang berasal dari hasil pengelolaan aset dalam APBN-P 2009 direncanakan sebesar negatif Rp164,6 miliar atau lebih rendah Rp2.729,6 miliar dari besaran yang ditetapkan dalam APBN 2009 maupun Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp2.565,0 miliar. Jumlah tersebut merupakan nilai bersih dari hasil pengelolaan aset sebesar Rp835,4 miliar yang berasal dari perkiraan realisasi atas aset yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan PT PPA (Persero) setelah dikurangi dengan penyertaan modal negara (PMN) untuk restrukturisasi BUMN sebesar Rp1.000,0 miliar. Dalam APBN-P 2009, PT PPA (Persero) ditargetkan dapat memberikan kontribusi dari hasil pengelolaan aset program restrukturisasi perbankan sebesar Rp358,5 miliar atau lebih rendah Rp2.641,5 miliar dari besaran yang ditetapkan dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Rendahnya perkiraan tersebut disebabkan target penjualan PT Texmaco dan PT Tuban Petro yang merupakan 80,0 persen target penjualan aset 2009, diperkirakan belum dapat terlaksana pada tahun 2009. Selain hasil pengelolaan aset oleh PT PPA (Persero), DJKN diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembiayaan APBN-P 2009 melalui hasil realisasi aset-aset kredit yang diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui penjualan aset properti maupun penyelesaian aset lainnya, senilai Rp476,9 miliar atau lebih rendah Rp88,1 miliar dari target sebesar Rp565,0 miliar, baik yang ditetapkan dalam APBN 2009 maupun dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Hasil penjualan aset tersebut berasal dari aset eks BPPN, aset eks BDL, dan aset eks kelolaan PT PPA (Persero), yang berada dalam pengelolaan DJKN.

Sementara itu, melalui PP No. 61 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, Pemerintah memperluas maksud dan tujuan PT PPA (Persero) menjadi: (a) pengelolaan aset negara eks BPPN, (b) restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN; (c) kegiatan investasi; dan (d) kegiatan pengelolaan aset BUMN. Dalam APBN-P 2009, alokasi dana PMN dalam rangka restrukturisasi BUMN yang ditugaskan kepada PT PPA (Persero) tersebut masih tetap sama dengan yang ditetapkan dalam APBN 2009 dan Dokumen Stimulus Fiskal 2009 sebesar Rp1.000,0 miliar. Restrukturisasi BUMN yang dilakukan oleh PT PPA (Persero) pada dasarnya dilakukan untuk penyelamatan dan penyehatan BUMN, yang akan dilakukan melalui pembenahan manajemen, operasional maupun struktur keuangan.

Dana Investasi Pemerintah dan Restrukturisasi BUMN

Di dalam pembiayaan anggaran, dana investasi Pemerintah dan restrukturisasi BUMN bukanlah merupakan sumber pembiayaan anggaran, namun merupakan pengeluaran yang menjadi faktor pengurang dari pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan bersifat tidak habis pakai, dengan kata lain merupakan investasi Pemerintah dengan harapan akan menghasilkan keuntungan atau menambah kekayaan bersih di masa sekarang dan yang akan datang.

Dalam APBN-P 2009, Pemerintah merencanakan dana investasi Pemerintah dan restrukturisasi BUMN sebesar Rp13.089,0 miliar. Jumlah tersebut menurun Rp533,9 miliar (3,9 persen) jika dibandingkan dengan APBN 2009 atau menurun Rp1.033,9 miliar (7,3 persen) jika dibandingkan dengan Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh berkurangnya alokasi dana bergulir kehutanan. Dana investasi Pemerintah dan restrukturisasi BUMN tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan investasi Pemerintah sebesar Rp500,0 miliar, pemberian PMN dan restrukturisasi BUMN sebesar Rp10.674,0 miliar, dana kontinjensi untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp1.000,0 miliar, dan dana bergulir sebesar Rp915,0 miliar.

Kebijakan investasi Pemerintah saat ini masih menitikberatkan pada bidang infrastruktur, baik melalui pola *public private partnership* maupun *non-public private partnership*. Prioritas infrastruktur yang akan dibiayai diantaranya adalah jalan tol, transportasi, pelabuhan, pertambangan, energi, ketenagalistrikan (*power plant*), baik yang berasal dari energi terbarukan (*renewable energy*) maupun yang berasal dari batubara.

Sementara itu, Pemerintah merencanakan akan memberikan PMN kepada BUMN yang terkait dengan kebijakan Pemerintah sebesar Rp10.674,0 miliar. Alokasi dana PMN tersebut untuk PT Pertamina (Persero) sebesar Rp9.136,4 miliar, pendirian *guarantee fund* sebesar Rp1.000,0 miliar, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo sebesar Rp500,0 miliar, serta PT Perkebunan Nusantara II (Persero) sebesar Rp37,6 miliar. PMN untuk PT Pertamina (Persero) berasal dari konversi penyelesaian kewajiban PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah yang merupakan kelanjutan dari penetapan neraca pembukaan PT Pertamina (Persero) tahun 2003. Sedangkan tujuan pemberian PMN untuk pendirian *guarantee fund* adalah untuk memberikan penjaminan pada proyek kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha di bidang infrastruktur.

Sementara itu, PMN sebesar Rp500,0 miliar kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo diberikan dalam rangka penambahan dana penjaminan kredit usaha rakyat (KUR). Penjaminan KUR tersebut diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan akses usaha mikro,

kecil, menengah, dan koperasi pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. PMN tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penjaminan KUR sehingga semakin banyak usaha kecil, mikro, dan menengah yang dapat memperoleh kredit usaha rakyat tersebut. Sedangkan PMN untuk PTPN II (Persero) berasal dari konversi tunggakan dividen kepada Pemerintah tahun 1999, terkait kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dan struktur modal kerja perusahaan yang tidak memadai. Diharapkan dengan PMN tersebut, PTPN II (Persero) dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan program penyehatan perusahaan.

Di dalam APBN-P 2009, Pemerintah juga akan memberikan dana kontinjensi kepada PT PLN (Persero) sebagai upaya dalam mengemban tugas Pemerintah guna membangun infrastruktur di sektor ketenagalistrikan. Dana kontinjensi ditujukan untuk memberikan jaminan atas risiko atau kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban dalam membayar bunga pinjaman yang diperoleh dari para kreditur pada tahun sebelumnya.

Dalam APBN 2009, Pemerintah mulai mengalokasikan dana bergulir (*revolving fund*) untuk sektor kehutanan dan koperasi usaha kecil dan menengah (KUKM) di dalam pembiayaan anggaran. Pengalokasian dana bergulir di dalam pembiayaan anggaran didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga. Di dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, besaran dana bergulir untuk sektor kehutanan dan sektor KUKM masih tetap seperti yang dialokasikan dalam APBN 2009, yaitu masing-masing Rp1.696,5 miliar dan Rp290,0 miliar. Namun dalam APBN-P 2009, dana bergulir untuk sektor kehutanan diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp1.071,5 miliar atau 63,2 persen menjadi Rp625,0 miliar. Penurunan perkiraan realisasi dana bergulir sektor kehutanan tersebut didasarkan pada kebutuhan riil BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan selaku satuan kerja pengelola dana bergulir kehutanan setelah dilakukannya *assessment* pada kuartal II 2009. Perkiraan realisasi tersebut telah memperhitungkan masa daur selama 8 tahun dan sisa cadangan dana reboisasi yang merupakan sumber dana utama RPH. Sedangkan untuk dana bergulir sektor KUKM, diperkirakan masih tetap sama dengan yang telah ditetapkan dalam APBN 2009 dan Dokumen Stimulus Fiskal 2009.

4.2.2 Pembiayaan Utang (neto)

Akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan secara keseluruhan, dan makin sedikitnya sumber pembiayaan non-utang, pembiayaan yang bersumber dari utang akan mengalami peningkatan dalam jumlah yang cukup signifikan. Pembiayaan utang (neto) dalam APBN 2009 ditetapkan sebesar Rp45.270,8 miliar, meliputi pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp9.448,2 miliar dan surat berharga negara (SBN) (neto) sebesar Rp54.719,0 miliar. Sementara itu, dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 ditetapkan sebesar Rp84.775,9 miliar, meliputi pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp14.474,9 miliar dan SBN (neto) sebesar Rp54.719,0 miliar, serta tambahan pembiayaan utang sebesar Rp44.531,8 miliar. Dengan mempertimbangkan perubahan asumsi, rencana penarikan terkini, kondisi pasar terkini, serta kebijakan lain yang akan ditempuh, dalam APBN-P 2009, pembiayaan utang (neto) direncanakan sebesar Rp86.532,3 miliar, yang terdiri dari pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp12.724,2 miliar dan SBN (neto) sebesar Rp99.256,6 miliar. Dari sisi instrumen pembiayaan, pembiayaan melalui utang dapat dibedakan atas 2 jenis,

yaitu (1) pinjaman luar negeri (neto), yang diperhitungkan dari penarikan pinjaman bruto dikurangi penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dan (2) SBN (neto), yang diperhitungkan dari penerbitan SBN dikurangi pelunasan pada saat jatuh tempo (*redemption*) dan pembelian kembali sebelum jatuh tempo (*buyback*) surat berharga. Di samping memperhitungkan besarnya tambahan kebutuhan pembiayaan, perlu dilakukan upaya untuk menggali sumber pembiayaan yang masih tersedia dan mencari sumber pembiayaan baru.

Surat Berharga Negara (SBN)

Pembiayaan melalui SBN (neto), dalam APBN 2009 ditetapkan sebesar Rp54.719,0 miliar, yang dihitung berdasarkan *outstanding* SBN akhir September 2008, proyeksi penerbitan obligasi negara sampai akhir tahun 2008, perkiraan transaksi *debt switch/buyback* sampai akhir tahun, terutama untuk SBN yang jatuh tempo tahun 2009-2014, asumsi nilai tukar Rp9.400 per USD, perkiraan daya serap pasar, serta dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan secara keseluruhan.

Sebagai dampak dari beberapa perubahan asumsi makro, pembiayaan SBN (neto) dalam APBN-P 2009 berubah menjadi sebesar Rp99.256,6 miliar, didalamnya termasuk pelunasan sebagian nilai pokok Obligasi Negara seri SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp2.646,4 miliar.

Pemenuhan terhadap tambahan kebutuhan pembiayaan dari penerbitan surat berharga negara masih akan tetap difokuskan dari permintaan pasar domestik, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan melalui pasar internasional apabila masih dibutuhkan. Penerbitan di pasar internasional akan diupayakan agar dilakukan pada jumlah yang terukur, baik yang berasal dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN), maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Adapun kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam memenuhi target pembiayaan hingga akhir tahun 2009, antara lain: (1) melanjutkan pengembangan pasar SBN, seperti melalui diversifikasi instrumen dalam rangka memperluas basis investor, baik di dalam maupun di luar negeri, (2) memfokuskan penerbitan di pasar domestik, namun dengan tetap memperhatikan *crowding-out effect* dengan mengonsentrasikan pada penerbitan SBN pada tenor tertentu, baik jangka menengah maupun pendek. Hal ini antara lain ditempuh melalui penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), namun dengan memperhitungkan batas risiko *refinancing* yang terkendali, (3) tetap mengutamakan instrumen dengan bunga tetap, dan (4) mengintensifkan pelaksanaan *buyback* dan *debt switching* untuk meningkatkan likuiditas pasar SBN dan mengelola portofolio SBN.

Untuk maksud tersebut, penerbitan SBN akan dilakukan melalui penerbitan (1) SBN valas yang terdiri atas SUN valas dan SBSN valas, (2) Obligasi Negara, (3) SPN, dan (4) SBSN domestik.

Sampai dengan akhir Juli 2009, telah diterbitkan surat berharga di pasar internasional sebesar Rp46.802,2 miliar. Penerbitan tersebut dilakukan di tengah kondisi pasar keuangan global yang sulit dan penuh tantangan sebagai dampak krisis *subprime mortgage* yang berlanjut dengan ancaman resesi di Amerika Serikat. Jumlah tersebut terdiri atas penerbitan SUN valas sebesar Rp36.075,0 miliar (USD3,0 miliar), SBSN valas sebesar Rp7.031,7 miliar (USD650 juta), dan *Samurai Bond* sebesar Rp3.695,4 miliar (Yen35,0 miliar).

Penerbitan SUN valas dilakukan dengan metode *Global Medium Term Note (GMTN) program* dengan pertimbangan basis investor sama dengan metode sebelumnya yaitu Reg. S/144A, namun proses penerbitannya lebih cepat dan dapat dilakukan sewaktu-waktu dalam masa program selama 1 tahun. Dengan demikian, Pemerintah mempunyai fleksibilitas dalam menentukan waktu penerbitan sesuai dengan kondisi pasar keuangan. Basis investor GMTN meliputi pasar Asia, Eropa, dan *qualified institutional buyers (QIB)* di Amerika Serikat.

Dari jumlah penerbitan SUN valas sebesar USD3,0 miliar tersebut (ekuivalen Rp36.075,0 miliar), Pemerintah menerbitkan dalam 2 tenor yang berbeda, yaitu obligasi yang jatuh tempo tahun 2014 yang diterbitkan pada *yield* 10,5 persen dengan kupon 10,375 persen dan obligasi yang jatuh tempo tahun 2019 pada *yield* 11,75 persen dengan kupon 11,625 persen. Adapun investor yang membeli obligasi valas tersebut meliputi investor dari kawasan Amerika, Eropa, dan Asia dengan distribusi yaitu 38,5 persen dari Amerika, 19,0 persen dari Eropa, dan 42,5 persen dari Asia. Dari sisi tipe investor, 63,0 persen diantaranya adalah *fund manager*, 23,0 persen bank, dan 14,0 persen perusahaan asuransi, reksadana, ritel, dan tipe investor lainnya.

Seiring dengan upaya pengembangan instrumen dan perluasan basis investor, telah dilakukan penerbitan SBSN valas untuk pertama kalinya dengan menggunakan akad ijarah. Meskipun dilakukan dalam kondisi pasar yang masih dalam tahap pemulihan, penerbitan valas memperoleh respon yang cukup positif dari investor utamanya, di Asia (40,0 persen), Timur Tengah (30,0 persen), Amerika (19,0 persen), dan Eropa (11,0 persen). Penerbitan SBSN valas tersebut sebesar USD650,0 juta dengan jatuh tempo pada tahun 2014 dan tingkat bagi hasil 8,8 persen per tahun.

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas garansi dari JBIC yang tersedia sampai dengan tahun 2010, Pemerintah telah melakukan penerbitan untuk pertama kali *Samurai Bond* sebesar Yen 35,0 miliar (ekuivalen Rp3.695,4 miliar) dengan jangka waktu jatuh tempo 10 tahun. Untuk *Samurai Bond* ini, Pemerintah menetapkan tingkat kupon sebesar 2,75 persen. Format penerbitan yang digunakan adalah *private placement*, yang peruntukannya terbatas bagi *qualified institutional investor* termasuk perusahaan asuransi dan institusi keuangan lainnya di Jepang.

Sementara itu, di pasar domestik, Pemerintah telah menerbitkan SBN sebesar Rp64.802,0 miliar, yang meliputi instrumen obligasi negara reguler maupun sukuk. Sebagai instrumen baru, sukuk domestik berhasil menyerap dana sebesar Rp8.242,3 miliar.

Di samping melakukan penerbitan untuk pembiayaan defisit, dalam rangka mengendalikan risiko dan biaya utang dalam jangka panjang, Pemerintah juga melakukan pengelolaan portofolio utang melalui program *debt switching* dan *buyback*. Sampai dengan akhir Juli 2009, telah dilakukan pembelian kembali (*buyback*) sebesar Rp8.518,0 miliar dan *debt switching* sebesar Rp1.870,0 miliar. Selanjutnya, program ini akan tetap dilaksanakan dengan besaran dan waktu pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi pasar SUN dan kondisi keuangan Pemerintah.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan yang cukup besar, dalam tahun 2009 Pemerintah merencanakan akan menerbitkan kembali SPN di pasar domestik. Jumlah yang akan diterbitkan semaksimal mungkin akan mempertimbangkan kemampuan pasar domestik untuk menyerap dan diupayakan tidak mengganggu risiko pengelolaan utang, terutama risiko pembiayaan kembali.

Pinjaman Luar Negeri

Pembiayaan dari luar negeri (neto) dalam APBN 2009 ditetapkan sebesar negatif Rp9.448,2 miliar, yang berarti jumlah pinjaman luar negeri yang ditarik lebih kecil daripada cicilan pokok yang harus dibayarkan. Dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp9.400 per USD, maka:

- (1) Penarikan pinjaman luar negeri yang direncanakan akan dilakukan adalah sebesar Rp52.161,0 miliar, yang terdiri dari penarikan pinjaman proyek sebesar Rp25.721,0 miliar dan penarikan pinjaman program sebesar Rp26.440,0 miliar.
- (2) Pembayaran cicilan pokok jatuh tempo sebesar Rp61.609,2 miliar.

Pembiayaan melalui pinjaman luar negeri tersebut dihitung berdasarkan posisi *outstanding* pinjaman luar negeri akhir September 2008, yang telah memperhitungkan tambahan penarikan sampai akhir tahun 2008, asumsi nilai tukar Rp9.400 per USD, rencana penarikan pinjaman program yang bersumber dari *World Bank*, *Asian Development Bank* (ADB), *Japan International Cooperation Agency* (JICA), *Agence Française de Développement* (AFD) – Perancis, dan rencana penarikan pinjaman proyek berdasarkan *loan* yang sedang berjalan (*on going*) dan *loan* baru yang akan ditandatangani dan diperkirakan akan ditarik sebagian pada tahun 2009.

Dalam APBN-P 2009, pembiayaan dari pinjaman luar negeri (neto) diperkirakan akan mengalami peningkatan kebutuhan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3.276,0 miliar atau dari negatif Rp9.448,2 miliar dalam APBN menjadi negatif Rp12.724,2 miliar. Kenaikan pengeluaran pembiayaan pinjaman luar negeri (neto) ini terjadi terutama akibat perubahan asumsi nilai tukar.

Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman proyek (bruto) dalam APBN-P 2009 meningkat, semula sebesar Rp25.721,0 miliar dalam APBN 2009 menjadi Rp38.983,7 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan anggaran alutsista sebesar Rp191,2 miliar, percepatan penarikan pinjaman untuk Departemen Komunikasi dan Informatika sebesar Rp79,8 miliar, serta adanya penerimaan penerusan pinjaman sebesar Rp12.991,7 miliar yang kemudian diteruskan kepada BUMN dan pemerintah daerah dalam jumlah yang sama.

Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari pinjaman program dalam APBN-P 2009 diperkirakan sebesar Rp30.315,5 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp3.875,5 miliar (14,7 persen) apabila dibandingkan dengan APBN 2009, dan mengalami penurunan sebesar Rp1.584,5 miliar (5,0 persen) apabila dibandingkan dengan Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Peningkatan tersebut disebabkan oleh perubahan asumsi kurs dari Rp9.400 per USD menjadi Rp10.500 per USD dan adanya BOS *refinancing* dari *World Bank* yang belum terserap pada tahun 2008 sebesar USD194 juta termasuk USD94 juta (ekuivalen Rp1.043,5 miliar) yang di-*disburse* pada awal tahun 2009. Pinjaman program yang diproyeksikan dapat digunakan untuk pembiayaan tahun 2009 diantaranya akan bersumber dari: (1) *World Bank* dengan rencana program antara lain *Development Policy Loan VI*, *Infrastructure Development Policy Loan III*, dan BOS *refinancing*, (2) ADB dengan rencana program antara lain *Development Policy Support Program V* dan *Capital Market Development Program Cluster II*, (3) JICA dengan rencana program *Development Policy Loan V*, *Infrastructure Reform Sector Development Program* yang merupakan *cofinancing* dengan pinjaman Bank Dunia, serta *Climate Change Program Reform* yang merupakan

cofinancing dengan AfD - Perancis. Penarikan pinjaman program hanya dapat dilakukan apabila Pemerintah telah memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam *policy matrix* atau berdasarkan pelaksanaan kegiatan tertentu yang telah disepakati dengan pemberi pinjaman.

Sementara itu, pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo dalam APBN-P 2009 diperkirakan akan mencapai Rp69.031,7 miliar. Perkiraan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri tersebut telah memperhitungkan proyeksi terkini atas kewajiban pembayaran utang, proyeksi perubahan nilai tukar mata uang utama dunia, terutama terkait dengan perhitungan kewajiban atas *outstanding* utang dalam mata uang nondolar Amerika Serikat seperti Yen, Euro, Poundsterling, dan valuta asing lainnya.

4.2.3 Pinjaman Siaga (*Public Expenditure Financing Facility/Contingency Loan*)

Menyadari bahwa kondisi pasar keuangan dunia masih belum kondusif, target pemenuhan defisit APBN melalui penerbitan SBN dikhawatirkan tidak dapat dilakukan secara optimal. Semakin terbatasnya permintaan beli dari investor akibat perlambatan ekonomi yang berimbas pada penurunan kapasitas investasi dan keterbatasan likuiditas, akan berdampak pada semakin banyaknya negara-negara di dunia yang melakukan penambahan utang dalam rangka penyelamatan perekonomian dan pemberian stimulus fiskal. Selain itu, penerbitan oleh Pemerintah mempertimbangkan adanya kebutuhan perusahaan untuk melakukan *refinancing* utang jatuh tempo, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya *crowding-out effect* di pasar keuangan. Hal ini pada akhirnya dapat berakibat pada makin sulitnya kemungkinan untuk mencari pembiayaan dari pasar dan makin mahal biaya yang harus ditanggung.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah telah melakukan pembicaraan secara intensif dengan kreditor konvensional dari lembaga multilateral dan/atau negara-negara pemberi pinjaman bilateral yang disebut *Development Partners*, mengenai kemungkinan untuk memberikan dukungan (*back-up*) berupa pemberian pinjaman siaga dalam hal penerbitan SBN tidak dapat dilakukan secara optimal. Hingga saat ini, beberapa *Development Partners* telah menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan tahun 2009 dalam rangka pemberian stimulus fiskal, melalui mekanisme pinjaman siaga.

Hal tersebut juga sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009 yang mengatur kondisi dan kebijakan yang dapat ditempuh Pemerintah dengan persetujuan DPR dalam keadaan darurat. Keadaan darurat meliputi penurunan pertumbuhan ekonomi, kenaikan biaya utang, dan krisis sistemik. Sementara itu, langkah-langkah yang dapat ditempuh meliputi: (1) meningkatkan pengeluaran, (2) pergeseran anggaran belanja, (3) penerbitan SBN melampaui pagu, (4) penghematan belanja negara, dan (5) penarikan pinjaman siaga.

Adapun *Development Partners* yang telah siap untuk memberikan pinjaman siaga dengan total komitmen mencapai sebesar USD5,5 miliar adalah ADB, *World Bank*, Australia, dan Jepang melalui JBIC. Total komitmen tersebut merupakan komitmen yang dapat digunakan sebagai dukungan (*back-up*) dalam jangka waktu 2 tahun, yaitu tahun 2009 dan 2010. Apabila jumlah tersebut tidak seluruhnya ditarik dalam tahun 2009, komitmen tersebut masih dapat digunakan sebagai *back-up* untuk tahun 2010.

Pinjaman siaga atau *Public Expenditure Financing Facility/Contingency Loan* merupakan *budget support*, yaitu dukungan terhadap pembiayaan program-program penanggulangan krisis oleh Pemerintah Indonesia yang akan ditarik, dalam hal Pemerintah kesulitan menerbitkan SBN. Kesulitan menerbitkan SBN dapat terjadi dalam hal tidak adanya *demand* yang mencukupi terhadap SBN, atau sekalipun ada, tingkat imbal hasil (*yield*) yang dikehendaki investor sangatlah mahal.

Bentuk dukungan untuk pinjaman siaga dapat berupa: (1) pemberian pinjaman, yang hanya dapat ditarik dalam hal pemenuhan kebutuhan pembiayaan dari utang melalui penerbitan surat berharga tidak dapat dicapai sesuai rencana triwulanan yang disepakati, dan (2) dalam bentuk pemberian jaminan (*guarantee*) untuk penerbitan surat berharga di pasar internasional, terutama pasar Jepang. Untuk penarikannya, dalam setiap akhir triwulan, Pemerintah akan melakukan pembahasan dengan *Development Partners* terhadap besaran pinjaman yang akan ditarik.

Dalam operasionalnya, penerbitan SBN ditetapkan dalam target 3 bulanan, yang diharapkan akan dicapai melalui penerbitan berbagai instrumen SBN, baik dalam denominasi rupiah maupun valas. Dalam hal terdapat kekurangan (*shortfall*) realisasi penerbitan dibandingkan target 3 bulanan, maka pinjaman siaga akan ditarik sebesar kekurangan tersebut, dengan memperhatikan batasan tingkat bunga yang diatur dalam skema pinjaman siaga.

Bentuk pinjaman siaga secara umum dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Base budget support

Pinjaman siaga dalam bentuk ini telah direncanakan sejak awal, dan telah ditentukan jumlah yang akan ditarik dalam periode tertentu. Jumlah pinjaman siaga yang akan ditarik disesuaikan dengan rencana tersebut, dengan tidak mensyaratkan kondisi tertentu/kondisi apapun.

2. Contingent budget support

Pinjaman siaga dalam bentuk ini mensyaratkan pemenuhan batasan volume dan tingkat bunga. Pinjaman siaga ini baru dapat ditarik dalam hal terdapat kekurangan (*shortfall*) dalam volume penerbitan SBN, dengan memperhatikan batasan tingkat bunga yang ditetapkan.

3. Direct market support

Pinjaman siaga dalam bentuk ini adalah dukungan dalam bentuk jaminan terhadap penerbitan SBN oleh Pemerintah Indonesia. Dukungan ini khusus diberikan oleh Pemerintah Jepang, yaitu berupa jaminan oleh JBIC terhadap penerbitan SBN berdenominasi Yen di pasar Jepang (*Samurai Bonds*). Dengan adanya jaminan dari JBIC, maka *credit rating* Pemerintah Indonesia akan naik mendekati JBIC *credit rating* (mendekati *investment grade*) sehingga diharapkan dapat diterima oleh investor Jepang yang relatif sangat konservatif dan *risk aversion*.

Pinjaman siaga, khususnya *base budget* dan *contingent budget support*, akan ditarik dalam bentuk tunai. Sampai dengan pertengahan tahun 2009, perjanjian dalam rangka pinjaman siaga telah ditandatangani dengan pihak *World Bank*, ADB, dan JBIC. Demikian pula halnya penerbitan *Samurai Bonds* juga telah dilakukan. Sementara itu, perjanjian dengan

Pemerintah Australia sudah disetujui parlemen Australia, dan saat ini Pemerintah Australia sedang menyiapkan *draft loan agreement* untuk dibahas dengan Pemerintah Indonesia. **Tabel IV.1** menunjukkan potensi pinjaman siaga dari beberapa *Development Partners* untuk tahun 2009-2010 beserta sasaran pemanfaatannya.

Dalam operasionalnya, Pemerintah bersama *Development Partners* akan mengadakan pertemuan secara periodik setiap 3 bulan yang akan membahas mengenai tercapai atau tidaknya target penerbitan SBN dalam 3 bulan sebelumnya, terpenuhi atau tidaknya batasan tingkat bunga yang ditetapkan, besarnya jumlah pinjaman siaga yang akan ditarik, serta proposal perubahan skema penarikan pinjaman siaga diperlukan. Perkembangan pembiayaan anggaran berdasarkan utang dan non-utang tahun 2009 dapat dilihat pada **Tabel IV.2**.

TABEL IV.1
POTENSI PINJAMAN SIAGA TAHUN 2009 - 2010

	Kreditur	Rp Triliun	USD Miliar	%	Sasaran Pinjaman
A	World Bank - Development Policy Loan - Deferred Drawdown Option (DPL-DDO)	21,0	2,00	36%	Contingent budget-support
B	Asian Development Bank (ADB)	10,5	1,00	18%	Contingent budget-support
C	Australia	10,5	1,00	18%	Contingent budget-support
D	Jepang	15,75	1,50	27%	Direct market support
	Jumlah	57,75	5,50		

* Asumsi kurs APBN-P 2009: USD1 = Rp10.500

TABEL IV.2
PEMBIAYAAN ANGGARAN BERDASARKAN UTANG DAN NON-UTANG, 2009
(miliar rupiah)

Uraian	APBN	% thd PDB	Dokumen Stimulus	% thd PDB	APBN-P	% thd PDB	% thd APBN	% thd Dok. Stimulus
PEMBIAYAAN DEFISIT (I + II)	51.342,0	1,0	139.515,4	2,5	129.844,9	2,4	252,9	93,1
I. PEMBIAYAAN NON UTANG	6.071,3	0,1	54.739,5	1,0	43.312,6	0,8	713,4	79,1
1. Perbankan Dalam Negeri	16.629,2	0,3	65.797,4	1,2	56.566,2	1,0	340,2	86,0
2. Non Perbankan Dalam Negeri	(10.557,9)	(0,2)	(11.057,9)	(0,2)	(13.253,6)	(0,2)	125,5	119,9
a. Penerimaan Privatisasi	500,0	0,0	500,0	0,0	-	-	-	-
b. Hasil Pengelolaan Aset	2.565,0	0,0	2.565,0	0,0	(164,6)	(0,0)	(6,4)	(6,4)
i. Pengelolaan Aset	3.565,0	0,1	3.565,0	0,1	835,4	0,0	23,4	23,4
ii. PMN untuk Restrukturisasi BUMN	(1.000,0)	(0,0)	(1.000,0)	(0,0)	(1.000,0)	(0,0)	100,0	100,0
c. Dana Invest. Pemerintah dan Restruk. BUMN	(13.622,9)	(0,3)	(14.122,9)	(0,3)	(13.089,0)	(0,2)	96,1	92,7
II. PEMBIAYAAN UTANG	45.270,8	0,8	84.775,9	1,5	86.532,3	1,6	191,1	102,1
1. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(9.448,2)	(0,2)	(14.474,9)	(0,3)	(12.724,2)	(0,2)	134,7	87,9
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto)	52.161,0	1,0	57.621,0	1,1	69.299,2	1,3	132,9	120,3
i. Pinjaman Program	26.440,0	0,5	31.900,0	0,6	30.315,5	0,6	114,7	95,0
ii. Pinjaman Proyek (bruto)	25.721,0	0,5	25.721,0	0,5	38.983,7	0,7	151,6	151,6
- Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	25.721,0	0,5	25.721,0	0,5	25.992,0	0,5	101,1	101,1
- Penerimaan Penerusan Pinjaman	-	-	-	-	12.991,7	0,2	-	-
b. Penerusan Pinjaman	-	-	-	-	(12.991,7)	(0,2)	-	-
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(61.609,2)	(1,2)	(72.095,9)	(1,3)	(69.031,7)	(1,3)	112,0	95,7
2. Surat Berharga Negara (Neto)	54.719,0	1,0	54.719,0	1,0	99.256,6	1,8	181,4	181,4
3. Tambahan Pembiayaan Utang	-	-	44.531,8	0,8	-	-	-	-

Sumber : Departemen Keuangan

4.3 Dampak Perubahan Asumsi dan Defisit

Perubahan asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar perhitungan APBN akan berpengaruh terhadap besaran pendapatan negara dan hibah serta belanja negara. Kedua komponen, pendapatan negara dan hibah serta belanja negara, pada gilirannya akan mempengaruhi defisit anggaran. Kemudian, besar kecilnya defisit anggaran pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah pembiayaan anggaran yang digunakan untuk menutup defisit yang terjadi dalam setiap tahun anggaran. Dengan demikian, semakin besar jumlah defisit anggaran, semakin besar pula jumlah pembiayaan yang diperlukan untuk menutup defisit tersebut, demikian pula sebaliknya.

Dalam tahun 2009, perubahan asumsi makro ekonomi mempengaruhi defisit sehingga meningkat dari 1,0 persen terhadap PDB dalam APBN 2009 menjadi 2,5 persen terhadap PDB dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, dan diproyeksikan menurun menjadi 2,4 persen terhadap PDB dalam APBN-P 2009, telah menyebabkan peningkatan pembiayaan anggaran yang cukup signifikan. Pembiayaan dalam APBN-P 2009 sebesar Rp129.844,9 miliar tersebut, berarti meningkat sebesar Rp78.502,9 miliar (152,9 persen) apabila dibandingkan dengan APBN 2009. Jumlah tersebut berarti menurun sebesar Rp9.670,5 miliar (6,9 persen) apabila dibandingkan dengan Dokumen Stimulus Fiskal 2009. Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah harus melakukan *extra effort* untuk menyediakan sumber-sumber pembiayaan, baik yang berasal dari utang maupun non-utang.

Pemilihan alternatif sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran menimbulkan risiko yang berbeda-beda. Di sisi pembiayaan non-utang, peningkatan defisit yang signifikan telah menyebabkan Pemerintah menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) yang disimpan di Bank Indonesia. Selain SAL, Pemerintah merencanakan akan melepaskan sebagian aset perusahaan yang dikelola oleh PT PPA (Persero) dan DJKN. Hal ini akan menyebabkan nilai kekayaan bersih (*networth*) Pemerintah, baik berupa jumlah uang kas (tunai) maupun aset perusahaan yang dimiliki Pemerintah menurun.

Sedangkan di sisi pembiayaan utang, peningkatan defisit APBN-P 2009 menyebabkan meningkatnya kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang. Dengan peningkatan pembiayaan tersebut, juga berdampak pada meningkatnya pembayaran bunga utang baik dalam negeri maupun luar negeri. Apabila jumlah pembiayaan utang meningkat, maka stok utang Pemerintah akan meningkat pula. Nilai kekayaan bersih (*networth*) Pemerintah akan menurun, seiring dengan meningkatnya stok utang. Dampak perubahan nilai kekayaan bersih (*networth*) dan beban bunga utang terhadap APBN akan timbul di masa-masa yang akan datang.